



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

JALAN UNDATA NO 7 PALU
94111

(0451) 421560

dkp.sultengprov.go.id

dkpprovsulteng@gmail.com



LAPORAN
KINERJA 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Hidayah dan Rahmat-Nya, penulisan dan penyusunan **"Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025"** dapat terselesaikan. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah dalam upaya penyelenggaraan *good governance*, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai pelaksana kegiatan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan.

LKj ini diharapkan dapat memberi gambaran mengenai pencapaian kinerja yang dicapai Provinsi Sulawesi Tengah yang tidak lain juga menunjukkan kinerja instansi sepanjang tahun 2025.

Kami menyadari bahwa penyusunan LKj ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu, kritik dan saran membangun sangat diperlukan sebagai modal dasar perbaikan dan pengembangan pembangunan kelautan dan perikanan di masa mendatang. Pada kesempatan ini pula kami mengucapkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini.

Palu, 27 Januari 2026

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Dr. YOPIE M.I. PATIRO, S.H., M.H
NIP. 19780525 199703 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
 IKHTISAR EKSEKUTIF	 1
BAB I. PENDAHULUAN	3
1.1 Gambaran Umum	3
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	5
1.3 Isu-Isu Strategis/ Permasalahan	28
1.4 Tindak Lanjut LHE AKIP.....	32
 BAB II. PERENCANAAN KINERJA	 36
2.1 Renstra Perangkat Daerah	36
2.2 Struktur Program dan Kegiatan Tahun	42
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	55
2.4 Perjanjian Kinerja	59
 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	 61
3.1 Capaian Kinerja	61
3.2 Realisasi Anggaran	102
3.3 Inovasi	105
3.4 Penghargaan	103

BAB IV. PENUTUP	110
4.1 Kesimpulan	110
4.2 Saran/Strategi Peningkatan Kinerja	110
Lampiran	111

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Pegawai DKP Sulteng per 31 Desember 2025	4
Tabel 2 Aset Tetap Per 31 Desember 2025	5
Tabel 3 Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Sulteng	29
Tabel 4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	33
Tabel 5 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DKP Sulteng Renstra 2021-2026	38
Tabel 6 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DKP Sulteng Renstra 2025-2029	41
Tabel 7 Struktur Program dan Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahunn 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026	44
Tabel 8 Struktur Program dan Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahunn 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2029	51
Tabel 9 IKU DKP Sulteng Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026	57
Tabel 10 IKU DKP Sulteng Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2029	58
Tabel 11 Perjanjian Kinerja Awal DKP Sulteng Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026	60
Tabel 12 Perjanjian Kinerja Awal DKP Sulteng Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2029	60
Tabel 13 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	61

Tabel 14 Target dan Realisasi DKP Sulteng Tahun 2025	
Berdasarkan Renstra 2021-2026	62
Tabel 15 Capaian Nilai Tukar Perikanan (NTNP) Sulteng 2025.	63
Tabel 16 Jumlah Pelaku Usaha yang diperiksa Tahun 2025....	66
Tabel 17 Target dan Realisasi DKP Sulteng Tahun 2025	
Berdasarkan Renstra 2025-2029.....	67
Tabel 18 Capaian Nilai Tukar Nelayan (NTN) Sulteng 2025	69
Tabel 19 Capaian Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi) Sulteng	
Tahun 2025	71
Tabel 20 Jumlah Pelaku Usaha yang Diperiksa Tahun 2025 ...	75
Tabel 21 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 s/d 2025	
Berdasarkan Renstra 2021-2026.....	76
Tabel 22 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 s/d 2025	
Berdasarkan Renstra 2025-2029	79
Tabel 23 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka	
Menengah di Renstra 2021-2026.....	81
Tabel 24 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka	
Menengah di Renstra 2021-2026.....	83
Tabel 25 Perbandingan Capaian IKU Dinas Dengan Capaian Nasional	
Tahun 2025	84
Tabel 26 Perbandingan Capaian IKU Dinas Dengan Capaian Nasional	
Tahun 2025	86
Tabel 27 Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran tahun	
2025 berdasarkan Renstra 2025-2029	96
Tabel 28 Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan	
Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	
Tahun 2025	98
Tabel 29 Pagu dan Realisasi Anggaran per Jenis Belanja TA. 2025	

Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulteng	
.....	102

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi DKP Sulteng	6
Gambar 2 Struktur Organisasi UPTD Balai Perbenihan Perikanan	7
Gambar 3 Struktur Organisasi UPTD PMHP	7
Gambar 4 Struktur Organisasi UPTD PPKKP3K Wilayah I Hingga Wilayah VII	7
Gambar 5 NTNP Sulteng Tahun 2023-2025.....	77
Gambar 6 AKI Sulteng Tahun 2023-2025.....	78
Gambar 7 AKI Sulteng Tahun 2023-2025.....	80
Gambar 8 Halaman Depan Sistem Informasi Pengelolaan Ruang Laut	105
Gambar 9 Replika Alat Pirolisis Sampah Plastik Menjadi BBM	107
Gambar 10 Penghargaan SAKIP A DKP Sulteng Tahun 2025 ...	108
Gambar 11 Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2025.....	108
Gambar 12 Sertifikat Penghargaan PPI Donggala 2025.....	109

EXECUTIVE SUMMARY

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah (DKP Sulteng) mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. DKP Sulteng terdiri dari 1 sekretariat, 4 bidang dan 9 Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan mempunyai fungsi dalam: (1) Perumusan Kebijakan dibidang Pengelolaan Ruang Laut, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan P2HP dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; (2) Pelaksanaan kebijakan dibidang Pengelolaan Ruang Laut, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan P2HP dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; (3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pengelolaan Ruang Laut, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan P2HP dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; (4) Pelaksanaan administrasi dinas perikanan bidang Pengelolaan Ruang Laut, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan P2HP dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan (5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya yang dalam pelaksanaannya didukung oleh potensi sumber daya manusia (SDM) sebanyak 251 orang personel.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj) disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Karena tahun 2025 merupakan tahun peralihan dari Renstra 2021-2026 dan Renstra 2025-2029 maka LKj ini menyajikan capaian kinerja DKP Sulteng tahun 2025 yang diperbandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja awal tahun 2025 berdasarkan Renstra 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja perubahan berdasarkan Renstra 2025-2029, yang mana menggambarkan keberhasilan DKP Sulteng dalam pelaksanaan tugasnya pada tahun kelima dari Renstra 2021-2026 dan tahun pertama pada Renstra 2025-2029.

Secara umum Perjanjian Kinerja awal dan Perjanjian Kinerja perubahan DKP Sulteng tidak banyak berubah. Pada Perjanjian Kinerja awal terdapat 4 (empat) IKU sedangkan pada Perjanjian Kinerja perubahan terdapat 5 (lima) IKU. IKU digunakan untuk mengukur capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sasaran strategis DKP Sulteng 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja awal tercapai sebesar 84,88% sedangkan capaian sasaran strategis DKP Sulteng tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja perubahan sebesar 95,67%.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja awal, dari 4 (empat) IKU yang ditetapkan 1 (satu) indikator mencapai target dan 3 (tiga) indikator

lainnya belum tercapai, yang mana juga masih merupakan angka/data sementara. Uraian IKU DKP Sulteng berdasarkan Perjanjian Kinerja awal dijabarkan sebagai berikut:

- (1) Nilai Tukar Perikanan (NTNP) 96,58 dari target 103,9 atau 92,95%;
- (2) Angka Konsumsi Ikan (AKI) 38,20 kg/kap/th dari target 73,00 kg/kap/th atau 52,33%;
- (3) Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial 0,1891 dari target 0,1866 atau 101,34%;
- (4) Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan 79,86 dari target 85,98 atau 92,88%.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja perubahan, dari 5 (lima) IKU yang ditetapkan semuanya belum mencapai target, yang mana juga masih merupakan angka/data sementara karena saat pembuatan laporan masih dalam proses penghitungan. Uraian IKU DKP Sulteng tahun 2025 dijabarkan sebagai berikut:

- (1) Nilai Tukar Nelayan 96,95 dari target 101,05 atau 95,94%;
- (2) Nilai Tukar Pembudidaya Ikan 92,06 dari target 101,03 atau 91,13%;
- (3) Angka Konsumsi Ikan 38,20 kg/kapita/tahun dari target 40,65 kg/perkapita/tahun atau sebesar 93,97%;
- (4) Rasio Pemanfaatan Kawasan Perairan Terhadap Total Kawasan Perairan Teritorial 0,1802 dari target 0,1803 atau mencapai 99,94%;
- (5) Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-undangan 79,86 dari target 82,00 atau sebesar 97,39%.

Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis, DKP Sulteng mendapatkan alokasi anggaran APBD sebesar Rp56.640.850.389,24 yang terealisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp50.618.857.700,90 atau 89,37%.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih dijumpai beberapa kendala dan kelemahan yang akan dijadikan catatan penting untuk peningkatan dan perbaikan di masa yang akan datang.

Palu, 27 Januari 2026

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


Dr. YOPIE M.I. PATIRO, S.H., M.H
NIP. 19780525 199703 1 001

*) Angka sementara

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj) disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Tahun 2025 merupakan tahun terakhir dari periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2021-2026 dan tahun pertama dari RPJMD 2025-2029. Pada RPJMD 2021-2026 pembangunan kelautan dan perikanan terkait pada Misi 3 (tiga) *“Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan”*. Misi Kepala Daerah ini diterjemahkan kedalam program dan kegiatan yang tertuang didalam RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulteng 2021-2026. Pada RPJMD 2025-2029 pembangunan kelautan dan perikanan terkait pada Misi 2 (dua) *“Mewujudkan Masyarakat Bahagia dan Produktif melalui Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan”* dan juga Misi 3 *“Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Berorientasi pada Konektivitas Antar Wilayah dan Antar*

Sektor”. Misi Kepala Daerah ini diterjemahkan kedalam program dan kegiatan yang tertuang didalam RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulteng 2025-2029.

Untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan terlaksana dengan baik sesuai dengan waktu dan sasarannya maka telah disepakati Perjanjian Kinerja antara Gubernur dan Pejabat Eselon II dalam hal ini Kepala DKP Sulteng. Kemudian pelaksanaan capaian kinerja DKP Sulteng dilaporkan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) setiap tahunnya dengan cara pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

Guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan perikanan dan kelautan, maka DKP Sulteng pada tahun 2025 didukung oleh potensi sumber daya manusia (SDM) sebanyak 344 orang personel yang terdiri dari PNS 174 orang dan PPPK 170 orang. Jumlah ini meningkat dari tahun 2024 yang berjumlah 214 orang yakni PNS berjumlah 137 orang dan PPPK 77 orang. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya pengangkatan PPPK pada tahun 2025. Berikut rekap pegawai DKP Sulteng berdasarkan jabatan dan jenis kelamin.

Tabel 1. Pegawai DKP Sulteng per 31 Desember 2025

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Struktural	22	10	32
2	Fungsional	9	4	13
3	Pelaksana	153	146	299
TOTAL		184	160	344

Selain SDM, DKP Sulteng juga didukung oleh sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan efisien. Berikut disajikan rincian aset tetap DKP Sulteng per 31 Desember 2025.

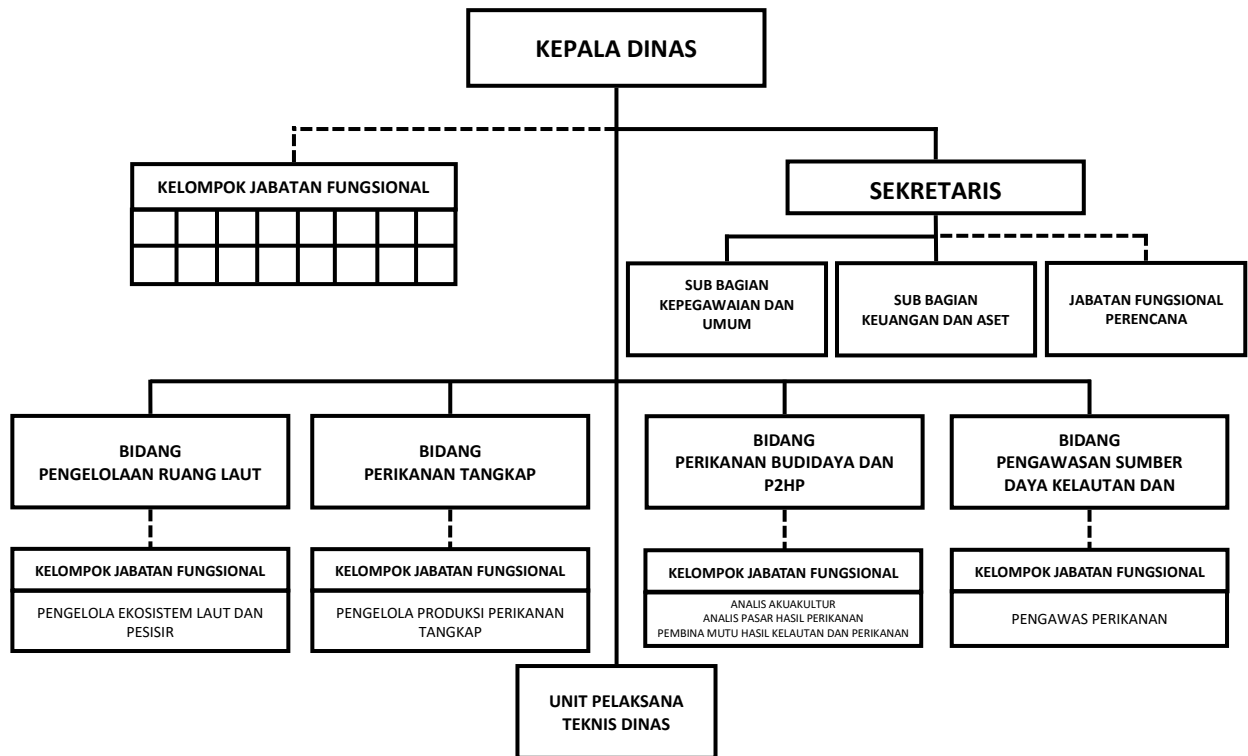
Tabel 2. Aset Tetap Per 31 Desember 2025

No	Uraian	Nilai (Rp.)	Keterangan
1	Tanah	35.108.468.080,00	Bahwa asset tersebut berada pada kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Jl. Undata No. 7 Palu dan UPTD Lingkup DKP Sulteng
2	Peralatan dan Mesin	55.397.823.002,00	
3	Gedung dan Bangunan	100.887.198.091,42	
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	59.904.437.161,24	
5	Aset tetap lainnya	1.139.821.321,00	
6	Konstruksi dalam pengerjaan	1.526.101.616,00	
7	Akumulasi penyusutan	-69.256.579.368,80	
JUMLAH		184.707.269.902,86	

Sumber : Subbagian Keuangan dan Asset DKP Sulteng (2025)

1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

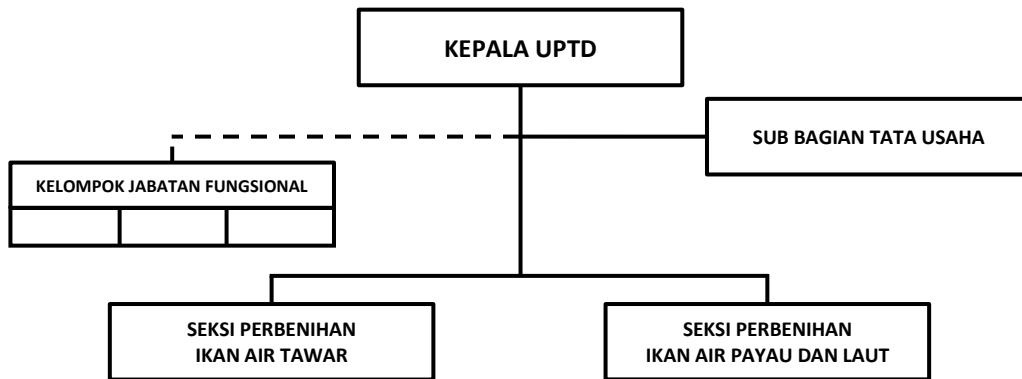
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Pada tahun 2016 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas. Berikut Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.



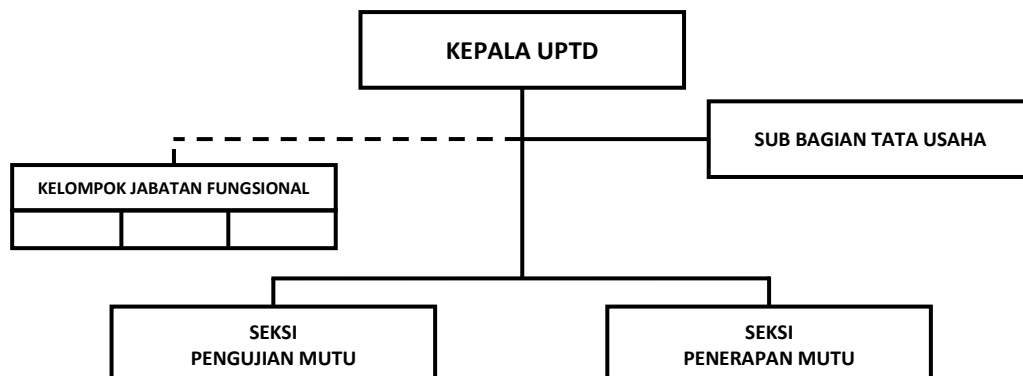
Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi DKP Provinsi Sulawesi Tengah

Sesuai Peraturan Gubernur nomor 26 tahun 2023 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas, terdapat 9 (sembilan) UPTD lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu UPTD Balai Perbenihan Perikanan, UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP), UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah I (PPKKP3K Wil. I), UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah II (PPKKP3K Wil. II), UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah III (PPKKP3K Wil. III), UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah IV (PPKKP3K Wil. IV), UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah V (PPKKP3K Wil. V), UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VI (PPKKP3K Wil. VI) dan UPTD Pelabuhan

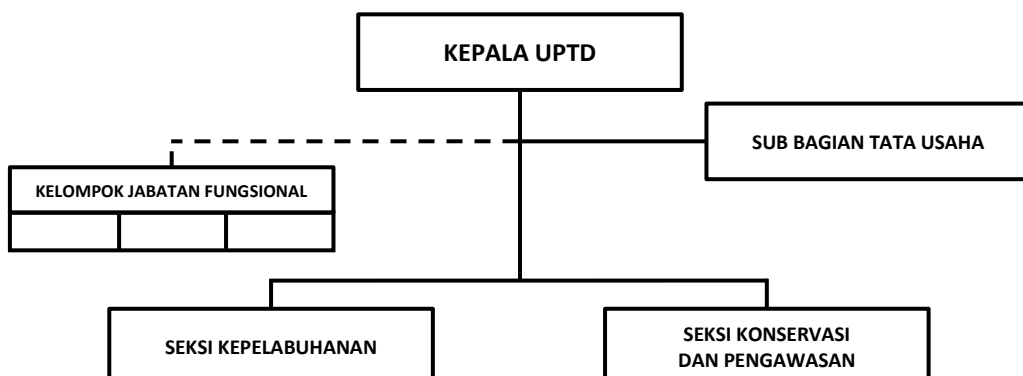
Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VII (PPKKP3K Wil. VII).



Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Perbenihan Perikanan



Gambar 3. Struktur Organisasi UPTD PMHP



Gambar 4. Struktur Organisasi UPTD PPKKP3K Wilayah I hingga VII

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan bidang kelautan dan perikanan, DKP Sulteng berpedoman kepada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah; Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, DKP Sulteng mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang Pengelolaan Ruang Laut, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan P2HP dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Ruang Laut, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan P2HP dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Ruang Laut, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan P2HP dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas perikanan bidang Pengelolaan Ruang Laut, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan P2HP dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Rincian tugas pokok dan fungsi sekretariat, masing-masing bidang/UPT, subbagian, seksi, kelompok jabatan fungsional pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

A. Sekretariat

Tugas :

Melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, asset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas.

Fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, asset, kepegawaian dan umum;
2. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, asset, kepegawaian dan umum;
3. Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, asset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
4. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, asset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
5. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, asset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
6. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait sesuai tugas dan fungsinya.

a. Sub Bagian Keuangan dan Asset

Bertugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi pengelolaan keuangan dan asset.

Uraian Tugas :

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian keuangan dan aset;
2. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Pengelolaan keuangan dan aset;
3. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan asset dengan pihak dan unit kerja terkait;
4. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
5. Melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
6. Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, asset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;

7. Melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
8. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
9. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
11. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan aset serta Dinas.

b. Sub bagian Kepegawaian dan Umum

Bertugas melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat.

Uraian Tugas :

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
2. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;
3. Melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
4. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
5. Melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri dan SKP;
6. Melaksanakan pengelolaan persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan dan hukum;
7. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Peta Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan;

8. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimum;
9. Melaksanakan/ mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional;
10. Melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
11. Melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
12. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
14. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Dinas.

B. Bidang Pengelolaan Ruang Laut

Tugas :

Mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan Ruang Laut dan Konservasi Ruang Laut.

Fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan Ruang Laut dan Konservasi Ruang Laut;
2. pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan Ruang laut dan Konservasi Ruang Laut;

3. pengkoordinasian bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan Ruang Laut dan Konservasi Ruang Laut dengan pihak dan unit terkait;
4. pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan Ruang Laut dan Konservasi Ruang Laut;
5. pelaksanaan tugas teknis Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan Ruang Laut dan Konservasi Ruang Laut;
6. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas bidang pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan Ruang Laut dan Konservasi Ruang Laut;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
8. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Ruang Laut.

C. Bidang Perikanan Tangkap

Tugas :

Mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan fungsi Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap.

Fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap;
2. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap;

3. pengkoordinasian bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap dengan pihak dan unit terkait;
4. pelaksanaan pembinaan pembinaan/bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap;
5. pelaksanaan tugas teknis bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap;
6. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas Teknis bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap;
7. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
8. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perikanan Tangkap.

D. Bidang Perikanan Budidaya dan P2HP

Tugas :

Membantu kepala dinas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis dalam menyelenggarakan fungsi Pengelolaan Perikanan Budidaya, Logistik Hasil Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya, Logistik Hasil Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
2. pelaksanaan kebijakan bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya, Logistik Hasil Perikanan, pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

3. pengkoordinasian bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya, Logistik Hasil Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan pihak dan unit terkait;
4. pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya, Logistik Hasil Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
5. pelaksanaan tugas teknis bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya, Logistik Hasil Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
6. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya, Logistik Hasil Perikanan, pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
7. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
8. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perikanan Budidaya dan P2HP.

E. Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Tugas :

Membantu kepala dinas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis, dan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap menyelenggarakan fungsi Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut, Pengawasan Perikanan Budidaya, P2HP, dan Penanganan Pelanggaran.

Fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis bidang Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut, Pengawasan Perikanan Budidaya, P2HP, dan Penanganan Pelanggaran;
2. pelaksanaan kebijakan bidang Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut, Pengawasan Perikanan Budidaya, P2HP, dan Penanganan Pelanggaran;

3. pengkoordinasian bidang Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut, Pengawasan Perikanan Budidaya, P2HP, dan Penanganan Pelanggaran dengan pihak dan unit terkait;
4. pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan bidang Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut, Pengawasan Perikanan Budidaya, P2HP, dan Penanganan Pelanggaran;
5. pelaksanaan tugas teknis bidang Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut, Pengawasan Perikanan Budidaya, P2HP, dan Penanganan Pelanggaran;
6. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas bidang Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut, Pengawasan Perikanan Budidaya, P2HP, dan Penanganan Pelanggaran;
7. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
8. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan.

F. Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menurut jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diturunkan pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah.

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan
- 2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau

dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

- 3) Pemberian Penugasan kepada kelompok jabatan fungsional diatur oleh masing-masing Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja serta permasalahan yang dihadapi.
- 4) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: a. Ketua tim; dan b. Anggota tim.
- 5) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- 6) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

G. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

I. UPTD Balai Perbenihan Perikanan

Unit Pelaksana Teknis Balai Perbenihan Perikanan yang selanjutnya disebut UPT Balai Perbenihan Perikanan adalah unsur pelaksanaan operasional teknis perbenihan perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah. Urusan yang menjadi kewenangan UPT Balai Perbenihan Perikanan yakni menyelenggarakan perbenihan perikanan.

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang pada Dinas di bidang perbenihan perikanan.

Fungsi :

1. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPT Balai Perbenihan Perikanan;
2. Pelaksanaan pelayanan dan pengkajian teknologi di bidang perbenihan dan budidaya perikanan;
3. Pelaksanaan tugas teknis operasional/penunjang Dinas di bidang perbenihan perikanan; dan
4. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian pemanfaatan sarana dan prasarana perbenihan perikanan.

a. Kepala UPTD

Bertugas melakukan pembinaan teknis dan operasional, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan serta merumuskan kebijakan penyelenggaraan kegiatan di bidang perbenihan ikan air laut dan payau serta perbenihan ikan air tawar.

Fungsi:

1. Perumusan kebijakan dan pembinaan teknis operasional atas penyelenggaraan kegiatan perbenihan ikan air laut dan payau serta perbenihan ikan air tawar;
2. Pengendalian dan koordinasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Balai Perbenihan Perikanan;
3. Pembinaan pengelolaan ketatausahaan dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

b. Sub Bagian Tata Usaha

Bertugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha meliputi penyusunan

program, kepegawaian dan umum, keuangan, aset, perlengkapan serta pengelolaan naskah Dinas.

Uraian Tugas :

1. melaksanakan penyusunan program Sub Bagian Tata Usaha dan UPTD Balai Perbenihan Perikanan;
2. melaksanakan pengelolaan administrasi Sub Bagian Tata Usaha;
3. melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan sarana dan prasarana perbenihan perikanan;
4. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan UPTD Balai Perbenihan Perikanan;
5. melaksanakan publikasi data dan informasi UPTD Balai Perbenihan Perikanan;
6. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan aset meliputi penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
7. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan umum meliputi bahan pengusulan mutasi kepegawaian, pembuatan Karpeg, Kartu BPJS, Taspen, Karis/Karsu, menyusun DUK, Diklat, rumah tangga, kebersihan dan keamanan;
8. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dengan unit kerja terkait;
9. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan; dan
11. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPTD Balai Perbenihan Perikanan.

c. Seksi Perbenihan Ikan Air Tawar

Bertugas menyiapkan bahan dan data, melaksanakan pembinaan operasional, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, kajian teknologi dan tata laksana produksi serta bimbingan, penerapan teknologi anjuran di bidang perbenihan dan budidaya ikan air tawar.

Uraian tugas :

1. Melaksanakan penyusunan program Seksi Perbenihan Ikan Air Tawar;
2. Melaksanakan pengelolaan Perbenihan Ikan Air Tawar;
3. Melaksanakan identifikasi, administrasi inventarisasi Seksi dan pengembangan sarana prasarana perbenihan ikan air tawar;
4. Melaksanakan bimbingan teknis penerapan teknologi anjuran di bidang perbenihan dan budidaya ikan air tawar;
5. Melaksanakan kajian dan penerapan teknologi anjuran di bidang perbenihan ikan air tawar;
6. Melaksanakan pengelolaan induk unggul di bidang perbenihan ikan air tawar;
7. Melaksanakan produksi perbenihan pembudidayaan ikan air tawar;
8. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas Seksi Perbenihan Ikan Air Tawar dengan unit kerja terkait;
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan tata laksana produksi benih ikan air tawar;
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan; dan
11. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Perbenihan Ikan Air Tawar.

d. Seksi Perbenihan Ikan Air Payau dan Laut

Bertugas menyiapkan bahan dan data, melaksanakan pembinaan operasional, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, kajian teknologi dan tata laksana produksi serta bimbingan, penerapan teknologi anjuran di bidang perbenihan dan budidaya ikan air payau dan laut.

Uraian tugas :

1. melaksanakan penyusunan program Seksi Perbenihan Ikan Air Payau dan Laut;
2. melaksanakan pengelolaan administrasi Perbenihan Ikan Air Payau dan Laut;

3. melaksanakan identifikasi, inventarisasi Seksi dan pengembangan sarana prasarana perbenihan ikan air payau dan laut;
4. melaksanakan kajian teknologi perbenihan dan budidaya ikan air payau dan laut;
5. melaksanakan bimbingan teknis penerapan teknologi anjuran di bidang perbenihan dan budidaya ikan air payau dan laut;
6. melaksanakan penerapan teknologi anjuran di bidang perbenihan ikan air payau dan laut;
7. melaksanakan pengelolaan induk unggul serta produksi perbenihan dan budidaya ikan air payau dan laut;
8. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas Seksi Perbenihan Ikan Air Payau dan Laut dengan unit kerja terkait;
9. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan tata laksana produksi benih ikan air payau dan laut;
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan; dan
11. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Perbenihan Ikan Air Payau dan Laut.

II. UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP)

Unit Pelaksana Teknis Penerapan Mutu Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan adalah unsur pelaksanaan operasional teknis Penerapan Mutu Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Urusan yang menjadi kewenangan UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan yakni menyelenggarakan penerapan mutu hasil perikanan.

UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas sebagai unsur penunjang sebagian tugas teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pembinaan dan pengendalian mutu hasil perikanan.

Untuk Melaksanakan tugas tersebut UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang penerapan mutu hasil perikanan;
2. pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang penerapan mutu hasil perikanan;
3. pelaksanaan Pelayanan Tugas teknis administrasi ketatausahaan pada UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan; dan
4. melaksanakan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian pemanfaatan sarana dan prasarana penerapan mutu hasil perikanan.

a. Kepala UPTD

Bertugas melakukan pembinaan teknis dan operasional, mengkoordinasi dan melakukan pengawasan serta merumuskan kebijaksanaan penyelenggaraan kegiatan dibidang Penerapan Mutu Hasil Perikanan.

Fungsi:

1. Perumusan kebijakan dan pembinaan teknis operasional atas penyelenggaraan kegiatan di bidang Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
2. Melaksanakan koordinasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan;
3. Melaksanakan Pengelolaan ketatausahaan dan kelompok Jabatan Fungsional.

b. Sub Bagian Tata Usaha

Bertugas menyiapkan bahan dan data, melakukan pembinaan operasional, mengkoordinasikan serta menyelenggarakan kegiatan di bidang ketatausahaan yang meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, aset dan umum serta pengelolaan naskah Dinas.

Uraian Tugas :

1. melaksanakan penyusunan program;
2. melaksanakan pengelolaan administrasi Sub Bagian Tata Usaha;
3. melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan sarana prasarana penerapan mutu hasil perikanan;

4. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
5. melaksanakan publikasi data dan informasi UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
6. melaksanakan pengelolaan keuangan, aset dan penyusunan anggaran UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
7. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan umum meliputi bahan pengusulan mutasi kepegawaian, pembuatan KARPEG, Kartu BPJS, Taspen, Karis/Karsu, menyusun DUK, Rumah Tangga, Kebersihan dan Keamanan;
8. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dengan unit kerja terkait;
9. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan; dan
11. melaksanakan penyiapan bahan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan.

c. Seksi Pengujian Mutu

Bertugas menyiapkan bahan dan data penyelenggaraan kegiatan pengujian mutu.

Uraian Tugas :

1. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengujian Mutu;
2. melaksanakan pengelolaan administrasi, keuangan, aset dan penyusunan anggaran Seksi Pengujian Mutu;
3. melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan sarana dan prasarana Seksi Pengujian Mutu;
4. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengujian Mutu;
5. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan Seksi Pengujian Mutu;
6. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan; dan

7. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengujian Mutu.
8. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi sistem jaminan mutu unit pengolahan ikan dan usaha kecil menengah;
9. melaksanakan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta sertifikasi produk
10. melaksanakan monitoring bahan kimia berbahaya pada produk hasil perikanan;
11. melaksanakan penerapan mutu hasil perikanan, bahan baku dan bahan penolong lainnya;

d. Seksi Penerapan Mutu

Bertugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi kegiatan Seksi Penerapan Mutu.

Uraian tugas:

1. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penerapan Mutu;
2. melaksanakan pengelolaan administrasi, keuangan, aset dan penyusunan anggaran Seksi Penerapan Mutu;
3. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi sistem jaminan mutu unit pengolahan ikan dan usaha kecil menengah;
4. melaksanakan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta sertifikasi produk;
5. menyiapkan bahan laporan hasil penerapan mutu produk perikanan;
6. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan penerapan mutu dengan unit kerja terkait;
7. monitoring dan evaluasi hasil kegiatan penerapan mutu;
8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan; dan
9. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penerapan Mutu.
10. melaksanakan kajian teknologi pengolahan hasil perikanan;
11. melaksanakan pembinaan teknis penerapan teknologi produk olahan hasil perikanan;

12. melaksanakan pelayanan jasa produk olahan hasil perikanan bernilai tambah;

III. UPT PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH I - VII

UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah I - VII mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang pada Dinas di bidang pelabuhan perikanan dan kawasan konservasi pulau-pulau kecil pada wilayah I-VII.

Fungsi :

1. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPT Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah I - VII;
2. Pelaksanaan pelayanan, pengendalian tata kelola dan pemanfaatan pelabuhan perikanan serta kesyahbandaran di wilayah kerjanya;
3. Pelaksanaan pelayanan dan pengkajian teknologi di bidang konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
4. pelaksanaan tugas teknis operasional/penunjang Dinas di bidang pelabuhan perikanan dan dan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
5. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian pemanfaatan sarana dan prasarana di bidang pelabuhan perikanan dan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.

a. Kepala UPTD

Bertugas melaksanakan pembinaan teknis dan operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan pengawasan dan merumuskan kebijakan penyelenggaraan kegiatan di bidang dan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.

Fungsi:

1. perumusan kebijakan dan pembinaan teknis operasional atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan, tata operasional pelabuhan perikanan dan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
2. pengendalian dan koordinasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah I-VII;
3. pembinaan pengelolaan ketatausahaan dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
4. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

b. Sub Bagian Tata Usaha

Bertugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan perlengkapan aset dan umum serta pengelolaan naskah Dinas.

Uraian Tugas :

1. melaksanakan program;
2. melaksanakan pengelolaan administrasi UPTD Pelabuhan Perikanan Kawasan dan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah I-VII;
3. melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;
4. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah I-VII;
5. melaksanakan publikasi data dan informasi UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah I-VII;
6. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan aset meliputi penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
7. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan umum meliputi bahan pengusulan mutasi kepegawaian, pembuatan karpeg, kartu

BPJS, Taspen, Karis/Karsu, menyusun DUK, Diklat, rumah tangga, kebersihan dan keamanan;

8. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dengan unit kerja terkait;
9. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan; dan
11. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah I-VII.

c. Seksi Kepelabuhanan

Bertugas Melaksanakan pelayanan teknis operasional pelabuhan, pengembangan dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan.

Uraian Tugas :

1. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kepelabuhanan;
2. melaksanakan pengelolaan administrasi seksi Kepelabuhanan;
3. melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan sarana prasarana kesyahbandaran pelabuhan perikanan;
4. melaksanakan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
5. melaksanakan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan, keberangkatan kapal perikanan serta surat persetujuan berlayar;
6. melaksanakan inspeksi pembongkaran ikan, pemeriksaan dokumen aktifitas penangkapan ikan, dan pengawasan terhadap distribusi bahan bakar minyak di pelabuhan perikanan;
7. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa serta penyajian dan publikasi data produksi pendaratan ikan di pelabuhan perikanan;
8. melaksanakan kegiatan tata kelola dan pelayanan usaha di bidang kepelabuhanan perikanan;
9. melakukan monitoring dan evaluasi serta bimbingan teknis kegiatan operasional, pengembangan dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan;

10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan; dan
11. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kepelabuhanan.

d. Seksi Konservasi dan Pengawasan

Bertugas Melaksanakan pelayanan teknis operasional konservasi kawasan dan pulau-pulau kecil.

Uraian Tugas :

1. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Konservasi dan Pengawasan;
2. melaksanakan pengelolaan Administrasi Seksi Konservasi dan Pengawasan;
3. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di Seksi Konservasi;
4. melakukan koordinasi teknis pelaksanaan pelayanan perizinan di kawasan konservasi;
5. melaksanakan bimbingan, pembinaan dan pengembangan kegiatan konservasi;
6. melaksanakan rehabilitasi ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan mangrove;
7. melaksanakan perlindungan dan penangkaran terhadap ikan dan ataupun biota perairan yang langka, endemic, terancam punah, dan/atau dilindungi;
8. melaksanakan kegiatan pencadangan kawasan konservasi;
9. melaksanakan penyiapan dan pengolahan data statistik ekosistem terumbu karang, padang lamun, mangrove serta jenis dan jumlah biota, kawasan ekosistem bahari serta sumber ekonomi alternatif di area pengelolaan kawasan konservasi, serta penyusunan data series kawasan;
10. melakukan identifikasi, monitoring, pembinaan dan evaluasi kawasan konservasi;
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan; dan

1. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Konservasi dan Pengawasan.

1.3 ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan pelayanan-pelayanan tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan menghadapi berbagai dinamika permasalahan yang timbul. Permasalahan utama yang sering dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah antara lain:

Tabel 3. Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumberdaya kelautan perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya maupun sumberdaya lautnya yang besar	Kualitas SDM Pelaku usaha kelautan perikanan yang relatif rendah;	Peningkatan kualitas daya saing SDM, dan peningkatan layanan serta infrastruktur pendidikan dan kesehatan (transformasi sosial).	Perkembangan demografi global	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Belum optimalnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja salah satunya karena <i>mismatch</i> antara tenaga kerja dan lapangan pekerjaan;	Kualitas Sumberdaya Manusia
	Kurang optimalnya fungsi Kelembagaan Pelaku Usaha;	Peningkatan kualitas dan daya saing sektor unggulan daerah, serta infrastruktur penghubung antar wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian fiskal (transformasi ekonomi).	Geo politik dan Geo ekonomi	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berilmalitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Ikatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Masih tingginya tingkat kemiskinan dimana struktur tenaga kerja masih didominasi pada sektor pertanian dan menyumbang tingkat kemiskinan;	Daya saing sub sektor kelautan dan perikanan
	Penggunaan teknologi yang masih sederhana dan tradisional		Perkembangan Teknologi	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Tingginya ketimpangan antar kelompok dan wilayah akibat belum meratanya infrastruktur daerah	
	Terbatasnya sarana prasarana dan		Peningkatan Persaingan Pemanfaatan Sumber	Perpindahan Ibu Kota Negara	Masih tingginya kerentanan dan potensi	

Laporan Kinerja Perangkat Daerah 2025

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD (1)	Permasalahan PD (2)	Isu KLHS yang Relevan dengan PD (3)	Isu Lingkungan yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD (7)
			Global (4)	Nasional (5)	Regional (6)	
	infrastruktur kelautan perikanan yang memadai		Daya Alam		bencana alam (gempa, tsunami, banjir dan likuifaksi)	
	Sistem Pendataan dan Informasi yang belum terintegrasi		Perubahan Iklim	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Tingginya ketimpangan antar kelompok dan wilayah akibat belum meratanya infrastruktur daerah;	
	sulitnya akses terhadap induk, benih dan pakan murah berkualitas			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Sistem pendataan dan akses informasi yang masih terbatas	
	Keterbatasan BBM bersubsidi dan es					
	Penanganan Ikan di atas kapal dan pasca panen yang masih konvensional					
	Terbatasnya akses pemasaran dan permodalan bagi pelaku usaha kelautan perikanan					
	Masih maraknya IUU Fishing	Peningkatan ketahanan ekologi, mitigasi dan kemampuan adaptasi terhadap bencana dan				Pengawasan SDKP dan Ancaman degradasi lingkungan

Laporan Kinerja Perangkat Daerah 2025

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD (1)	Permasalahan PD (2)	Isu KLHS yang Relevan dengan PD (3)	Isu Lingkungan yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD (7)
			Global (4)	Nasional (5)	Regional (6)	
		perubahan iklim				
	Upaya rehabilitasi dan laju kerusakan kawasan yang tidak seimbang					
	Daya S					
	Regulasi yang berubah-ubah	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan				Inkonsistensi Regulasi
	Tata Kelola Pemerintahan yang belum optimal					

1.4 TINDAK LANJUT LHE AKIP

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, review dan evaluasi kinerja.

Penilaian terhadap implementasi SAKIP dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Tahun 2024 penilaian SAKIP DKP Sulteng diperoleh nilai 83,40 dari nilai maksimum 100,00 atau mendapat predikat A (interpretasi memuaskan) yang merupakan gambaran bahwa DKP Sulteng dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah sampai pada level eselon 4/pengawas/subkoordinator. Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi SAKIP tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian
1	Melengkapi dokumen yang menunjukkan perbaikan/penyempurnaan (Dokumen Tindak Lanjut, Laporan Hasil Monev).	Menyusun dokumen Tindak Lanjut, Laporan Hasil Monev	Dokumen Pengukuran Kinerja Pertriwulan	Setiap triwulan berjalan	Tiap Bagian/ Bidang / UPT, Sekretaris	https://drive.google.com/drive/folders/1VsFzkUucqU0w4NiSbpcDrYElY_FV_2D?usp=drive_link
2	Mempublikasikan dokumen RENSTRA, RENJA dan PK agar tepat waktu.	Mempublikasikan dokumen RENSTRA, RENJA dan PK di web Dinas	Terpublikasi dokumen RENSTRA, RENJA dan PK di web dinas	1 tahun	Sekretaris/ Sub kepegawaian dan umum/ fungsional perencanaan	https://drive.google.com/drive/folders/1VsFzkUucqU0w4NiSbpcDrYElY_FV_2D?usp=drive_link
3	Menyusun laporan kinerja secara berkala per triwulan (3 bulan), dan lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas realisasi rencana aksi kinerja agar diketahui progress capaiannya dan ditindak lanjuti.	Menyusun dokumen Tindak Lanjut, Laporan Hasil Monev	Dokumen Pengukuran Kinerja Pertriwulan	Setiap triwulan berjalan	Tiap Bagian/ Bidang / UPT, Sekretaris, Sub Bagian Program	https://drive.google.com/drive/folders/1VsFzkUucqU0w4NiSbpcDrYElY_FV_2D?usp=drive_link
4	Memfaatkan teknologi informasi/aplikasi dalam pengukuran kinerja.	Melaporkan capaian kinerja pada aplikasi saliera.sultengprov.go.id	Terlapornya capaian kinerja pada aplikasi saliera.sultengprov.go.id	Setiap triwulan berjalan	Tiap Bagian/ Bidang / UPT, Sekretaris, Sub Bagian Program	https://drive.google.com/drive/folders/1VsFzkUucqU0w4NiSbpcDrYElY_FV_2D?usp=drive_link
5	Lakukan sosialisasi tentang pengukuran kinerja individu kepada seluruh pegawai.	mensosialisasikan pengukuran kinerja individu kepada seluruh pegawai.	Kegiatan sosialisasi	1 Minggu	Sekretaris/ Sub kepegawaian dan umum/ fungsional perencanaan	https://drive.google.com/drive/folders/1VsFzkUucqU0w4NiSbpcDrYElY_FV_2D?usp=drive_link
6	Lengkapi setiap kegiatan rapat atau pertemuan dengan notulen rapat, daftar hadir dan dokumentasi yang mengungkapkan keterlibatan pimpinan.	membuat notulen rapat, daftar hadir dan dokumentasi yang mengungkapkan keterlibatan pimpinan	Dokumen notulen rapat, daftar hadir dan dokumentasi yang mengungkapkan keterlibatan pimpinan	Setiap rapat dan pertemuan	Tiap Bagian/ Bidang / UPT, Sekretaris	https://drive.google.com/drive/folders/1VsFzkUucqU0w4NiSbpcDrYElY_FV_2D?usp=drive_link
7	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh pegawai yang memiliki kompetensi dan pernah mengikuti sosialisasi/diklat mengenai pengukuran dan pengumpulan realisasi data kinerja, pegawai eselon 2 dan 3 terlibat dalam pelaksanaan monev dengan bukti tandatangan pada monev.	Melakukan pengukuran dan pengumpulan realisasi data kinerja	Dokumen Pengukuran Kinerja Pertriwulan	Setiap triwulan berjalan	Tiap Bagian/ Bidang / UPT, Sekretaris	https://drive.google.com/drive/folders/1VsFzkUucqU0w4NiSbpcDrYElY_FV_2D?usp=drive_link
8	Membuat Berita Acara Hasil monev rencana aksi dan capaian kinerja pertriwulan dan ditandatangani oleh masing- masing kepala bidang dan seluruh pegawai.	Membuat Berita Acara Hasil monev rencana aksi dan capaian kinerja pertriwulan	Dokumen berita acara Pengukuran Kinerja Pertriwulan	Setiap triwulan berjalan	Tiap Bagian/ Bidang / UPT, Sekretaris	https://drive.google.com/drive/folders/1VsFzkUucqU0w4NiSbpcDrYElY_FV_2D?usp=drive_link
9	Lakukan tindak lanjut atas seluruh Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023.	menindak lanjuti atas seluruh Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	hasil tindak lanjut	Setiap triwulan berjalan	Tiap Bagian/ Bidang / UPT, Sekretaris	https://drive.google.com/drive/folders/1VsFzkUucqU0w4NiSbpcDrYElY_FV_2D?usp=drive_link

		Tahun 2023.				link
10	Manfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dalam pengukuran capaian kinerja dan dalam mengevaluasi kinerja internal Perangkat Daerah.	Melaporkan capaian kinerja pada aplikasi saliara.sultengprov.go.id	Terlapornya capaian kinerja pada aplikasi saliara.sultengprov.go.id	Setiap triwulan berjalan	Tiap Bagian/ Bidang / UPT, Sekretaris	https://drive.google.com/drive/folders/1VsFzkUucqU0w4NiSbpcDrYElhY_FV_2D?usp=drive_link
11	Manfaatkan hasil evaluasi kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan untuk mendukung efektifitas dan efisiensi	menindaklanjuti hasil evaluasi internal	meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1 tahun	Sekretaris/ Sub kepegawaian dan umum/ fungsional perencanaan	https://drive.google.com/drive/folders/1VsFzkUucqU0w4NiSbpcDrYElhY_FV_2D?usp=drive_link

Dari 11 (sebelas) rencana aksi tindak lanjut LHE tahun 2024, sebanyak 8 (delapan) rencana aksi yang sedang dilaksanakan, yakni (1) Melengkapi dokumen yang menunjukkan perbaikan/penyempurnaan (Dokumen Tindak Lanjut, Laporan Hasil Monev), (2) Mempublikasikan dokumen RENSTRA, RENJA dan PK agar tepat waktu, (3) Menyusun laporan kinerja secara berkala per triwulan (3 bulan), dan lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas realisasi rencana aksi kinerja agar diketahui progress capaiannya dan ditindak lanjuti, (4) Memanfaatkan teknologi informasi/aplikasi dalam pengukuran kinerja, (5) Lengkapi setiap kegiatan rapat atau pertemuan dengan notulen rapat, daftar hadir dan dokumentasi yang mengungkapkan keterlibatan pimpinan, (6) Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh pegawai yang memiliki kompetensi dan pernah mengikuti sosialisasi/diklat mengenai pengukuran dan pengumpulan realisasi data kinerja, pegawai eselon 2 dan 3 terlibat dalam pelaksanaan monev dengan bukti tandatangan pada monev, (7) Lakukan tindak lanjut atas seluruh Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023, dan (8) Manfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dalam pengukuran capaian kinerja dan dalam mengevaluasi kinerja internal Perangkat Daerah. Terdapat 3 (tiga) rencana aksi yang masih akan dilaksanakan, yakni (1) Lakukan sosialisasi tentang pengukuran kinerja individu kepada seluruh pegawai, (2) membuat berita acara hasil monev rencana aksi dan capaian kinerja per triwulan dan ditandatangani oleh masing-masing kepala bidang dan seluruh pegawai,

dan (3) Manfaatkan hasil evaluasi kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan untuk mendukung efektifitas dan efisiensi.

Bukti-bukti hasil tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2024 terdapat pada lampiran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Sulawesi Tengah bertujuan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan sumberdaya alam. Mengingat panjang garis pantai Sulawesi Tengah sepanjang kurang lebih 7.101,6 Km, luas perairan kurang lebih 74.452,37 Km², luas laut territorial kurang lebih 193.923,75 Km², dan merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki 4 (empat) wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) serta sumberdaya laut yang melimpah, sektor kelautan dan perikanan memegang peranan penting dalam mendukung perekonomian daerah khususnya bagi masyarakat kelautan dan perikanan. Ditengah pembangunan global dan nasional yang bergerak cepat dan dinamis, pembangunan kelautan dan perikananpun dituntut untuk dapat melakukan percepatan agar dapat memenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak secara cepat. Penyusunan rencana strategis DKP Sulteng disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan agar dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

A. Renstra 2021-2026

Tujuan :

**“Peningkatan PDRB dan Penurunan Jumlah
Tangga Rumah Miskin Kelautan dan Perikanan
Berdasarkan Pengelolaan SDKP yang Berkeadilan dan
Berkelanjutan”**

Untuk mewujudkan tujuan DKP Sulteng, maka sasaran yang dicapai adalah:

1. Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
2. Meningkatnya angka konsumsi ikan;
3. Terwujudnya kawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Strategi DKP Sulteng untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi dan produktifitas produk kelautan dan perikanan;
2. Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
3. Menjaga kualitas produk melalui keamanan pangan;
4. Tata kelola dan pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. Rehabilitasi dan konservasi wilayah laut dan pesisir dan pulau-pulau kecil;
6. Mitigasi bencana pengawsan sumberdaya kelautan dan perikanan terintegrasi.

Arah kebijakan DKP Sulteng untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Penyediaan inovasi teknologi guna peningkatan kualitas, kuantitas dan keberlanjutan produk kelautan dan perikanan;
2. Peningkatan pemberayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
3. Peningkatan upaya perlindungan pelaku usaha perikanan;
4. Penataan ruang dan konservasi sumber daya hayati laut (SDHL) diantaranya melalui perbaikan regulasi; dan
5. Peningkatan pengawsan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Tabel 5. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DKP Sulteng
Renstra 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Peningkatan PDRB dan Penurunan Jumlah Rumah Tangga Miskin Kelautan dan Perikanan Berbasis Pengelolaan Sdkp yang Berkeadilan dan Berkelanjutan		Kontribusi PDRB Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB Sulawesi Tengah	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6
			Penurunan Jumlah Rumah Tangga Miskin Kelautan dan Perikanan (%)		2	3	4	6	8
		Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Nilai Tukar Perikanan	99	100	100.8	103,86	103.9	103,93
		Meningkatnya angka konsumsi ikan	Angka Konsumsi Ikan (Kg/kap/Th)	53,83	55,39	57,05	72,40	73	73,4
		Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhaap Total Luas Perairan Teritorial	-	-	-	0.1847	0,1866	0,1884
			Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Peraturann Perundang-undangan (%)	-	-	-	83,98	85,98	87,98

B. Renstra 2025-2029

Tujuan :

“Meningkatkan PDRB, Produktivitas Ekonomi Daerah dan kualitas Pemanfaatan Ruang Sektor Kelautan Perikanan”

Untuk mewujudkan tujuan DKP Sulteng, maka sasaran yang dicapai adalah:

1. Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
2. Terwujudnya Pengelolaan Kawasan SDKP yang berkelanjutan;
3. Terselenggaranya Pengawasan SDKP berdasarkan regulasi yang berlaku;

Arah kebijakan DKP Sulteng untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Promosi Produk Unggulan/ Inovasi Daerah di tingkat provinsi dan nasional;
2. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha;
3. Peningkatan sarana prasarana infrastruktur dan inovasi peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk KP;
4. Penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Masyarakat Pesisir;
5. Peningkatan kualitas pelayanan pada objek-objek dinas;
6. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan;
7. Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan dalam rangka Implementasi Ekonomi Biru: Optimalisasi sarana prasarana dan infrastruktur pendukung kelautan perikanan, pengembangan inovasi dan teknologi;
8. Pengembangan infrastruktur pendukung Cold Chain System;
9. Pengembangan kawasan perikanan dan hilirisasi Tongkol, Cakalang, Tuna (TCT);
10. Pengembangan kawasan sentra hilirisasi rumput laut;
11. Pengembangan kawasan sentra garam;

12. Pendampingan dan Pengembangan Koperasi Merah Putih sektor Kelautan dan Perikanan;
13. Peningkatan pendapatan pelaku usaha miskin ekstrem sesuai DTSEN;
14. Pengelolaan sampah laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
15. Sosialisasi, peningkatan kapasitas dan jejaring mitra kelautan dan perikanan;
16. Pengelolaan, Rehabilitasi dan Pengawasan Ekosistem;
17. Perencanaan ruang laut dan zonasi pesisir serta pengendalian pemanfaatan ruang laut.

Tabel 6. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DKP Sulteng
Renstra 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan Daerah	<i>Meningkatkan PDRB, Produktivitas Ekonomi Daerah dan kualitas pemanfaatan ruang sektor KP</i>		Nilai Kontribusi PDRB Kelautan dan Perikanan (Rp. Milyar)	11.295,15	11.746,96	12.216,83	12.705,51	13.213,73	13.742,28	
		Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Nilai Tukar Nelayan	101,05	101,86	102,67	103,49	104,32	105,16	
			Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	101,03	101,54	102,04	102,55	103,07	103,58	
			Angka Konsumsi Ikan (kg/perkapita/tahun)	40,65	43,4	44,5	45,6	46,7	47,6	
Meningkatnya Daya Saing Daerah dan Produktivitas Ekonomi Daerah			Indeks Ekonomi Biru (%)	49,15	50,5	51,85	53,2	54,55	55,9	
		Terwujudnya Pengelolaan Kawasan SDKP yang berkelanjutan	Rasio Pemanfaatan Kawasan Perairan terhadap total kawasan perairan territorial	0,1803	0,1804	0,1806	0,1808	0,1810	0,1812	
Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Ruang			Peresentase Ketaatan RTRW (%)	77,72	78	79	80	81	82	
		Terselenggaranya Pengawasan SDKP berdasarkan regulasi yang berlaku	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap Peraturan Per UU	82	83	84	85	86	87	

2.2 STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Renstra 2021-2026

Rencana Strategis DKP Sulteng tahun 2021-2026 bertujuan: (1) peningkatan kapasitas sumber daya manusia (2) peningkatan kontribusi bidang Kelautan dan Perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan pengurangan angka kemiskinan (3) peningkatan hasil produksi dan jumlah pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan serta pemenuhan gizi untuk mencerdaskan masyarakat, dan peningkatan kualitas serta pengawasan sumber daya alam yang mensinergi serta mensinkronisasi arah perencanaan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dokumen perencanaan lainnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah.

Rencana program dan kegiatan DKP Sulteng juga disusun dalam rangka pengentasan kemiskinan di Sulawesi Tengah dengan basis data P3KE (Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim). Jumlah penduduk miskin Sulawesi Tengah subsektor kelautan dan perikanan berdasarkan data P3KE berjumlah 26.927 Kepala Keluarga (KK) dimana 7.899 KK masuk dalam kemiskinan ekstrim.

Selain itu perencanaan program dan kegiatan subsektor kelautan dan perikanan terkait dengan Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang yaitu **Pengarusutamaan Berbasis Gender (PUG) dan Penurunan Stunting**. PUG di DKP dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Strategi yang dilakukan antara lain melalui (a) penerapan perencanaan dan penganggaran *responsive gender* (PPRG), (b) Penguatan kelembagaan PUG di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, (c) penyiapan *roadmap* PUG, (d) penyusunan data terpilih, (e) pengembangan statistik gender, (f) pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi antar unit dan UPTD. Kemudian PUG ditranformasi

kedalam program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.

Rencana Program dan Kegiatan

Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

1. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 Mil di luar minyak dan gas bumi;
2. Penerbitan izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 Mil di luar minyak dan gas bumi;
3. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Program pengelolaan perikanan tangkap

kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

1. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 Mil;
2. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT;
3. Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

1. Pengelolaan pembudidayaan ikan di laut.
2. Pengelolaan pembudidayaan ikan di perairan darat.

Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

kegiatan yang dilaksanakan adalah:

1. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai dengan 12 mil
2. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (Satu) daerah provinsi.

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

1. Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (Satu) daerah provinsi
2. Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar
3. Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

Struktur program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 7. Struktur Program dan Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026

N o.	Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang
PROGRAM TEKNIS					
BIDANG PENGELOLAAN RUANG LAUT					
1	Terwujudnya kawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Program Pengelolaan Ruang Laut	6.140.798.575,00	1.878.064.650,00	-
		Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	5.685.207.675,00	1.550.515.000,00	-
		Keg. Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	219.535.000,00	91.493.750,00	-
		Keg. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	236.055.900,00	236.055.900,00	-
BIDANG PERIKANAN TANGKAP					
2	Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	33.984.963.700,00	9.949.714.600,00	-
		Keg. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	7.812.839.700,00	8.781.981.600,00	+
		Keg. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	172.124.000,00	467.733.000,00	+
		Keg. Penetapan lokasi pembanguna serta pengolahan pelabuhan perikanan Provinsi	26.000.000.000,00	700.000.000,00	-
BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA & P2HP					
3	Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	12.540.594.642,00	3.435.266.602,00	-
		Keg. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	1.612.740.500,00	911.088.650,00	-
		Keg. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Darat	10.927.854.142,00	2.524.177.952,00	-
4	Meningkatnya angka konsumsi ikan	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.558.726.685,00	1.779.298.748,00	+
		Keg. Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)	147.696.000,00	54.904.500,00	-

		Daerah Provinsi			
		Keg. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	829.180.000,00	1.023.886.943,00	+
		Keg. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	581.850.685,00	700.507.305,00	+
BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					
5	Terwujudnya kawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	7.428.040.900,00	3.021.340.300,09	-
		Keg. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	7.312.258.900,00	2.944.514.300,09	-
		Keg. Pengawasan Sumber Perikanan di wilayah sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	115.782.000,00	76.826.000,00	-
UPTD BALAI PERBENIHAN PERIKANAN					
	Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	739.146.000,00	1.058.335.000,00	+
		Keg. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	739.146.000,00	1.058.335.000,00	+
UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN					
	Meningkatnya angka konsumsi ikan	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	284.806.812,00	239.525.535,00	-
		Keg. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	284.806.812,00	239.525.535,00	-
UPTD PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH I					
	Terwujudnya kawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Program Pengelolaan Ruang Laut	51.805.400,00	25.812.750,00	-
		Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	51.805.400,00	25.812.750,00	-
	Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	178.477.200,00	380.911.100,00	-
		Keg. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	178.477.200,00	380.911.100,00	-
UPTD PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH II					
	Terwujudnya kawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Program Pengelolaan Ruang Laut	108.075.750,00	157.729.000,00	+
		Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	108.075.750,00	157.729.000,00	+
	Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	118.576.400,00	33.997.400,00	-
		Keg. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	118.576.400,00	33.997.400,00	-
UPTD PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH III					
	Terwujudnya kawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Program Pengelolaan Ruang Laut	37.656.800,00	24.663.800,00	-
		Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	37.656.800,00	24.663.800,00	-
	Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	116.988.000,00	160.308.388,00	+
		Keg. Penetapan Lokasi Pembangunan	116.988.000,00	160.308.388,00	+

		serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi			
UPTD PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH IV					
	Terwujudnya kawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Program Pengelolaan Ruang Laut	73.629.500,00	49.814.750,00	-
		Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	73.629.500,00	49.814.750,00	-
	Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	236.762.500,00	254.181.156,00	+
		Keg. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	236.762.500,00	254.181.156,00	+
UPTD PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH V					
	Terwujudnya kawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Program Pengelolaan Ruang Laut	20.760.000,00	19.670.000,00	-
		Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	20.760.000,00	19.670.000,00	-
	Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	17.940.000,00	8.970.000,00	-
		Keg. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	17.940.000,00	8.970.000,00	-
UPTD PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH VI					
	Terwujudnya kawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Program Pengelolaan Ruang Laut	135.948.000,00	169.315.300,00	-
		Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	135.948.000,00	169.315.300,00	-
	Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	88.436.000,00	76.475.000,00	-
		Keg. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	88.436.000,00	76.475.000,00	-
UPTD PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH VII					
	Terwujudnya kawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Program Pengelolaan Ruang Laut	100.000.000,00	106.250.000,00	-
		Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	100.000.000,00	106.250.000,00	-
	Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	100.000.000,00	64.124.000,00	-
		Keg. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	100.000.000,00	64.124.000,00	-
PROGRAM PENUNJANG SEKRETARIAT					
		Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	28.292.941.696,30	26.570.608.912,27	-
		Keg. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	686.300.000,00	298.315.750,00	-
		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.539.223.605,30	23.292.512.145,06	-
		Keg. Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	134.585.000,00	55.377.500,00	-
		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	275.423.325,00	1.024.678.988,21	+
		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.690.995.956,00	1.295.346.424,00	-
		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	966.413.810,00	604.378.105,00	-

UPTD BALAI PERBENIHAN PERIKANAN					
		Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	1.330.854.000,00	129.1884.258,48	-
		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	76.800.000,00	74.120.000,00	-
		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.953.880,00	60.470.529,48	+
		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.104.580.120,00	1.028.996.132,00	-
		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.520.000,00	128.297.597,00	+
UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN					
		Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	615.186.324,00	477.274.700,00	-
		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	53.100.000,00	63.720.000,00	+
		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.723.590,00	15.754.750,00	-
		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	464.823.034,00	336.084.250,00	-
		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.539.700,00	61.715.700,00	-
UPTD PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH I					
		Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	1.209.717.400,00	978.811.980,00	-
		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	92.128.600,00	48.613.800,00	+
		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	21.273.500,00	63.356.040,00	+
		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.030.305.300,00	790.972.140,00	-
		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.010.000,00	75.870.000,00	+
UPTD PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH II					
		Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	1.213.347.850,00	1.088.437.456,00	-
		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	73.810.000,00	73.810.000,00	-
		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	89.848.650,00	72.191.950,00	-
		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	814.011.832,00	687.841.743,00	-
		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235.677.368,00	254.593.763,00	+
UPTD PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH III					
		Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	1.015.355.484,00	887.641.018,40	-
		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	68.640.000,00	22.920.000,00	-
		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	46.806.678,00	92.364.429,00	+
		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	791.604.256,00	653.340.644,40	-
		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.304.550,00	119.015.945,00	+
UPTD PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH IV					
		Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	520.531.335,00	481.864.780,00	-
		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	93.610.000,00	82.915.000,00	-
		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	61.563.975,00	44.065.450,00	-
		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	301.695.360,00	316.839.680,00	+
		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.662.000,00	38.044.650,00	-
UPTD PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH V					
		Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	1.086.300.000,00	1.068.622.600,00	-
		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	82.760.000,00	64.560.000,00	-
		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.800.000,00	39.105.200,00	+
		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang	899.290.000,00	762.175.800,00	-

		Urusan Pemerintahan Daerah			
		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.450.000,00	202.781.600,00	+
UPTD PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH VI					
		Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	795.616.000,00	715.146.125,00	-
		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90.550.000,00	104.340.000,00	+
		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	150.001.390,00	196.650.615,00	+
		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	514.424.610,00	378.933.510,00	-
		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.640.000,00	35.222.000,00	-
UPTD PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH VII					
		Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	250.000.000,00	186.790.480,00	-
		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50.000.000,00	33.736.765,00	-
		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	19.200.000,00	9.181.525,00	-
		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.800.000,00	8.268.2190,00	-
		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.000.000,00	61.190.000,00	-
		T O T A L	90.593.977.060,30	56.640.850.389,24	-

B. Renstra 2025-2029

Rencana Strategis DKP Sulteng tahun 2025-2029 bertujuan: (1) Peningkatan PDRB (2) Peningkatan Produktifitas Ekonomi sub sektor kelautan dan perikanan, serta (3) peningkatan kualitas pemanfaatan ruang subsektor kelautan dan perikanan serta pengawasan sumber daya alam yang mensinergi serta mensinkronisasi arah perencanaan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dokumen perencanaan lainnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah diarahkan sesuai dengan Kebijakan Pusat, Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029 dan Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, dimana terdapat beberapa program yang diharapkan dapat menjadi unggulan Sulawesi Tengah di tahun-tahun mendatang dengan pengembangan komoditas kelautan dan perikanan terbagi atas (A) Komoditas Industrialisasi: (1) Rumput Laut : (a) *Euchema cottonii*, (b) *Gracillaria sp*, (2) Tuna, Tongkol, Cakalang, (3) Udang, (4) Ikan Demersal, (5) Sidat, (6) Teripang, (7) Garam

dan (B) Komoditas Ketahanan Pangan antara lain (1) Lele, (2) Nila, (3) Mas, (4) Pelagis Kecil.

Program-program yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan diarahkan pula dalam mendukung Ekonomi Biru untuk Indonesia Emas, yaitu : (1) Memperluas kawasan konservasi laut; (2) Penangkapan ikan terukur berbasis kuota; (3) Pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan; (4) Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan (5) Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan, dimana semua itu bertujuan untuk memperluas perlindungan, mengurangi tekanan/dampak negatif kegiatan manusia, melestarikan dan menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan layanan ekosistemnya dan serapan karbon.

Rencana Strategis DKP Sulteng tahun 2025-2029 disusun dalam rangka peningkatan PDRB subsektor kelautan dan perikanan, peningkatan produktivitas ekonomi sektoral melalui penerapan ekonomi biru, peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan termasuk mendukung program pemerintah daerah dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan melalui Peningkatan Pendapatan rumah tangga miskin, Pengarusutamaan Gender, Percepatan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (P3S), Petani Milenial serta Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (Tetra Pandu).

Terdapat 24 kegiatan yang di ampu oleh DKP Sulteng, terdiri dari 16 kegiatan teknis dan 8 (delapan) kegiatan rutin, sebagai berikut:

a) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

- 1) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
- 2) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

- 3) Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT
- 4) Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
- b) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - 1) Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - 2) Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - 3) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
 - 4) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat
- c) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - 1) Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - 2) Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
 - 3) Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
- d) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
 - 1) Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
 - 2) Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
 - 3) Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil
- e) Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
 - 1) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil

- 2) Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
- f) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Struktur program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 8. Struktur Program dan Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025-2029

N o.	Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
PROGRAM TEKNIS					
BIDANG PENGELOLAAN RUANG LAUT					
1	Terwujudnya kawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	6.140.798.575,00	1.878.064.650,00	-
		Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	5.685.207.675,00	1.550.515.000,00	-
		Keg. Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	219.535.000,00	91.493.750,00	-
		Keg. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	236.055.900,00	236.055.900,00	-
BIDANG PERIKANAN TANGKAP					
2	Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	33.984.963.700,00	9.949.714.600,00	-
		Keg. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	7.812.839.700,00	8.781.981.600,00	+
		Keg. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai	172.124.000,00	467.733.000,00	+

		dengan 30 GT			
		Keg. Penetapan lokasi pembanguna serta pengolahan pelabuhan perikanan Provinsi	26.000.000.000,00	700.000.000,00	-
BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA & P2HP					
3	Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	12.540.594.642,00	3.435.266.602,00	-
		Keg. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	1.612.740.500,00	911.088.650,00	-
		Keg. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Darat	10.927.854.142,00	2.524.177.952,00	-
4	Meningkatnya angka konsumsi ikan	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.558.726.685,00	1.779.298.748,00	+
		Keg. Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	147.696.000,00	54.904.500,00	-
		Keg. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	829.180.000,00	1.023.886.943,00	+
		Keg. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	581.850.685,00	700.507.305,00	+
BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					
5	Terwujudnya kawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	7.428.040.900,00	3.021.340.300,09	-
		Keg. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	7.312.258.900,00	2.944.514.300,09	-
		Keg. Pengawasan Sumber Perikanan di wilayah sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	115.782.000,00	76.826.000,00	-
UPTD BALAI PERBENIHAN PERIKANAN					
	Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	739.146.000,00	1.058.335.000,00	+
		Keg. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	739.146.000,00	1.058.335.000,00	+
UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN					
	Meningkatnya angka konsumsi ikan	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	284.806.812,00	239.525.535,00	-
		Keg. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	284.806.812,00	239.525.535,00	-
UPTD PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH I					
	Terwujudnya kawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Program Pengelolaan Ruang Laut	51.805.400,00	25.812.750,00	-
		Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	51.805.400,00	25.812.750,00	-
	Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	178.477.200,00	380.911.100,00	-
		Keg. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	178.477.200,00	380.911.100,00	-
UPTD PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH II					
	Terwujudnya kawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Program Pengelolaan Ruang Laut	108.075.750,00	157.729.000,00	+
		Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	108.075.750,00	157.729.000,00	+
	Meningkatnya	Program Pengelolaan Perikanan	118.576.400,00	33.997.400,00	-

	kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Tangkap			
		Keg. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	118.576.400,00	33.997.400,00	-
UPTD PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH III					
	Terwujudnya kawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Program Pengelolaan Ruang Laut	37.656.800,00	24.663.800,00	-
		Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	37.656.800,00	24.663.800,00	-
	Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	116.988.000,00	160.308.388,00	+
		Keg. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	116.988.000,00	160.308.388,00	+
UPTD PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH IV					
	Terwujudnya kawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Program Pengelolaan Ruang Laut	73.629.500,00	49.814.750,00	-
		Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	73.629.500,00	49.814.750,00	-
	Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	236.762.500,00	254.181.156,00	+
		Keg. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	236.762.500,00	254.181.156,00	+
UPTD PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH V					
	Terwujudnya kawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Program Pengelolaan Ruang Laut	20.760.000,00	19.670.000,00	-
		Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	20.760.000,00	19.670.000,00	-
	Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	17.940.000,00	8.970.000,00	-
		Keg. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	17.940.000,00	8.970.000,00	-
UPTD PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH VI					
	Terwujudnya kawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Program Pengelolaan Ruang Laut	135.948.000,00	169.315.300,00	-
		Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	135.948.000,00	169.315.300,00	-
	Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	88.436.000,00	76.475.000,00	-
		Keg. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	88.436.000,00	76.475.000,00	-
UPTD PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH VII					
	Terwujudnya kawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Program Pengelolaan Ruang Laut	100.000.000,00	106.250.000,00	-
		Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	100.000.000,00	106.250.000,00	-
	Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	100.000.000,00	64.124.000,00	-
		Keg. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	100.000.000,00	64.124.000,00	-

PROGRAM PENUNJANG					
SEKRETARIAT					
		Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	28.292.941.696,30	26.570.608.912,27	-
		Keg. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	686.300.000,00	298.315.750,00	-
		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.539.223.605,30	23.292.512.145,06	-
		Keg. Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	134.585.000,00	55.377.500,00	-
		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	275.423.325,00	1.024.678.988,21	+
		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.690.995.956,00	1.295.346.424,00	-
		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	966.413.810,00	604.378.105,00	-
UPTD BALAI PERBENIHAN PERIKANAN					
		Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	1.330.854.000,00	129.1884.258,48	-
		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	76.800.000,00	74.120.000,00	-
		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.953.880,00	60.470.529,48	+
		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.104.580.120,00	1.028.996.132,00	-
		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.520.000,00	128.297.597,00	+
UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN					
		Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	615.186.324,00	477.274.700,00	-
		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	53.100.000,00	63.720.000,00	+
		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.723.590,00	15.754.750,00	-
		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	464.823.034,00	336.084.250,00	-
		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.539.700,00	61.715.700,00	-
UPTD PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH I					
		Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	1.209.717.400,00	978.811.980,00	-
		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	92.128.600,00	48.613.800,00	+
		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	21.273.500,00	63.356.040,00	+
		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.030.305.300,00	790.972.140,00	-
		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.010.000,00	75.870.000,00	+
UPTD PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH II					
		Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	1.213.347.850,00	1.088.437.456,00	-
		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	73.810.000,00	73.810.000,00	
		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	89.848.650,00	72.191.950,00	-
		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	814.011.832,00	687.841.743,00	-
		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235.677.368,00	254.593.763,00	+
UPTD PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH III					
		Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	1.015.355.484,00	887.641.018,40	-
		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	68.640.000,00	22.920.000,00	-
		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	46.806.678,00	92.364.429,00	+
		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	791.604.256,00	653.340.644,40	-
		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.304.550,00	119.015.945,00	+
UPTD PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH IV					
		Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	520.531.335,00	481.864.780,00	-

		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	93.610.000,00	82.915.000,00	-
		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	61.563.975,00	44.065.450,00	-
		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	301.695.360,00	316.839.680,00	+
		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.662.000,00	38.044.650,00	-
UPTD PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH V					
		Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	1.086.300.000,00	1.068.622.600,00	-
		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	82.760.000,00	64.560.000,00	-
		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.800.000,00	39.105.200,00	+
		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	899.290.000,00	762.175.800,00	-
		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.450.000,00	202.781.600,00	+
UPTD PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH VI					
		Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	795.616.000,00	715.146.125,00	-
		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90.550.000,00	104.340.000,00	+
		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	150.001.390,00	196.650.615,00	+
		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	514.424.610,00	378.933.510,00	-
		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.640.000,00	35.222.000,00	-
UPTD PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH VII					
		Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	250.000.000,00	186.790.480,00	-
		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50.000.000,00	33.736.765,00	-
		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	19.200.000,00	9.181.525,00	-
		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.800.000,00	8.268.2190,00	-
		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.000.000,00	61.190.000,00	-
T O T A L			90.593.977.060,30	56.640.850.389,24	-

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. PER/O9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah adalah:

1. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;

2. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

IKU juga digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perencanaan jangka menengah; perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja (PK), pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja instansi pemerintah; serta pemantauan dan pengendalian kinerja (monev) pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan. Analisis dan monitoring evaluasi (monev) kinerja dilakukan dengan memperhatikan pencapaian IKU. Hal ini dilakukan secara berkala dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

Dasar pelaksanaan monitoring dan evaluasi mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku dan dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang mengacu pada pencapaian sasaran. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku baik melalui pengambilan data primer maupun sekunder termasuk melakukan sampling terhadap beberapa titik sampel.

Berdasarkan Visi dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah maka untuk tahun 2021-2026 IKU pembangunan kelautan dan perikanan yang akan dicapai sebagaimana tersebut pada tabel berikut.

Tabel 9. IKU DKP Sulteng Tahun 2025
Berdasarkan Renstra 2021-2026

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1. Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	1. Nilai Tukar Perikanan	Indeks yang diterima $\frac{\text{nelayan/pembudidya}}{\text{Indeks yang dibayar nelayan/pembudidya}} \times 100$	BPS Sulteng	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Tengah
3. Meningkatnya angka konsumsi ikan	2. Angka Konsumsi Ikan (kg/perkapita/tahun)	$AKI = A + B + C$ Ket : A = Konsumsi Ikan di Dalam Rumah Tangga B = Konsumsi Luar Rumah Tangga C = Konsumsi Tidak Tercatat	Bidang Perikanan Budidaya & P2HP, UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan Dinas Perikanan Kab/Kota	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Tengah
3. Terwujudnya kawasan lindung perairan pengelolaan Sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	3. Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	$X = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{C_i}{S_i} \cdot 100\% \right)}{n}$ x : Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ci : jumlah sampel pelaku usaha KP yang patuh si : jumlah sampel pelaku usaha KP yang diperiksa i : jenis komponen pelaku usaha KP n : jumlah komponen pelaku usaha KP	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah I, II, III, IV, V, VI, VII	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Tengah
	4. Persentase tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan perundang-undangan	Kawasan lindung perairan / Total luas perairan teritorial	Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Tengah

Berdasarkan Visi dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah maka untuk tahun 2025-2029 IKU pembangunan kelautan dan perikanan yang akan dicapai sebagaimana tersebut pada tabel berikut.

Tabel 10. IKU DKP Sulteng Tahun 2025
Berdasarkan Renstra 2025-2029

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1. Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	1. Nilai Tukar Nelayan (%)	$\frac{\text{indeks yang diterima nelayan}}{\text{indeks yang dibayar nelayan}} \times 100$	BPS Sulteng, Bidang Perikanan Tangkap, UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Wilayah I - VII	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Tengah
	2. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (%)	$\frac{\text{indeks yang diterima pembudidaya}}{\text{indeks yang dibayar pembudidaya}} \times 100$	BPS Sulteng, Bidang Perikanan Budidaya & P2HP, UPTD Balai Perbenihan Perikanan	
	3. Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Th)	$\sum_{i=1}^n \frac{\text{KIDRT} \times \text{WEIND}}{\text{JP}}$ Ket: KIDRT = Konsumsi Ikan perKapita di rumah tangga (setara utuh segar) WEIND = Penimbang Individu JP = Jumlah Penduduk	Bidang Perikanan Budidaya & P2HP, UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan Dinas Perikanan Kab/Kota	
2. Terwujudnya Pengelolaan Kawasan SDKP yang Berkelanjutan	4. Rasio Pemanfaatan Kawasan Perairan Terhadap Total Kawasan Perairan Teritorial	$\frac{\text{kawasan lindung perairan} + \text{kawasan pemanfaatan ruang laut}}{\text{total luas perairan teritorial}}$	Bidang Pengelolaan Ruang Laut, UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Wilayah I - VII	
3. Terselenggaranya Pengawasan SDKP berdsarkan regulasi yang berlaku	5. Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Peraturan Per UU (%)	$x = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{c_i}{s_i} \times 100 \right)}{n}$ Ket: x = Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ci = Jumlah sampel pelaku usaha KP yang patuh si = Jumlah sampel pelaku usaha KP yang diperiksa i = Jenis komponen pelaku usaha KP n = Jumlah komponen pelaku usaha KP	Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan	

2.4 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen Perjanjian Kinerja DKP Sulteng dibuat setiap tahun sebagai suatu bentuk perjanjian kerja antara Gubernur Sulawesi Tengah dengan pimpinan OPD dalam hal ini Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.

Perjanjian kinerja menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian Perjanjian Kinerja DKP Sulteng Tahun 2025 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya yang didukung dengan program/kegiatan yang didanai oleh APBD dan APBN Tahun Anggaran 2025.

Tahun 2025, DKP Sulteng menyusun Perjanjian Kinerja awal yang diturunkan dari Renstra 2021-2026 dan juga Perjanjian Kinerja perubahan yang diturunkan dari Renstra 2025-2029. Perjanjian Kinerja awal Tahun 2025 DKP Sulteng sebagai berikut:

Tabel 11. Perjanjian Kinerja Awal DKP Sulteng Tahun 2025
Berdasarkan Renstra 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Nilai Tukar Perikanan	103,9
2	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Th)	73,00
3	Terwujudnya Kawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	0,1866
		Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	85,98

Perjanjian Kinerja perubahan Tahun 2025 DKP Sulteng sebagai berikut:

Tabel 12. Perjanjian Kinerja Perubahan DKP Sulteng Tahun 2025
Berdasarkan Renstra 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Nilai Tukar Nelayan (%)	101,05
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (%)	101,03
		Angka Konsumsi Ikan (Kg/kap/th)	40,65
2	Terwujudnya pengelolaan kawasan SDKP yang berkelanjutan	Rasio pemanfaatan kawasan perairan terhadap total kawasan perairan teritorial	0,1803
3	Terselenggaranya pengawasan SDKP berdasarkan regulasi yang berlaku	Persentase tingkat kepatuhan pelaku usaha KP Terhadap Peraturan Per UU (%)	82

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan suatu program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun pencapaian tujuan DKP Sulteng berdasarkan Renstra 2021-2026 dijelaskan sebagai berikut:

“Peningkatan PDRB dan Penurunan Jumlah Rumah Tangga Miskin Kelautan dan Perikanan Berbasis Pengelolaan SDKP yang Berkeadilan dan Berkelanjutan”

Pencapaian tujuan DKP Sulteng berdasarkan Renstra 2025-2029 dijelaskan sebagai berikut:

“Meningkatkan PDRB, Produktivitas Ekonomi Daerah dan kualitas Pemanfaatan Ruang Sektor Kelautan Perikanan”

Pengukuran kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja dengan target kinerja. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 13. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi	Hijau Tua
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi	Hijau Muda
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang	Kuning Tua
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah	Kuning Muda
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah	Merah

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

a. Perjanjian Kinerja Berdasarkan Renstra 2021-2026

Keberhasilan tujuan dan sasaran diukur melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan. Tahun 2025, berdasarkan Perjanjian Kinerja awal DKP Sulteng telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis (SS) dan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai, yang dirincikan sebagai berikut:

Tabel 14. Target dan Realisasi DKP Sulteng Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2021-2026

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi*	Capaian (%)
1	Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	1. Nilai Tukar Perikanan (%)	103,9	96,58	92,95
2	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	2. Angka Konsumsi Ikan (kg/kap/th)	73,00	38,20	52,33
3	Terwujudnya Kawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3. Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial	0,1866	0,1891	101,34
		4. Persentase tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap Peraturan Perundang-undangan (%)	85,98	79,86	92,88

* angka sementara

Analisis capaian kinerja per sasaran strategis (SS) tahun 2025 dijabarkan sebagai berikut:

SS 1: Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan

❖ *IKU 1 Nilai tukar perikanan (NTNP)*

merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan daya beli petani perikanan. NTNP sama dengan 100 berarti petani perikanan mengalami titik impas (tingkat pertumbuhan pendapatan usaha sama dengan pengeluaran rumah tangga) dan NTNP di bawah 100 berarti petani perikanan mengalami defisit (tingkat pertumbuhan pendapatan usaha di

bawah pertumbuhan pengeluaran rumah tangga). Rumus perhitungan NTNP Adalah:

$$\frac{\text{indeks yang diterima nelayan/pembudidaya}}{\text{indeks yang dibayar nelayan/pembudidaya}} \times 100$$

Tahun 2025 indeks yang diterima nelayan/pembudidaya (It) 119,94 dan indeks yang dibayarkan (Ib) 124,19. Indeks harga yang diterima merupakan nilai penjualan, sedangkan indeks yang dibayarkan merupakan indeks konsumsi rumah tangga dan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM) (biaya operasional). Berdasarkan indeks yang diterima dan dibayarkan nelayan/pembudidaya, jika dihitung menggunakan rumus diatas maka indeks NTNP tahun 2025 adalah 96,58. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan yaitu 103,9 maka indeks NTNP tidak tercapai atau hanya sebesar 92,95%. Hal ini secara umum dipengaruhi oleh faktor produksi, infrastruktur dan sosial ekonomi. Nilai indeks ini berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 15. Capaian Nilai Tukar Perikanan (NTNP) Sulawesi Tengah Tahun 2025

Bulan	Indek Harga Yang Diterima (It)	Indek Harga Yang dibayar (Ib)	NTNP
Januari	114,63	121,54	94,31
Februari	114,9	121,12	94,87
Maret	117,64	123,76	95,05
April	120,81	123,89	97,52
Mei	119,14	124,26	95,88
Juni	118,36	124,35	95,18
Juli	117,38	125,70	93,38
Agustus	120,47	125,62	95,9
September	123,32	125,48	98,28
Oktober	124,24	124,91	99,46
November	123,81	124,24	99,65
Desember	124,62	125,43	99,36
Rata-rata	119,94	124,19	96,57

Sasaran 2 Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (AKI)

❖ *IKU 2 Angka Konsumsi Ikan (kg/kap/th)*

Konsumsi ikan adalah jumlah kebutuhan/permintaan ikan yang menggambarkan fungsi dari jumlah penduduk dan neraca permintaan ikan untuk konsumsi domestik. Ikan mencakup ikan segar dan olahan sesuai dengan ketentuan dari BPS. Nilai AKI diperoleh berdasarkan penghitungan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP RI) menggunakan 4 (empat) kelompok jenis ikan dan udang segar/basah, kelompok ikan dan udang awetan dan kelompok ikan makanan jadi (goreng, bakar, dll) dan kelompok bumbu-bumbuan. Untuk kelompok ikan dan udang awetan, kelompok ikan makanan jadi (goreng, bakar, dll) dan kelompok bumbu-bumbuan dikonversi ke dalam bentuk ikan setara segar. Untuk tahun 2025 rumus perhitungan AKI mengalami perubahan dimana konsumsi luar rumah tangga tidak lagi dimasukkan dalam penghitungan. Rumus perhitungan AKI tahun 2025 adalah sebagai berikut:

$$\sum_{i=1}^n \frac{\text{KIDRT} \times \text{WEIND}}{\text{JP}}$$

KIDRT merupakan konsumsi ikan perkapita di rumah tangga (secara utuh segar), WEIND merupakan penimbang individu dan JP merupakan jumlah penduduk. Nilai AKI dihitung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP) dengan menggunakan data survei sosial ekonomi nasional (susenas).

Tahun 2025 target AKI ditetapkan sebesar 73,00 Kg/kap/th dan terealisasi dengan angka sementara 38,20 Kg/Kap/Th* atau 52,33%. Jika dibandingkan dengan target, nilai capaian ini sangat rendah karena memang masih merupakan angka sementara dimana sampai saat ini nilai AKI masih dalam proses penghitungan. Selain itu juga, seperti telah

dijelaskan diatas bahwa terdapat perubahan rumus penghitungan oleh KKP yang menyebabkan capaian menjadi lebih kecil dimana yang dulunya konsumsi luar rumah tangga dimasukkan dalam rumus perhitungan tetapi dengan rumus baru komponen itu dikeluarkan.

Sasaran 3 Terwujudnya kawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan

❖ *IKU 3 Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial*

Untuk perhitungan indikator rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Kawasan lindung perairan}}{\text{Total luas perairan teritorial}}$$

Tahun 2025 target indikator ini adalah 0,1866 dan terealisasi 0,1891 atau sebesar 101,34%, dimana luas Kawasan lindung sebesar 14.082,92 Km² dan total luas perairan teritorial Sulawesi Tengah sebesar 74.460,39 Km². Perhitungan ini dilakukan oleh DKP Sulteng.

❖ *IKU 4 Persentase tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan perundang-undangan (%)*

Nilai indikator persentase tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan persentase dari jumlah usaha kelautan dan perikanan yang memiliki ijin (patuh) per total keseluruhan jumlah usaha kelautan dan perikanan yang diperiksa. Indikator ini dihitung menggunakan rumus:

$$X = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{C_i}{S_i} \cdot 100\% \right)}{n}$$

Dimana C_i merupakan jumlah sampel pelaku usaha kelautan dan perikanan (KP) yang patuh, S_i merupakan jumlah sampel pelaku usaha KP yang diperiksa, i merupakan jenis komponen pelaku usaha KP, dan n adalah jumlah komponen pelaku usaha KP.

Tahun 2025 target untuk indikator ini ditetapkan sebesar 85,98 dan terealisasi 79,86 atau sebesar 92,88%. Jumlah pelaku usaha yang diperiksa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 16. Jumlah Pelaku Usaha yang diperiksa Tahun 2025

NO.	Komponen Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Jumlah Sampel Pelaku Usaha KP yang diperiksa	Jumlah Sampel Pelaku Usaha KP yang patuh	Jumlah Sampel Pelaku Usaha KP yang Kurang Patuh
1.	Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	311	247	64
2.	Pelaku Usaha Perikanan Budidaya	28	28	0
3.	Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	40	40	0
4.	Pelaku Usaha Pemanfaatan Ruang Laut	15	6	9
	Jumlah	394	321	73

Berdasarkan tabel diatas terdapat 394 pelaku usaha yang diperiksa, yang patuh sebanyak 321 pelaku usaha dan yang kurang patuh sebanyak 73 pelaku usaha, maka jika dihitung dengan menggunakan rumus diatas maka didapatkan angka realisasi seperti yang telah ditulis diatas yakni 79,86. Perhitungan ini dilakukan oleh DKP Sulteng.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya target indikator ini adalah karena luasnya wilayah perairan Sulawesi Tengah, keterbatasan SDM pengawas, keterbatasan anggaran

dan armada serta alasan lainnya yang bersifat sangat teknis. Upaya dalam menjawab permasalahan diatas DKP Sulteng berkomitmen dalam peningkatan kesadaran pelaku usaha KP dalam perijinan melalui kegiatan pendampingan, sosialisasi maupun pengawasan, serta memaksimalkan kordinasi/Kerjasama antar stakeholder dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan pengawasan.

b. Perjanjian Kinerja Berdasarkan Renstra 2025-2029

Berdasarkan Perjanjian Kinerja perubahan DKP Sulteng telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis (SS) dan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai, yang dirincikan sebagai berikut:

Tabel 17. Target dan Realisasi DKP Sulteng Tahun 2025
Berdasarkan Renstra 2025-2029

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi*	Capaian (%)
1	Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	1. Nilai Tukar Nelayan (%)	101,05	96,95	95,94
		2. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (%)	101,03	92,06	91,13
		3. Angka Konsumsi Ikan (kg/kap/th)	40,65	38,20	93,97
2	Terwujudnya Pengelolaan Kawasan SDKP yang berkelanjutan	4. Rasio pemanfaatan kawasan perairan terhadap total kawasan perairan teritorial	0,1803	0,1802	99,94
3	Terselenggaranya Pengawasan SDKP berdasarkan regulasi yang berlaku	5. Persentase tingkat kepatuhan pelaku usaha KP terhadap Peraturan Per UU (%)	82,00	79,86	97,39

* angka sementara

Analisis capaian kinerja per sasaran strategis (SS) tahun 2025 dijabarkan sebagai berikut:

SS 1: Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan

❖ *IKU 1 Nilai Tukar Nelayan (NTN)*

Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah indikator kesejahteraan nelayan yang mengukur perbandingan indeks harga yang diterima nelayan (output) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (input dan konsumsi), menunjukkan daya beli mereka terhadap barang dan jasa; NTN di atas 100 berarti surplus (pendapatan lebih besar dari pengeluaran), NTN 100 impas, dan NTN di bawah 100 defisit. Rumus perhitungan NTN Adalah:

$$\frac{\text{indeks yang diterima nelayan}}{\text{indeks yang dibayar nelayan}} \times 100$$

Indeks harga diterima nelayan (It) adalah harga komoditas hasil tangkapan nelayan (ikan, dll.) sedangkan **Indeks harga dibayar nelayan (Ib)** adalah harga barang dan jasa yang dibeli nelayan untuk konsumsi rumah tangga dan biaya produksi (pakan, BBM, alat tangkap, dll.).

Tahun 2025 indeks yang diterima nelayan (It) 120,97 dan indeks yang dibayarkan (Ib) 124,78 sehingga jika dihitung menggunakan rumus diatas maka indeks NTN tahun 2025 adalah 96,95 dan jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan yaitu 101,05 maka terealisasi sebesar 95,94%. Nilai indeks ini berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Provinsi Sulawesi Tengah. Capaian NTN Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 18. Capaian Nilai Tukar Nelayan (NTN)
Sulawesi Tengah Tahun 2025

Bulan	Indek Harga Yang Diterima (It)	Indek Harga Yang dibayar (Ib)	NTN
Januari	115,35	122,17	94,42
Februari	115,56	121,7	94,96
Maret	118,45	124,37	95,24
April	121,87	124,44	97,94
Mei	120,11	124,83	96,22
Juni	119,25	124,92	95,46
Juli	118,15	126,3	93,54
Agustus	121,5	126,22	96,27
September	124,54	126,06	98,8
Oktober	125,58	125,49	100,07
November	125,17	124,79	100,3
Desember	126,08	126,02	100,05
Rata-rata	120,97	124,78	96,94

Tidak tercapainya target indikator ini disebabkan oleh, antara lain: (1) *fluktuasi hasil tangkapan*, dimana ketergantungan yang tinggi pada sumber daya laut yang jumlahnya tidak menentu akibat faktor musim dan cuaca menyebabkan hasil tangkapan ikan menjadi tidak pasti, sehingga memengaruhi pendapatan nelayan secara langsung; (2) *keterbatasan infrastruktur dan teknologi*, dimana minimnya infrastruktur yang memadai, seperti fasilitas pasar modern, stok es, atau pendingin di kapal, menyebabkan distribusi ikan kurang lancar dan kualitas ikan menurun. Penggunaan alat tangkap yang masih tradisional dan kurangnya teknologi juga berkontribusi pada hasil tangkapan yang kurang optimal; (3) *biaya produksi yang tinggi*, dimana kenaikan indeks harga yang dibayarkan oleh nelayan (biaya bahan bakar, kebutuhan rumah tangga, dan barang modal) sering kali lebih tinggi atau tidak seimbang dengan kenaikan indeks harga produk perikanan yang mereka jual, sehingga menekan nilai tukar mereka; dan (4) *optimalisasi potensi yang belum maksimal*, meskipun potensi perikanan Sulawesi Tengah besar namun pemanfaatannya

belum optimal. Masalah seperti *illegal fishing* dan *overfishing* juga masih menjadi tantangan dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan di wilayah Sulawesi Tengah.

❖ *IKU 2 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)*

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) adalah indikator ekonomi yang mengukur kemampuan daya beli hasil budidaya ikan (seperti ikan konsumsi, benih, udang) untuk ditukar dengan barang dan jasa kebutuhan produksi (pakan, obat) maupun konsumsi rumah tangga, dengan rumus rasio indeks harga yang diterima pembudidaya (It) dibagi indeks harga yang dibayar (Ib), lalu dikalikan 100%, menunjukkan kesejahteraan relatif mereka. NTPi di atas 100 berarti surplus (pendapatan lebih besar dari pengeluaran), NTPi 100 impas, dan NTPi di bawah 100 defisit. Rumus perhitungan NTPi Adalah:

$$\frac{\text{indeks yang diterima pembudidaya ikan}}{\text{indeks yang dibayar pembudidaya ikan}} \times 100$$

Indeks harga yang diterima (It) mencerminkan perubahan harga jual hasil budidaya ikan (ikan, udang, dll.) dan **Indeks harga yang dibayar (Ib)** mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang dibutuhkan pembudidaya, termasuk biaya produksi dan konsumsi rumah tangga.

Tahun 2025 indeks yang diterima pembudidaya ikan (It) 108,17 dan indeks yang dibayarkan (Ib) 117,50 sehingga jika dihitung menggunakan rumus diatas maka indeks NTPi tahun 2025 adalah 92,06 dan jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan yaitu 101,03 maka terealisasi sebesar 91,13%. Nilai indeks ini berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Provinsi Sulawesi Tengah. Capaian NTPi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 19. Capaian Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Sulawesi Tengah Tahun 2025

Bulan	Indek Harga Yang Diterima (It)	Indek Harga Yang dibayar (Ib)	NTPi
Januari	106,26	114,3	92,97
februari	107,34	114,47	93,77
Maret	108,31	116,85	92,7
April	108,61	117,5	92,43
Mei	108,08	117,7	91,83
juni	108,14	117,83	91,77
Juli	108,58	118,81	91,39
Agustus	108,57	118,78	91,4
September	109,29	118,84	91,96
Oktober	108,87	118,3	92,03
November	108,19	117,92	91,75
Desember	107,83	118,67	90,87
Rata-rata	108,17	117,50	92,07

Tidak tercapainya target indikator ini disebabkan oleh, antara lain: (1) *Biaya Produksi yang Tinggi*, dimana pengeluaran untuk input produksi seperti pakan ikan, benih, pupuk, dan energi sering kali meningkat. Ketika indeks harga yang dibayarkan petani (Ib) naik lebih cepat daripada indeks harga yang diterima (It), nilai tukar petani menurun; (2) *Harga Jual Hasil Panen yang Relatif Rendah atau Fluktuatif*, pembudidaya sering dihadapkan pada harga jual produk perikanan yang berfluktuasi atau cenderung stagnan, terutama jika dibandingkan dengan kenaikan biaya produksi. Hal ini dapat terjadi akibat rantai pemasaran yang panjang atau daya tawar pembudidaya yang lemah; (3) *Produktivitas yang Rendah*, keterbatasan modal petani dan penerapan teknik budidaya yang kurang efisien dapat menyebabkan produktivitas yang rendah, sehingga volume panen tidak optimal untuk menutupi biaya operasional yang sudah tinggi; dan (4) *Keterbatasan Modal*, banyak pembudidaya, yang sebagian besar termasuk dalam golongan ekonomi lemah, menghadapi keterbatasan modal

untuk investasi dalam teknologi yang lebih baik atau untuk menanggulangi biaya produksi yang meningkat.

❖ *IKU 3 Angka Konsumsi Ikan (kg/kap/th)*

Konsumsi ikan adalah jumlah kebutuhan/permintaan ikan yang menggambarkan fungsi dari jumlah penduduk dan neraca permintaan ikan untuk konsumsi domestik. Ikan mencakup ikan segar dan olahan sesuai dengan ketentuan dari BPS. Nilai AKI diperoleh berdasarkan penghitungan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP RI) menggunakan 4 (empat) kelompok jenis ikan dan udang segar/basah, kelompok ikan dan udang awetan dan kelompok ikan makanan jadi (goreng, bakar, dll) dan kelompok bumbu-bumbuan. Untuk kelompok ikan dan udang awetan, kelompok ikan makanan jadi (goreng, bakar, dll) dan kelompok bumbu-bumbuan dikonversi ke dalam bentuk ikan setara segar. Untuk tahun 2025 rumus perhitungan AKI mengalami perubahan dimana konsumsi luar rumah tangga tidak lagi dimasukkan dalam penghitungan. Rumus perhitungan AKI tahun 2025 adalah sebagai berikut:

$$\sum_{i=1}^n \frac{\text{KIDRT} \times \text{WEIND}}{\text{JP}}$$

KIDRT merupakan konsumsi ikan perkapita di rumah tangga (secara utuh segar), WEIND merupakan penimbang individu dan JP merupakan jumlah penduduk. Nilai AKI dihitung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP) dengan menggunakan data survei sosial ekonomi nasional (susenas).

Target Angka Konsumsi Ikan yang ingin dicapai pada tahun 2025 adalah sebesar 40,65 Kg/kap/th dan terealisasi dengan angka sementara 38,20 Kg/Kap/Th* atau 93,97%. Nilai ini diperkirakan masih akan naik mengingat nilai ini masih

merupakan angka sementara karena masih dalam proses penghitungan.

Sasaran 2 Terwujudnya pengelolaan kawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan

❖ IKU 4 Rasio Pemanfaatan Kawasan Perairan Terhadap Total Kawasan Perairan Teritorial

Pengembangan kawasan konservasi perairan daerah merupakan salah satu amanat UU No. 27 Tahun 2007 Jo UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau pulau kecil dengan ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

Berdasarkan KEPMEN-KP NO. 50 Tahun 2019 tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Donggala, Buol, Tolitoli, dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Tengah, KEPMEN-KP NO. 51 Tahun 2019 tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Parigi Moutong, Poso, Tojo Una-Una, dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019, KEPMEN-KP NO. 52 Tahun 2019 tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Morowali, Morowali Utara, dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019, KEPMEN-KP NO. 53 Tahun 2019 tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019, status kawasan konservasi Sulawesi Tengah seluas 1.338.291,55 Ha. Data ini merupakan hasil dari konsultasi publik dan penyamaan data

dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP) Tahun 2019.

Perhitungan indikator rasio pemanfaatan kawasan perairan terhadap total kawasan perairan teritorial menggunakan rumus:

$$\frac{\text{kawasan lindung perairan} + \text{kawasan pemanfaatan ruang laut}}{\text{total luas perairan teritorial}}$$

Hingga tahun 2025 luas kawasan pemanfaatan lahan adalah **3.380,41 Ha**, luas kawasan konservasi Sulawesi Tengah berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan **1.338.291,86 Ha**, dan luas teritorial perairan Sulawesi Tengah sebesar **7.445.237 Ha**. Jika dihitung menggunakan rumus diatas maka capaian indikator ini adalah 0,1802. Capaian ini jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan yakni 0,1803 maka tercapai sebesar 99,94%. Perhitungan ini dilakukan oleh DKP Sulteng.

Sasaran 3 Terselenggaranya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan regulasi yang berlaku

- ❖ *IKU 5 Perentase tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan perundang-undangan (%)*

Nilai indikator persentase tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan persentase dari jumlah usaha kelautan dan perikanan yang memiliki ijin (patuh) per total keseluruhan jumlah usaha kelautan dan perikanan yang diperiksa. Indikator ini dihitung menggunakan rumus:

$$X = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{C_i}{S_i} \cdot 100\% \right)}{n}$$

Dimana C_i merupakan jumlah sampel pelaku usaha kelautan dan perikanan (KP) yang patuh, S_i merupakan jumlah sampel pelaku usaha KP yang diperiksa, i merupakan jenis komponen pelaku usaha KP, dan n adalah jumlah komponen pelaku usaha KP.

Tahun 2025 target untuk indikator ini ditetapkan sebesar 85,98 dan terealisasi 79,86 atau sebesar 92,88%. Jumlah pelaku usaha yang diperiksa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 20. Jumlah Pelaku Usaha yang diperiksa Tahun 2025

NO.	Komponen Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Jumlah Sampel Pelaku Usaha KP yang diperiksa	Jumlah Sampel Pelaku Usaha KP yang patuh	Jumlah Sampel Pelaku Usaha KP yang Kurang Patuh
1.	Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	311	247	64
2.	Pelaku Usaha Perikanan Budidaya	28	28	0
3.	Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	40	40	0
4.	Pelaku Usaha Pemanfaatan Ruang Laut	15	6	9
	Jumlah	394	321	73

Berdasarkan tabel diatas terdapat 394 pelaku usaha yang diperiksa, yang patuh sebanyak 321 pelaku usaha dan yang kurang patuh sebanyak 73 pelaku usaha, maka jika dihitung dengan menggunakan rumus diatas maka didapatkan angka realisasi seperti yang telah ditulis diatas yakni 79,86. Perhitungan ini dilakukan oleh DKP Sulteng.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya target indikator ini adalah karena luasnya wilayah perairan Sulawesi Tengah, keterbatasan SDM pengawas, keterbatasan anggaran dan armada serta alasan lainnya yang bersifat sangat teknis. Upaya dalam menjawab permasalahan diatas DKP Sulteng berkomitmen dalam peningkatan kesadaran pelaku usaha KP dalam perijinan melalui kegiatan

pendampingan, sosialisasi maupun pengawasan, serta memaksimalkan kordinasi/Kerjasama antar stakeholder dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan pengawasan.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelum

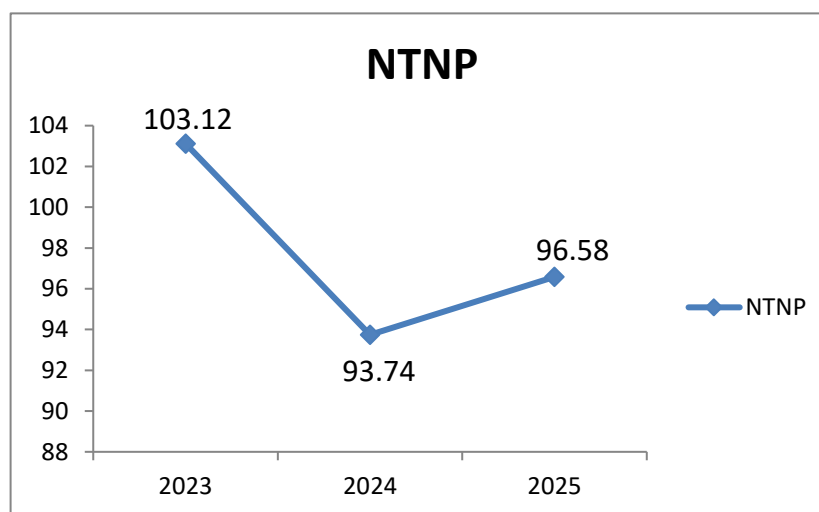
a. Perjanjian Kinerja Berdasarkan Renstra 2021-2026

Capaian tahun 2025 ini akan dibandingkan dengan tahun 2024 dan 2023. Perbandingan capaian IKU DKP tahun 2025, 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 21. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 s/d 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi*	% capaian
1	Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Nilai Tukar perikanan (NTNP) (%)	100,80	103,12	102,30	103,86	93,74	90,26	103,9	96,58	92,95
2	Meningkatnya angka konsumsi ikan	Angka Konsumsi Ikan (kg/kap/th)	57,05	71,85	125,94	72,40	74,72	103,20	73,00	38,20	52,33
3	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial	-	-	-	0,1847	0,1891	102,38	0,1866	0,1891	101,34
		Persentase tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan perundang-undangan	-	-	-	83,98	93,49	111,32	85,98	79,86	92,88

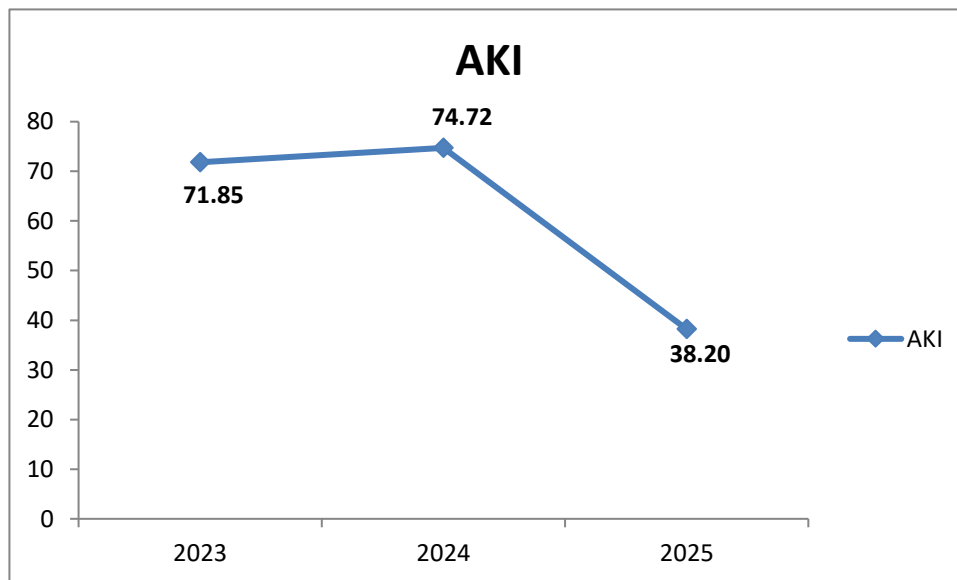
1) *Nilai Tukar Perikanan (NTNP)*, Perkembangan NTNP Perikanan Sulteng selama tahun 2023, 2024 dan 2025 berfluktuasi. Tahun 2023 NTNP diatas 100 yang berarti surplus (pendapatan lebih besar dari pengeluaran) sedangkan tahun 2024 dan 2025 NTNP dibawah 100, yang artinya defisit. Meskipun NTNP 2025 berada dibawah 100 akan tetapi melebihi NTNP 2024, artinya bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu (q to q), NTNP Sulteng cenderung naik. Tahun 2025 NTNP Sulteng naik sebesar 3,03% dari tahun 2024. Grafik NTNP tahun 2023 s/d 2025 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 5. NTNP Sulteng Tahun 2023 – 2025

2. *Angka Konsumsi Ikan (AKI)*, sampai dengan tahun 2024 capaian untuk indikator ini terus mengalami peningkatan, akan tetapi pada 2025 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan perubahan rumus cara penghitungan, dimana dengan rumus yang baru konsumsi luar rumah tangga tidak lagi dimasukkan dalam penghitungan sehingga nilai capaianpun menjadi kecil. AKI tahun 2024 sebesar 74,72 naik 3,99% dari tahun 2023 yang mencapai 71,85. AKI tahun 2025 turun 48,88% dari tahun 2024, dimana

AKI tahun 2025 sebesar 38,20 (angka sementara). Grafik AKI 2023 – 2025 dapat dilihat pada gambar dibawah.



Gambar 6. AKI Sulteng Tahun 2023 – 2025

3. *Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial*, indikator ini baru mulai dipakai pada tahun 2024, sehingga hanya dapat dibandingkan dengan tahun 2024 saja. Capaian tahun 2024 dan 2025 sama yakni 0,1891.
4. *Persentase tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan perundang-undangan*, indikator ini baru mulai dipakai pada tahun 2024, sehingga hanya dapat dibandingkan dengan tahun 2024 saja. Capaian tahun 2025 turun 14,58% dari tahun 2024. Tahun 2024 capaian untuk indikator ini sebesar 93,49% dan tahun 2025 79,86%.
5. Tahun 2025 dan 2024 DKP Sulteng memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja, sedangkan tahun 2023 DKP Sulteng memiliki sasaran strategis sebanyak 5 (lima) dan indikator kinerja sebanyak 6 (enam).

b. Perjanjian Kinerja Berdasarkan Renstra 2025-2029

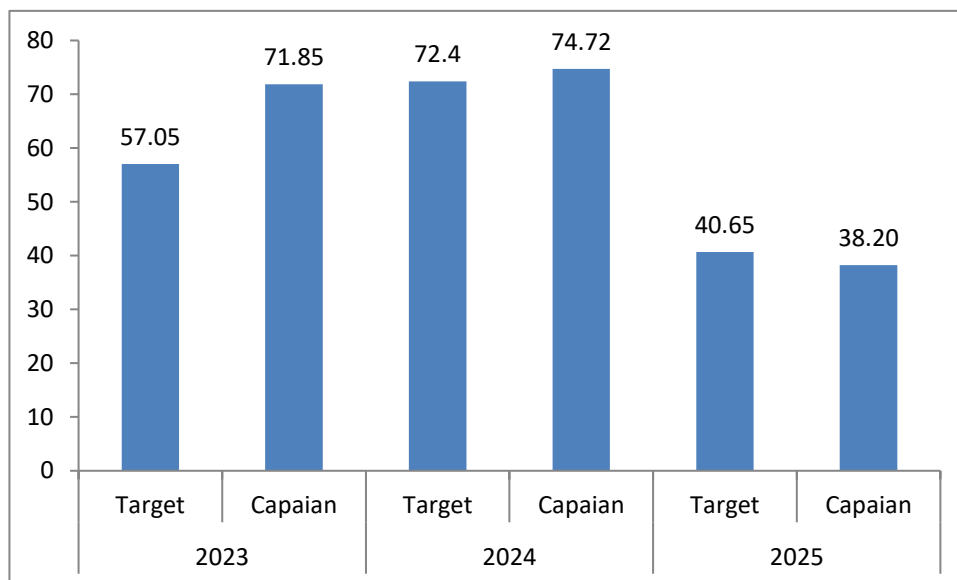
Capaian tahun 2025 ini akan dibandingkan dengan tahun 2024 dan 2023. Perbandingan capaian IKU DKP tahun 2025, 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 22. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 s/d 2025
Berdasarkan Renstra 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi*	% capaian
1	Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (%)	-	-	-	-	-	-	101,05	96,95	95,94
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) (%)	-	-	-	-	-	-	101,03	92,06	91,13
		Angka Konsumsi Ikan (kg/kap/th)	57,05	71,85	125,94	72,40	74,72	103,20	40,65	38,20	93,97
2	Terwujudnya pengelolaan kawasan perairan SDKP yang berkelanjutan	Rasio pemanfaatan kawasan perairan terhadap total kawasan perairan teritorial	-	-	-	-	-	-	0,1803	0,1802	99,94
3	Terselenggaranya pengawasan SDKP berdasarkan regulasi yang berlaku	Persentase tingkat kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan per UU (%)	-	-	-	83,98	93,49	111,32	82,00	79,86	97,39

- 1) *Nilai Tukar Nelayan (NTN)*, indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum Karena merupakan indikator baru.
- 2) *Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)*, indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum Karena merupakan indikator baru.

3. *Angka Konsumsi Ikan (AKI)*, sampai dengan tahun 2024 capaian untuk indikator ini terus mengalami peningkatan, akan tetapi pada 2025 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan perubahan rumus cara penghitungan, dimana dengan rumus yang baru konsumsi luar rumah tangga tidak lagi dimasukkan dalam penghitungan sehingga nilai capaianpun menjadi kecil. AKI tahun 2024 sebesar 74,72 naik 3,99% dari tahun 2023 yang mencapai 71,85. AKI tahun 2025 turun 48,88% dari tahun 2024, dimana AKI tahun 2025 sebesar 38,20 (angka sementara). Grafik AKI 2023 – 2025 dapat dilihat pada gambar dibawah.



Gambar 7. AKI Sulteng Tahun 2023 – 2025

4. *Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial*, indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum Karena merupakan indikator baru.
5. *Persentase tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan perundang-undangan*, indikator ini baru mulai dipakai pada tahun 2024, sehingga hanya dapat dibandingkan dengan tahun 2024 saja. Capaian tahun 2025

turun 14,58% dari tahun 2024. Tahun 2024 capaian untuk indikator ini sebesar 93,49% dan tahun 2025 79,86%.

6. Tahun 2025 DKP Sulteng memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja, tahun 2024 DKP Sulteng memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja, sedangkan tahun 2023 DKP Sulteng memiliki sasaran strategis sebanyak 5 (lima) dan indikator kinerja sebanyak 6 (enam).

C. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Renstra

1) Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025

➤ Dibandingkan dengan Renstra 2021-2026

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan Tahun 2025 terhadap Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 DKP Sulteng dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 23. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah di Renstra 2021 - 2026

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Nilai Tukar Perikanan (NTNP) (%)	96,58	103,4	93,40
2	Meningkatnya angka konsumsi ikan	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Th)	38,20	69,5	54,96
3	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	0,1891	0,1884	100,37
		Persentase tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan perundang-undangan	79,86	88,04	90,71

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa:

1. Tingkat kemajuan capaian indikator *Nilai Tukar Perikanan (NTNP)* tahun 2025 mencapai 93,40% dari target Renstra tahun 2026. Jika melihat capaian dari tahun-tahun sebelum, NTNP Sulteng memang sangat berfluktuasi mengingat banyak faktor

teknis yang mempengaruhi. Besar harapan kedepannya NTNP Sulteng akan meningkat dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya melalui program-program bantuan kepada nelayan dan pembudidaya;

2. Tingkat kemajuan capaian indikator *Angka Konsumsi Ikan (AKI)* sebesar 54,96% dari target renstra tahun 2026. Sampai dengan tahun 2024 nilai AKI Sulawesi Tengah selalu melebihi target yang ditetapkan, baik target daerah maupun nasional. Tetapi pada tahun 2025 nilai AKI rendah karena terdapat perubahan rumus penghitungan, dimana beberapa komponen tidak lagi dimasukkan sehingga capaian menjadi turun;
3. Tingkat kemajuan capaian indikator *Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial* telah melebihi target renstra tahun 2026 yakni 100,37%, dimana target adalah 0,1884 dan capaian sebesar 0,1891. Salah satu yang menyebabkan pencapaian ini karena kegiatan konservasi yang terus dilakukan oleh DKP Sulteng;
4. Tingkat kemajuan capaian indikator *Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-undangan* sebesar 90,71% dari target renstra tahun 2026. Menyikapi hal ini DKP Sulteng terus melakukan upaya-upaya baik dalam pendampingan, sosialisasi dan bantuan-bantuan.

2) Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

➤ Dibandingkan dengan Renstra 2025-2029

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan Tahun 2025 terhadap Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 DKP Sulteng dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 24. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah di Renstra 2025 - 2029

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra 2029	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (%)	96,95	104,32	92,93
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) (%)	92,06	103,07	89,32
		Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Th)	38,20	46,7	81,80
2	Terwujudnya pengelolaan kawasan SDKP yang berkelanjutan	Rasio pemanfaatan kawasan perairan terhadap total kawasan perairan teritorial	0,1802	0,181	99,94
3	Terselenggaranya pengawasan SDKP berdasarkan regulasi yang berlaku	Persentase tingkat kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan per UU (%)	79,86	86,00	92,86

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa:

1. Tingkat kemajuan capaian indikator *Nilai Tukar Nelayan (NTN)* tahun 2025 mencapai 92,93% dari target Renstra tahun 2029. Nilai ini memang masih jauh dari harapan tetapi mengingat tahun 2025 masih merupakan tahun awal pada Renstra 2025-2029 maka nilai ini diprediksi masih akan mengalami kemajuan pada tahun-tahun mendatang hingga tahun terakhir pada Renstra 2025-2029;
2. Tingkat kemajuan capaian indikator *Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)* tahun 2025 mencapai 89,32% dari target Renstra tahun 2029. Nilai ini memang masih jauh dari harapan tetapi mengingat tahun 2025 masih merupakan tahun awal pada Renstra 2025-2029 maka nilai ini diprediksi masih akan

mengalami kemajuan pada tahun-tahun mendatang hingga tahun terakhir pada Renstra 2025-2029;

3. Tingkat kemajuan capaian indikator *Angka Konsumsi Ikan (AKI)* sebesar 81,80% dari target renstra tahun 2029. Sampai dengan tahun 2024 nilai AKI Sulawesi Tengah selalu melebihi target yang ditetapkan, baik target daerah maupun nasional. Tetapi pada tahun 2025 nilai AKI rendah karena terdapat perubahan rumus penghitungan, dimana beberapa komponen tidak lagi dimasukkan sehingga capaian menjadi turun;
4. Tingkat kemajuan capaian indikator *rasio pemanfaatan kawasan perairan terhadap total kawasan perairan teritorial* tahun 2025 mencapai 99,94% dari target Renstra tahun 2029. Salah satu yang menyebabkan pencapaian ini karena kegiatan konservasi yang terus dilakukan oleh DKP Sulteng;
5. Tingkat kemajuan capaian indikator *Persentase tingkat kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan per UU* sebesar 92,86% dari target renstra tahun 2029. Menyikapi hal ini DKP Sulteng terus melakukan upaya-upaya baik dalam pendampingan, sosialisasi dan bantuan-bantuan.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Standar Nasional/ Daerah Lain

1) Perjanjian Kinerja Berdasarkan Renstra 2021-2026

Perbandingan capaian indikator kinerja utama (IKU) DKP Sulteng tahun 2025 dengan capaian Nasional dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 25. Perbandingan Capaian IKU Dinas dengan Capaian Nasional Tahun 2025

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025*	Realisasi Nasional 2025*	Lebih tinggi/ Lebih besar
Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Nilai Tukar Perikanan (%)	96,58	103,54	(6,96)
Meningkatnya angka konsumsi ikan	Angka konsumsi ikan (Kg/kap/th)	38,20	26,08	12,12
Terwujudnya pengelolaan	Rasio kawasan	0,1891	-	-

sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	lindung perairan terhadap total luas perairan territorial			
	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	79,86	43,16	36,70

*) angka sementara

Perbandingan capaian IKU Dinas dan Capaian nasional Tahun 2025:

1. Dari tabel diatas dapat dilihat capaian NTNP nasional lebih tinggi dari capaian Sulawesi Tengah, dimana capaian nasional sebesar 103,54 dan capaian Sulawesi Tengah 96,58. NTNP nasional secara konsisten menunjukkan angka di atas 100, yang mengindikasikan bahwa usaha perikanan secara agregat nasional mengalami surplus atau menguntungkan. Angka NTNP Sulteng seringkali berada di bawah rata-rata nasional, terkadang juga sedikit di bawah 100, yang mengindikasikan tantangan dalam profitabilitas sektor perikanan di tingkat provinsi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Perbandingan ini dapat bervariasi dari waktu ke waktu tergantung pada berbagai faktor seperti harga komoditas ikan, biaya produksi (pakan, BBM, tenaga kerja), dan kondisi pasar lokal maupun ekspor;
2. Untuk capaian nilai Angka Konsumsi Ikan (AKI) tahun 2025 Sulawesi Tengah lebih tinggi dari capaian nasional. Capaian Sulawesi Tengah sebesar 38,20 kg/kap/th sedangkan nasional 26,08 kg/kap/th. Nilai AKI di Sulawesi Tengah secara konsisten lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional dalam beberapa tahun terakhir. Tingginya angka konsumsi ikan di Sulawesi

Tengah ini menunjukkan kesadaran masyarakat yang baik akan pentingnya ikan sebagai sumber protein dan gizi. Upaya DKP Sulteng untuk mempertahankan tren positif ini adalah melalui inisiasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), kegiatan ini terus dilakukan setiap tahunnya;

3. Indikator rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial tidak dapat disandingkan dengan nasional karena tidak ditetapkan menjadi indikator nasional. Selain itu, indikator ini juga tidak dapat disandingkan dengan daerah lainnya karena sampai saat ini data mengenai indikator ini yang berasal dari daerah lain tidak ada;
4. Capaian indikator persentase tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan perundang-undangan Sulawesi Tengah lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian nasional. Capaian Sulawesi Tengah 79,86 sedangkan nasional 43,16. Ini menunjukkan komitmen DKP Sulteng untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan Sulawesi Tengah agar terus berfokus pada pemanfaatan sumberdaya yang berkelanjutan.

2. *Perjanjian Kinerja Berdasarkan Renstra 2025-2029*

Perbandingan capaian indikator kinerja utama (IKU) DKP Sulteng tahun 2025 dengan capaian Nasional dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 26. Perbandingan Capaian IKU Dinas dengan Capaian Nasional Tahun 2025

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025*	Realisasi Nasional 2025*	Lebih tinggi/ Lebih besar
Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (%)	96,95	103,86	(6,91)
	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) (%)	92,06	103,03	(10,97)
	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Th)	38,20	26,08	12,12
Terwujudnya pengelolaan kawasan SDKP yang	Rasio pemanfaatan kawasan perairan terhadap total kawasan	0,1802	-	-

berkelanjutan	perairan territorial			
Terselenggaranya pengawasan SDKP berdasarkan regulasi yang berlaku	Persentase tingkat kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan per UU (%)	79,86	43,16	36,70

*) angka sementara

Perbandingan capaian IKU Dinas dan Capaian nasional Tahun 2025:

1. Dari tabel diatas dapat dilihat capaian NTN nasional lebih tinggi dari capaian Sulawesi Tengah, dimana capaian nasional sebesar 103,86 dan capaian Sulawesi Tengah 96,95. Ini menunjukkan daya beli dan kemampuan tukar nelayan di Sulawesi Tengah lebih rendah dari rata-rata nasional;
2. Dari tabel diatas dapat dilihat capaian NTPi nasional lebih tinggi dari capaian Sulawesi Tengah, dimana capaian nasional sebesar 103,03 dan capaian Sulawesi Tengah 92,06, yang artinya daya beli dan kemampuan tukar pembudidaya di Sulawesi Tengah lebih rendah dari rata-rata nasional;
3. Untuk capaian nilai Angka Konsumsi Ikan (AKI) tahun 2025 Sulawesi Tengah lebih tinggi dari capaian nasional. Capaian Sulawesi Tengah sebesar 38,20 kg/kap/th sedangkan nasional 26,08 kg/kap/th. Nilai AKI di Sulawesi Tengah secara konsisten lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional dalam beberapa tahun terakhir. Tingginya angka konsumsi ikan di Sulawesi Tengah ini menunjukkan kesadaran masyarakat yang baik akan pentingnya ikan sebagai sumber protein dan gizi. Upaya DKP Sulteng untuk mempertahankan tren positif ini adalah melalui inisiasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), kegiatan ini terus dilakukan setiap tahunnya;
4. Indikator rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial tidak dapat disandingkan dengan nasional karena tidak ditetapkan menjadi indikator nasional. Selain itu, indikator ini juga tidak dapat disandingkan dengan daerah

lainnya karena sampai saat ini data mengenai indikator ini yang berasal dari daerah lain tidak ada;

5. Capaian indikator persentase tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan perundang-undangan Sulawesi Tengah lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian nasional. Capaian Sulawesi Tengah 79,86 sedangkan nasional 43,16. Ini menunjukkan komitmen DKP Sulteng untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan Sulawesi Tengah agar terus berfokus pada pemanfaatan sumberdaya yang berkelanjutan.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja

1) Perjanjian Kinerja Berdasarkan Renstra 2021-2026

Secara keseluruhan capaian indikator kinerja DKP Sulteng tahun 2025 sebesar 84,88%. Dari 4 (empat) indikator yang ada, 1 (satu) indikator melebihi target atau dengan capaian diatas 100% dan 3 (tiga) lainnya tidak mencapai target.

a) SASARAN 1

MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja utama (IKU) yakni Nilai Tukar Perikanan (NTNP). Kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan diartikan bahwa pengelolaan sumberdaya ikan dilakukan untuk kepentingan kemakmuran rakyat (nelayan dan pembudidaya ikan), dalam hal ini DKP Sulteng senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh nelayan dan pembudidaya melalui program dan kegiatan pembangunan perikanan tangkap dan budidaya yang dilaksanakan.

Adapun capaian untuk IKU ini adalah 96,58 dari target 103,9, dengan demikian prosentase realisasi terhadap indikator ini adalah 96,58%. Ini menunjukkan bahwa indikator yang ditetapkan sebagai

alat untuk mengukur capaian sasaran strategis ini belum mencapai target. Nilai tukar 96,58 berarti nilai tukar lebih kecil dari 100 yang berarti nelayan/pembudidaya mengalami defisit, dimana indeks harga yang diterima nelayan/pembudidaya lebih kecil dibandingkan indeks harga yang dibayarkan. Sebagai langkah solusi untuk permasalahan ini maka kedepannya perlu dilakukan: (1) perbaikan teknologi penangkapan, (2) percepatan penyaluran bantuan dan distribusi lebih merata, (3) peningkatan kapasitas dan kemampuan nelayan agar produktivitas meningkat, dan (4) menjaga produktivitas pembudidaya sekaligus menjaga harga komoditas di tingkat pembudidaya tidak turun atau bahkan bisa naik dan menekan biaya yang dikeluarkan oleh pembudidaya.

b) SASARAN 2

MENINGKATNYA ANGKA KONSUMSI IKAN

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja utama (IKU) yakni Angka Konsumsi Ikan (AKI). AKI adalah indikator rata-rata jumlah ikan yang dikonsumsi per orang per tahun (kg/kap/th) disuatu wilayah. Adapun capaian untuk IKU ini adalah 38,20 dari target 73,00 dengan demikian prosentase realisasi terhadap indikator ini adalah 52,33%. Ini menunjukkan bahwa indikator yang ditetapkan sebagai alat untuk mengukur capaian sasaran strategis ini belum mencapai target.

Selama beberapa tahun terakhir nilai AKI Sulawesi Tengah selalu melampaui target daerah dan nasional. Tahun 2025 nilai AKI turun dikarenakan adanya perubahan rumus cara penghitungan, dimana beberapa komponen tidak lagi dihitung, selain itu nilai capaian ini juga masih merupakan angka sementara dimana saat ini nilai AKI masih dalam proses penghitungan. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam menanggapi hal ini adalah dengan menurunkan target (telah dilakukan pada Renstra 2025-2029) agar menyesuaikan dengan rumus penghitungan baru. Selain itu, secara teknis yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan kampanye protein

ikan dan gerakan memasyarakatkan makan ikan dalam mendukung program makan bergizi melalui kegiatan gemar makan ikan. Hal lain yang juga dapat dilakukan adalah berkoordinasi dengan pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan Ditjen PDSPKP dalam finalisasi data AKI tahun 2025.

c) SASARAN 3

TERWUJUDNYA KAWASAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERKELANJUTAN

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja utama (IKU):

1. Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial

Rasio Kawasan Lindung Perairan terhadap Total Luas Perairan Teritorial adalah persentase luas kawasan yang dilindungi atau dikonservasi dalam wilayah perairan teritorial dibandingkan dengan total luas perairan teritorial Provinsi Sulawesi Tengah. Kawasan lindung perairan ini mencakup area yang diatur khusus untuk tujuan konservasi keanekaragaman hayati laut, pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan, dan perlindungan dari dampak perubahan iklim dan bencana alam. Indikator ini digunakan untuk menilai seberapa luas kawasan perairan yang telah dilindungi guna mendukung keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati di wilayah kelautan.

Adapun capaian untuk IKU ini adalah 0,1891 dari target 0,1866 dengan demikian prosentase realisasi terhadap indikator ini adalah 101,34% atau indikator ini telah melampaui target. Luas perairan Sulawesi Tengah sebesar 74.460,39 Km² dan luas kawasan konservasi sampai dengan tahun 2025 sebesar 14.082,92 Km². Beberapa hal yang menyebabkan pencapaian ini antara lain komitmen DKP Sulteng dalam melakukan kegiatan konservasi dan jumlah UPTD konservasi sebanyak 7 wilayah.

2. Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan merupakan pemenuhan persyaratan dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan diperoleh dari pengawasan yang dilakukan terhadap pelaku usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan dan pemanfaatan ruang laut.

Adapun capaian untuk IKU ini adalah 79,86 dari target 85,98 dengan demikian prosentase realisasi terhadap indikator ini adalah 92,88% atau indikator ini belum mencapai target. Selama tahun 2025 DKP Sulteng melakukan pengawasan terhadap 394 pelaku usaha kelautan dan perikanan, yang mana dari 394 pelaku usaha tersebut, sebanyak 321 yang patuh dan 73 tidak patuh. Sulawesi Tengah memiliki luas wilayah perairan yang cukup besar, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi DKP Sulteng dalam melakukan pengawasan karena kurangnya tenaga Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Sulawesi Tengah, kurangnya armada serta keterbatasan anggaran. Akan tetapi semua itu tidak menjadi penghalang bagi DKP Sulteng untuk terus melakukan kegiatan pengawasan, segala upaya terus dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan segala sumberdaya yang ada. Kegiatan-kegiatan sosialisasi dan pendampingan pun terus dilakukan sebagai salah satu langkah solusi untuk permasalahan ini.

2) *Perjanjian Kinerja Berdasarkan Renstra 2025-2029*

Secara keseluruhan capaian indikator kinerja DKP Sulteng tahun 2025 sebesar 95,67%. Dari 5 (lima) indikator yang ada semuanya belum mencapai target.

a) **SASARAN 1**

MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja utama (IKU):

1. Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Kesejahteraan masyarakat nelayan diartikan bahwa pengelolaan sumber daya ikan dilakukan untuk kepentingan kemakmuran rakyat, dalam hal ini DKP Sulteng senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh nelayan melalui program dan kegiatan pembangunan perikanan tangkap yang dilaksanakan.

Adapun capaian untuk IKU ini adalah 96,95 dari target 101,05, dengan demikian prosentase realisasi terhadap indikator ini adalah 95,94%. Hal ini menunjukkan bahwa indikator yang telah ditetapkan sebagai salah satu alat untuk mengukur capaian sasaran strategis ini belum mencapai target. Hal ini disebabkan oleh, antara lain: (1) fluktuasi hasil tangkapan karena faktor musim dan cuaca menyebabkan hasil tangkapan ikan menjadi tidak pasti, (2) keterbatasan infrastruktur dan teknologi, (3) biaya produksi yang tinggi, (4) optimalisasi potensi yang belum maksimal, dan (5) masalah illegal fishing. Sebagai langkah solusi kedepannya perlu dilakukan: (1) perbaikan teknologi penangkapan, (2) percepatan penyaluran bantuan dan distribusi lebih merata, (3) peningkatan kapasitas dan kemampuan nelayan agar produktivitas meningkat, dan (4) memperkuat kegiatan pengawasan.

2. Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur daya tukar hasil usaha budidaya dengan pemenuhan kebutuhan sehari-sehari dan biaya usaha budidayanya.

Adapun capaian untuk IKU ini adalah 92,06 dari target 101,03, dengan demikian prosentase realisasi terhadap indikator ini adalah 91,13%. Hal ini menunjukkan bahwa indikator yang telah ditetapkan sebagai salah satu alat untuk mengukur capaian sasaran strategis ini belum mencapai target. Hal ini disebabkan oleh, antara lain: (1) biaya produksi yang tinggi, (2) harga jual hasil panen yang relatif atau fluktuatif, (3) produktivitas yang rendah, dan (4) keterbatasan modal. Sebagai langkah solusi kedepannya perlu dilakukan upaya menjaga produktivitas pembudidaya sekaligus menjaga harga komoditas di tingkat pembudidaya tidak turun atau bahkan bisa naik dan menekan biaya yang dikeluarkan oleh pembudidaya.

3. Angka Konsumsi Ikan (AKI)

AKI adalah indikator rata-rata jumlah ikan yang dikonsumsi per orang per tahun (kg/kap/th) disuatu wilayah. Adapun capaian untuk IKU ini adalah 38,20 dari target 40,65 dengan demikian prosentase realisasi terhadap indikator ini adalah 93,97%. Ini menunjukkan bahwa indikator ini belum mencapai target.

Selama beberapa tahun terakhir nilai AKI Sulawesi Tengah selalu melampaui target daerah dan nasional. Tahun 2025 nilai AKI turun dikarenakan adanya perubahan rumus cara penghitungan, dimana beberapa komponen tidak lagi dihitung, selain itu nilai capaian ini juga masih merupakan angka sementara dimana saat ini nilai AKI masih dalam proses penghitungan. Capaian ini diperkirakan masih akan naik mengingat saat ini AKI masih dalam tahap finalisasi. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam menanggapi hal ini adalah dengan melakukan kordinasi pada

Kementerian Kelautan dan Perikanan Ditjen PDSPKP dalam finalisasi data AKI tahun 2025. Selain itu, secara teknis yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan kampanye protein ikan dan gerakan memasyarakatkan makan ikan dalam mendukung program makan bergizi melalui kegiatan gemar makan ikan.

b) SASARAN 2

TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KAWASAN SDKP YANG BERKELANJUTAN

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja utama (IKU):

1. Rasio Pemanfaatan Kawasan Perairan Terhadap Total Kawasan Perairan Teritorial

Rasio Pemanfaatan Kawasan Perairan terhadap total kawasan perairan teritorial adalah perbandingan antara luas kawasan yang dilindungi dan luas pemanfaatan ruang laut terhadap luas perairan teritorial suatu wilayah. Kawasan yang dilindungi meliputi luas padang lamun, hutan mangrove dan terumbu karang yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga keanekaragaman hayati dan sumber-sumber alam yang terkait, dikelola secara resmi dan efektif. Kawasan pemanfaatan ruang laut adalah area di wilayah laut yang dialokasikan dan diatur penggunaannya untuk berbagai kegiatan, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial, dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian lingkungan dan keberlanjutan. Ini mencakup berbagai aktivitas seperti perikanan, pariwisata bahari, transportasi, eksplorasi sumber daya, dan lain-lain, yang semuanya diatur dalam rencana tata ruang laut.

Adapun capaian untuk IKU ini adalah 0,1802 dari target 0,1803 dengan demikian prosentase realisasi terhadap indikator ini adalah 99,94% atau indikator ini belum mencapai target. Luas pemanfaatan lahan hingga tahun 2025 adalah 3.380,41 Ha, luas

kawasan konservasi 1.338.291,86 Ha (berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan) dan luas teritorial sebesar 7.445.237 Ha. Belum tercapainya indikator ini disebabkan oleh luasnya wilayah perairan Sulawesi Tengah, kurangnya SDM yang kompeten dan juga keterbatasan anggaran. Meskipun begitu DKP Sulteng terus berkomitmen dalam melakukan kegiatan konservasi dengan membentuk UPTD konservasi di 7 wilayah di Sulawesi tengah.

c) SASARAN 3

TERSELENGGARANYA PENGAWASAN SDKP BERDASARKAN REGULASI YANG BERLAKU

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja utama (IKU):

1. Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Peraturan Per UU

Persentase kepatuhan pelaku usaha Kelautan Perikanan (KP) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah hasil perhitungan kepatuhan pelaku usaha kelautan perikanan seperti nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah ikan, pemasar perikanan, penyedia jasa pengiriman produk kelautan dan perikanan.

Adapun capaian untuk indikator ini adalah 79,86 dari target 82,00 dengan demikian prosentase realisasi terhadap indikator ini adalah 97,39% atau indikator ini belum mencapai target. Selama tahun 2025 DKP Sulteng melakukan pengawasan terhadap 394 pelaku usaha kelautan dan perikanan, yang mana dari 394 pelaku usaha tersebut, sebanyak 321 yang patuh dan 73 tidak patuh. Sulawesi Tengah memiliki luas wilayah perairan yang cukup besar, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi DKP Sulteng dalam melakukan pengawasan karena kurangnya tenaga Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Sulawesi Tengah, kurangnya armada serta keterbatasan anggaran. Akan tetapi hal-

hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi DKP Sulteng untuk terus melakukan kegiatan pengawasan, segala upaya terus dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan segala sumberdaya yang ada. Kegiatan-kegiatan sosialisasi dan pendampingan pun terus dilakukan sebagai salah satu langkah solusi untuk permasalahan ini.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pencapaian sasaran strategis dengan pencapaian realisasi anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut.

Tabel 27. Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran Tahun 2025
Berdasarkan Renstra 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
1	Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan (SS 1)	80,91	75,74	93,61	17.441.107.529	15.766.676.478,50	90,40	3,21
	Nilai Tukar Nelayan (%)	101,05	96,95	95,94	10.928.681.644	9.964.598.274,50	91,18	4,76
	Nilai Tukar Pembudidaya (%)	101,03	92,06	91,13	4.493.601.602	3.984.577.578	88,67	2,46
	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Th)	40,65	38,20	93,97	2.018.824.283	1.817.500.626	90,03	3,94
2	Terwujudnya pengelolaan kawasan SDKP yang berkelanjutan (SS 2)	0,1803	0,1802	99,94	2.431.320.250	2.229.686.470	91,71	8,23
	Rasio pemanfaatan kawasan perairan terhadap total kawasan perairan teritorial	0,1803	0,1802	99,94	2.431.320.250	2.229.686.470	91,71	8,23
3	Terselenggaranya pengawasan SDKP berdasarkan regulasi yang berlaku (SS 3)	82,00	79,86	97,39	3.021.340.300,09	2.747.814.688,40	90,95	6,44
	Persentase tingkat kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan (%)	82,00	79,86	97,39	3.021.340.300,09	2.747.814.688,40	90,95	6,44

Sasaran strategis 1 (SS 1) didukung oleh 3 (tiga) program, yakni *program pengelolaan perikanan tangkap, program pengelolaan perikanan budidaya dan program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan*. SS 1 didukung anggaran sebesar Rp17.441.107.529,-. Efisiensi anggaran sasaran strategis ini sebesar 3,21 poin. Upaya pencapaian sasaran strategis ini didukung oleh SDM sebanyak 154 personil.

Sasaran strategis 2 (SS 2) didukung *program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil*. SS 2 didukung anggaran sebesar Rp2.431.320.250,-. Efisiensi anggaran sasaran strategis ini sebesar 8,23 poin. Upaya pencapaian sasaran strategis ini didukung oleh SDM sebanyak 46 personil.

Sasaran strategis 3 (SS 3) didukung oleh *program pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan*. SS 3 didukung anggaran Rp3.021.340.300,09,-. Efisiensi anggaran pada sasaran strategis ini adalah 6,44 poin. Upaya pencapaian sasaran strategis ini didukung oleh SDM sebanyak 23 personil.

Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menginstruksikan kepada semua perangkat daerah untuk menerapkan efisiensi anggaran, tidak terkecuali DKP Sulteng. Hal inilah yang menyebabkan anggaran tidak terserap dengan maksimal.

G. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan kinerja

Dalam pencapaian perjanjian kinerja, DKP Sulteng didukung oleh beberapa program, kegiatan dan anggaran. Adapun alokasi anggaran per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut.

1) Perjanjian Kinerja Berdasarkan Renstra 2025-2029

Dalam pencapaian perjanjian kinerja, DKP Sulteng didukung oleh beberapa program, kegiatan dan anggaran. Adapun alokasi anggaran per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 28. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tahun 2025

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
BIDANG PENGELOLAAN RUANG LAUT									
1	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terkelolanya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	Cakupan Wilayah Perairan dan Pesisir yang dikelola secara berkelanjutan (%)	17,9872	1.878.064.650	17,9757	1.721.979.370	77,00	91,69
	Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Terkelolanya Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luas kawasan ruang laut sampai dengan 12 mil yang dikelola (Ha)	671.988,45	1.550.515.000	671.988,45	1.402.547.000	100	90,46
	Keg. Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil Diluar Minyak dan Gas Bumi yang difasilitasi perizinannya	Persentase Arah Pemanfaatan Ruang Laut Dibawah 12 Mil Diluar Minyak dan Gas Bumi yang Difasilitasi (%)	100	91.493.750	100	83.823.490	100	91,62
	Keg. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat pesisir dan PPK	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang terbina di WP3K (%)	10	236.055.900	10	235.608.880	100	99,81
BIDANG PERIKANAN TANGKAP									
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Produksi Perikanan tangkap (ton)	277.364,94	9.949.714.600	300.253,60	9.081.197.219	108,25	91,27
	Keg. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Meningkatnya produksi perikanan tangkap Di Laut	Produksi Perikanan Tangkap Di Laut (ton)	274.296,14	8.781.981.600	300.253,60	8.103.149.968	109,46	92,27
	Keg. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Meningkatnya unit usaha perikanan tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT yang difasilitasi perizinannya	Persentase penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT yang difasilitasi (%)	100	467.733.000	100	324.301.740	100	69,33
	Keg. Penetapan lokasi pembanguna serta pengolahan pelabuhan perikanan Provinsi	Terwujudnya pengembangan pelabuhan perikanan kewenangan provinsi yang ditetapkan	Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan (%)	25	700.000.000	25	653.745.511	100	93,39
BIDANGNG PERIKANAN BUDIDAYA & P2HP									
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	818.643,76	3.435.266.602	548.733,77	2.950.584.347	67,03	85,89
	Keg. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Meningkatnya Produksi budidaya ikan di laut	produksi budidaya ikan di laut (ton)	787.469,67	911.088.650	512.306,47	861.913.750	65,06	94,60
	Keg. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Meningkatnya Produksi budidaya ikan di darat	produksi budidaya ikan di darat (ton)	31.174,09	2.524.177.952	36.427,30	2.042.348.847	116,85	80,91
4	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya serapan produksi perikanan tangkap.	Produksi perikanan tangkap, budidaya dan olahan yang dikonsumsi (ton)	232.770,57	1.779.298.748	215.963,53	1.615.463.416	92,78	90,79

		budidaya dan olahan							
	Keg.Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya unit usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang difasilitasi perizinannya	Persentase izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang difasilitasi perizinannya (%)	100	54.904.500	100	54.535.000	100	99,33
	Keg.Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Meningkatnya jumlah produksi ikan	Jumlah Usaha Pengolahan dan Pemasaran yang dibina mutu dan keamanan hasil perikanan (unit)	50	1.023.886.943	20	894.432.616	40	87,36
			Produksi Perikanan Olahan (kg)	6.855.712		6.856.660,95		100,01	
	Keg. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya mutu produk perikanan binaan	Rasio bahan baku industri pengolahan yang memenuhi standar jaminan mutu dan keamanan pangan	0,5	700.507.305	0,5	666.495.800	100	95,14
BIDANG PENGAWASAN SDKP									
5	Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha yang diperiksa	Persentase pelaku usaha yang diperiksa kepatuhannya (%)	50	3.021.340.300,09	50	2.747.814.688,40	100	90,95
		Meningkatnya kasus pelanggaran KP yang tertangani	Persentase Tertanganinya pelanggaran KP (%)	100		100		100	
		Meningkatnya Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Persentase POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan (%)	70		70		100	
	Keg. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terawasinya Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah pelaku usaha Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil yang diawasi (pelaku usaha)	335	2.944.514.300,09	354	2.696.645.688,40	105,67	91,58
	Keg.Pengawasan Sumber Perikanan di wilayah sungai, Danau,Waduk,Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terawasinya Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha Kelautan dan Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang diawasi (pelaku usaha)	40	76.826.000	40	51.169.000	100	66,60
UPTD BALAI BENIH PERIKANAN									
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya PAD	PAD (Rp1.000)	1.620.000	1.058.335.000	775.935	1.033.993.231	47,90	97,70
	Keg. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Meningkatnya produksi benih perikanan air payau dan tawar	Produksi budidaya (kg)	22.200	1.058.335.000	15.870	1.033.993.231	71,49	97,70
			Produksi benih (juta ekor)	3,58		3,06		85,39	
UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN									
	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya serapan standar mutu perikanan	Persentase UMKM binaan yang telah menerapkan standar mutu hasil perikanan (%)	80	239.525.535	50	202.037.210	62,50	84,35
			Persentase pelaku usaha KP yang menerapkan	48		48		100	

			Standar Mutu Perikanan (%)						
	Keg. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Meningkatnya penerapan Inovasi	Inovasi yang diterapkan (inovasi)	1	239.525.535	1	202.037.210	100	84,35
UPTD PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH I									
	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terkelolanya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wil I	47	25.812.750	47,42	21.585.350	100,89	83,62
	Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan konservasi secara keberlanjutan	Cakupan kawasan konservasi yang dikelola secara keberlanjutan (%)	52	25.812.750	52	21.585.350	100	83,62
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya PAD	PAD (Rp1.000)	1.063.274	380.911.100	1.081.113	366.492.279,50	101,68	96,21
	Keg. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Meningkatnya produksi ikan	Produksi Ikan yang didaratkan (Kg)	2.025.844	380.911.100	1.329.359	366.492.279,50	65,62	96,21
UPTD PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH II									
	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terkelolanya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wil II	55	157.729.000	55	145.695.800	100	92,37
	Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan konservasi secara keberlanjutan	Cakupan kawasan konservasi yang dikelola secara keberlanjutan (%)	52	157.729.000	52,18	145.695.800	100,35	92,37
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya PAD	PAD (Rp1.000)	1.089.957	33.997.400	402.278	33.920.000	36,91	99,97
	Keg. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Meningkatnya produksi ikan	Produksi Ikan yang didaratkan (Kg)	1.929.495	33.997.400	1.827.104	33.920.000	94,69	99,97
UPTD PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH III									
	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terkelolanya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wil III	54	24.663.800	62,08	23.861.400	114,96	96,75
	Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan konservasi secara keberlanjutan	Cakupan kawasan konservasi yang dikelola secara keberlanjutan (%)	52	24.663.800	52	23.861.400	100	96,75
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya PAD	PAD (Rp1.000)	491.000	160.308.388	502.906	158.946.838	102,42	99,15
	Keg. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Meningkatnya produksi ikan	Produksi Ikan yang didaratkan (Kg)	673.655	160.308.388	407.339	158.946.838	60,47	99,15
UPTD PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH IV									
	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terkelolanya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wil IV	55	49.814.750	55	39.244.250	100	78,78
	Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan konservasi secara keberlanjutan	Cakupan kawasan konservasi yang dikelola secara keberlanjutan (%)	52	49.814.750	52	39.244.250	100	78,78
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya PAD	PAD (Rp1.000)	226.720	254.181.156	250.965	44.031.338	110,69	17,32
	Keg. Penetapan Lokasi	Meningkatnya	Produksi Ikan yang	1.532.462	254.181.	1.051.32	44.031.3	68,60	17,32

	Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	produksi ikan	didaratkan (Kg)		156	8	38		
UPTD PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH V									
	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terkelolanya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wil V	45	19.670.000	52	19.490.000	115,56	99,08
	Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	meningkatnya kulaitas pengelolaan kawasan konservasi secara keberlanjutan	Cakupan kawasan konservasi yang dikelola secara keberlanjutan (%)	52	19.670.000	52	19.490.000	100	99,08
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya PAD	PAD (Rp1.000)	1.099.728	8.970.000	609.085	8.970.000	55,39	100
	Keg. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Meningkatnya produksi ikan	Produksi Ikan yang didaratkan (Kg)	1.200.000	8.970.000	471.606	8.970.000	39,30	100
UPTD PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH VI									
	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terkelolanya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wil VI	50	169.315.300	62	151.630.300	124,16	89,55
	Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	meningkatnya kulaitas pengelolaan kawasan konservasi secara keberlanjutan	Cakupan kawasan konservasi yang dikelola secara keberlanjutan (%)	52	169.315.300	52	151.630.300	100	89,55
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya PAD	PAD (Rp1.000)	483.687	76.475.000	514.663	73.015.000	106,40	95,48
	Keg. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Meningkatnya produksi ikan	Produksi Ikan yang didaratkan (Kg)	50.000	76.475.000	1.374.607	73.015.000	2.749,21	95,48
UPTD PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH VII									
	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terkelolanya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wil VII	60	106.250.000	72,69	106.200.000	121,15	99,95
	Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	meningkatnya kulaitas pengelolaan kawasan konservasi secara keberlanjutan	Cakupan kawasan konservasi yang dikelola secara keberlanjutan (%)	52	106.250.000	51	106.200.000	100	99,95
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Terlaksananya pelayanan di Pelabuhan Perikanan	Persentase peningkatan pelayanan kepelabuhanan (%)	100	64.124.000	100	63.645.000	100	99,25
	Keg. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Meningkatnya produksi ikan	Produksi Ikan yang didaratkan (Kg)	45.000	64.124.000	42.492	63.645.000	94,43	99,25

Dalam mencapai sasaran strategis 1 (SS1) *meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan*, didukung anggaran sebesar Rp17.441.107.529 dan teralisasi Rp15.766.676.478,50 atau sebesar 90,40%.

Untuk mencapai sasaran strategis 2 (SS2) *terwujudnya pengelolaan kawasan SDKP yang berkelanjutan*, mendapat dukungan anggaran

Rp2.431.320.250,- dan teralisasi Rp2.229.686.470,- atau sebesar 91,71%.

Untuk mencapai sasaran strategis 3 (SS3) *terselenggaranya pengawasan SDKP berdasarkan regulasi yang berlaku*, dukungan anggaran sebesar Rp3.021.340.300,09,- dan teralisasi Rp2.747.814.688,40,- atau sebesar 90,95%.

3.2 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2025 DKP Sulteng mendapat alokasi anggaran (APBD) sebesar Rp56.640.850.389,24,- dan sampai dengan 31 Desember 2025, terealisasi sebesar Rp50.618.857.700,90,- atau sebesar 89,37%. Untuk realisasi fisik sebesar 100%. Secara keseluruhan kegiatan-kegiatan prioritas tahun 2025 semua terealisasi. Sisa anggaran merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) berasal dari sisa gaji, perjalanan dinas, sisa kontrak, sisa pembayaran listrik dan air. Adapun rekapitulasi APBD yang diterima DKP Sulteng untuk belanja langsung tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 29. Pagu dan Realisasi Anggaran per Jenis Belanja TA. 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulteng

No	Program/ Kegiatan	Alokasi Biaya		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
SEKRETARIAT				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.570.608.912,27	22.551.858.036,00	84,88
	Keg. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	298.315.750,00	266.767.780,00	89,42
	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.292.512.145,06	19.488.231.321,00	64,61
	Keg. Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	55.377.500,00	46.045.000,00	83,15
	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.024.678.988,21	919.042.889,00	89,69
	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.295.346.424,00	1.232.374.870,00	54,08
	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	604.378.105 ,00	599.396.176,00	99,18
BIDANG PENGELOLAAN RUANG LAUT				
2	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.878.064.650,00	1.821.324.370,00	96,98
	Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1.550.515.000,00	1.501.892.000,00	96,86
	Keg. Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	91.493.750,00	83.823.490,00	91,62
	Keg. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	236.055.900,00	235.608.880,00	99,81
BIDANG PERIKANAN TANGKAP				
3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	9.949.714.600,00	9.081.197.219,00	91,27
	Keg. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	8.781.981.600,00	8.103.149.968,00	92,27
	Keg. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	467.733.000,00	324.301.740,00	69,33
	Keg. Penetapan lokasi pembanguna serta pengolahan pelabuhan perikanan Provinsi	700.000.000,00	653.745.511,00	93,39
BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA & P2HP				
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.435.266.602,00	3.237.246.647,00	92,44
	Keg. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	911.088.650,00	861.913.750,00	94,60

	Keg. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	2.524.177.952,00	2.375.332.897,00	94,10
4	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.779.298.748,00	1.615.463.416,00	90,79
	Keg. Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	54.904.500,00	54.535.000,00	99,33
	Keg. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1.023.886.943,00	894.432.616,00	87,36
	Keg. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	700.507.305,00	666.495.800,00	95,14
BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				
5	Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	3.021.340.300,09	2.747.814.688,40	90,95
	Keg. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	2.944.514.300,09	2.696.645.688,40	91,58
	Keg. Pengawasan Sumber Perikanan di wilayah sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	76.826.000,00	51.169.000,00	66,60
UPTD BALAI PERBENIHAN PERIKANAN				
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.420.181.855,48	1.288.368.038,00	90,72
	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	74.120.000,00	74.120.000,00	100
	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.470.529,48	59.997.500,00	99,22
	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.028.996.132,00	1.028.977.838,00	100
	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.297.597,00	125.272.700,00	97,64
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.058.335.000,00	1.033.993.231,00	97,70
	Keg. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	1.058.335.000,00	1.033.993.231,00	97,70
UPTD PEMBINAAN MUTU HASIL PERIKANAN				
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	477.274.700,00	451.611.997,00	94,62
	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	63.720.000,00	63.720.000,00	100
	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.754.750,00	15.283.250,00	97,01
	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	336.084.250,00	316.227.058,00	94,09
	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.715.700,00	56.381.689,00	91,36
	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	239.525.535,00	202.037.210,00	84,35
	Keg. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	239.525.535,00	202.037.210,00	84,35
UPTD PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH I				
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	978.811.980,00	966.324.132,00	98,72
	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48.613.800,00	39.897.700,00	82,07
	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	63.356.040,00	60.645.972,00	95,72
	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	790.972.140,00	790.655.460,00	99,96
	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.870.000,00	75.125.000,00	99,02
	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	25.812.750,00	21.585.350,00	83,62
	Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	25.812.750,00	21.585.350,00	83,62
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	380.911.100,00	366.492.279,50	96,21
	Keg. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	380.911.100,00	366.492.279,50	96,21
UPTD PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH II				
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.088.437.456,00	1.069.232.030,00	98,24
	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	73.810.000,00	73.590.000,00	99,70
	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	72.191.950,00	72.129.500,00	99,91
	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	687.841.743,00	672.226.980,00	97,73
	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	254.593.763,00	251.285.550,00	98,70
	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	157.729.000,00	145.695.800,00	92,37
	Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	157.729.000,00	145.695.800,00	92,37
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	33.997.400,00	33.920.000,00	99,77
	Keg. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	33.997.400,00	33.920.000,00	99,77
UPTD PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH III				
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	887.641.018,40	876.709.149,00	98,77
	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.920.000,00	22.920.000,00	100
	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	92.364.429,00	91.917.049,00	99,52
	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	653.340.644,40	645.056.870,00	98,73

	Daerah			
	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.015.945,00	116.815.230,00	98,15
	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	24.663.800,00	23.861.400,00	96,75
	Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	24.663.800,00	23.861.400,00	96,75
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	160.308.388,00	158.946.838,00	99,15
	Keg. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	160.308.388,00	158.946.838,00	99,15
UPTD PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH IV				
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	481.864.780,00	456.757.411,00	94,79
	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	82.915.000,00	79.998.960,00	96,48
	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	44.065.450,00	43.882.521,00	99,58
	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	316.839.680,00	301.684.830,00	95,22
	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.044.650,00	31.191.100,00	81,99
	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	49.814.750,00	39.244.250,00	78,78
	Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	49.814.750,00	39.244.250,00	78,78
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	254.181.156,00	232.911.938,00	91,63
	Keg. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	254.181.156,00	232.911.938,00	91,63
UPTD PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH V				
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.068.622.600,00	926.477.040,00	86,70
	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	64.560.000,00	64.560.000,00	100
	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.105.200,00	39.017.000,00	99,77
	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	762.175.800,00	621.382.391,00	81,53
	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	202.781.600,00	201.517.649,00	99,38
	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	19.670.000,00	19.490.000,00	99,08
	Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	19.670.000,00	19.490.000,00	99,08
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	8.970.000,00	8.970.000,00	100
	Keg. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	8.970.000,00	8.970.000,00	100
UPTD PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH VI				
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	715.146.125,00	666.133.629,00	93,15
	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	104.340.000,00	90.790.000,00	87,01
	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	196.650.615,00	193.797.627,00	98,55
	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	378.933.510,00	348.124.032,00	91,87
	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.222.000,00	33.421.970,00	94,89
	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	169.315.300,00	151.630.300,00	89,55
	Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	169.315.300,00	151.630.300,00	89,55
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	76.475.000,00	73.015.000,00	95,48
	Keg. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	76.475.000,00	73.015.000,00	95,48
UPTD PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH VII				
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	186.790.480,00	180.701.302,00	96,74
	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33.736.765,00	33.736.765,00	100
	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.181.525,00	9.177.037,00	99,95
	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.682.190,00	76.782.190,00	92,86
	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.190.000,00	61.005.310,00	99,70
	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	106.250.000,00	106.200.000,00	99,95
	Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	106.250.000,00	106.200.000,00	99,95
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	64.124.000,00	63.645.000,00	99,25
	Keg. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	64.124.000,00	63.645.000,00	99,25
	JUMLAH	56.640.850.389,24	50.618.857.700,90	89,37

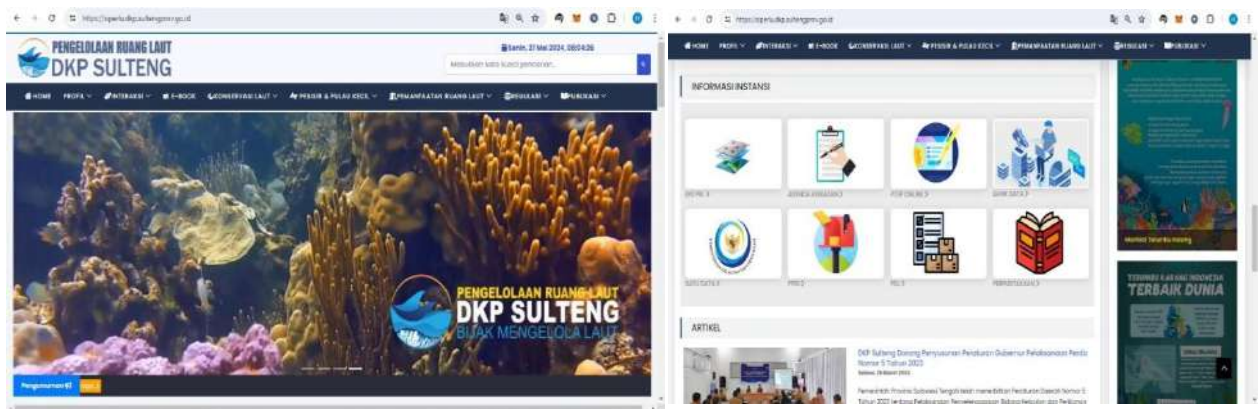
3.3 Inovasi

Inovasi DKP Sulteng tahun 2025 masih sama dengan tahun sebelumnya, yakni pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Ruang Laut dan Pengelolaan Sampah Laut Menjadi Bahan Bakar Minyak (BBM).

A. Sistem Informasi Pengelolaan Ruang Laut (SIPERLU)

Sejak pembuatan pada tahun 2022 dan penggunaan di tahun 2023, DKP Sulteng terus melakukan pengembangan pada inovasi berbasis web Sistem Informasi Pengelolaan Ruang Laut. Sistem ini menyajikan informasi mengenai (1) pemanfaatan ruang laut, (2) konservasi, pelestarian dan perlindungan kawasan perairan, dan (3) pemberdayaan masyarakat pesisir.

Tujuan dari inovasi ini adalah untuk memudahkan masyarakat umum dalam mengakses data mengenai pengelolaan ruang laut di Sulawesi Tengah, dimana pengguna bisa mendapatkan informasi tanpa harus datang langsung ke DKP Sulteng. Sistem informasi ini terintegrasi langsung dengan website DKP Sulteng berupa link yang disediakan untuk dapat mengakses sistem informasi ini.



Gambar 8. Halaman Depan Sistem Informasi Pengelolaan Ruang Laut

B. Pengelolaan Sampah Laut menjadi BBM,

Tahun 2023 DKP Sulteng melalui Bidang Pengelolaan Ruang Laut menginisiasi pelatihan inovasi mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar dimana BBM yang dihasilkan dapat digunakan oleh nelayan untuk melaut. Yang menjadi sasaran pelatihan tersebut adalah perwakilan

masyarakat, kelompok masyarakat, aparat desa dan puskesmas di 12 kab/kota di Sulawesi Tengah. Setelah melakukan pelatihan, maka pada tahun 2024 dibuat replika pengelolaan sampah laut ini di Kota Palu yang terus beroperasi sampai saat ini.

Pengolahan sampah plastik menjadi BBM dilakukan menggunakan metode pirolisis, yaitu proses degradasi suatu material dengan suplai panas yang berjalan tanpa melibatkan oksigen atau dengan oksigen namun dengan jumlah sangat sedikit menghasilkan produk dalam bentuk padat, cair, dan gas. Pada metode ini, selama pirolisis, plastic akan terurai menjadi uap. Uap yang dihasilkan akan melewati kondensor dan mendingin atau mengubahnya menjadi cairan. Cairan tersebut akan menetes dan ditampung didalam wadah dan menjadi BBM yang dapat digunakan. Tabung pertama akan menghasilkan solar, tabung dua menghasilkan minyak tanah dan tabung tiga menghasilkan bensin.

Peralatan yang digunakan cukup sederhana, yaitu: tabung reactor untuk melakukan proses pirolisis pada sampah plastik (tabung bekas Freon Ac), system pemanas api (tungku/blower api), pipa kondesor dan wadah/botol penyimpanan. Sedangkan bahan yang digunakan adalah sampah plastik berupa botol plastic, kantong plastik, dan potongan-potongan plastik lainnya (umumnya plastik PP/HDPE) yang telah dikecilkan ukurannya dengan cara dicacah. Bahan lain yaitu air pendingin untuk mendinginkan pipa.

Pengolahan sampah plastik dengan cara ini dapat mengatasi dua permasalahan penting yaitu pencemaran sampah plastik dan pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar minyak yang dapat dipergunakan untuk perahu nelayan. Bahkan dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi serta membuka lapangan kerja. Inovasi ini sudah dilakukan dan produk BBMnya sudah digunakan oleh nelayan di beberapa lokasi di Kota Palu.



Gambar 9. Replika Alat Pirolisis Sampah Plastik Menjadi BBM

3.4 Penghargaan

Selama tahun 2025 DKP Sulteng mendapat penghargaan berupa:

1. Penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atas prestasi dalam Akuntabilitas Kinerja terbaik Tahun 2025 dengan predikat A dengan nilai 83,40.

Evaluasi AKIP dilakukan setiap tahun oleh Inspektorat Daerah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan oleh instansi pemerintah, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP secara konsisten dan berkelanjutan.

Pencapaian hasil evaluasi AKIP DKP Sulteng terus meningkat setiap tahunnya, ini merupakan bentuk upaya peningkatan kinerja yang terus dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintah yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.



Gambar 10. Penghargaan SAKIP A DKP Sulteng Tahun 2025

2. Penghargaan atas penganugerahan keterbukaan informasi publik tahun 2025, DKP Sulteng meraih peringkat 1 kategori informatif. Penilaian dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kepada seluruh perangkat daerah di lingkup Provinsi Sulawesi Tengah.



Gambar 11. Penganugerahan Informasi Publik 2025

3. Penghargaan Penilaian Evaluasi Kinerja PIPP (Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan), selama tahun 2025 Pelabuhan Perikanan Donggala (salah satu UPTD pada DKP Sulteng) dinilai **sangat baik** dengan nilai evaluasi jika dirata-ratakan dari bulan Januari sampai dengan Desember **89,42**. Penilaian dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kepelabuhanan Perikanan kepada sebanyak 271 pelabuhan perikanan di Indonesia. Penilaian dilakukan dengan memperhatikan 27 kriteria pada pelabuhan perikanan.



Gambar 12. Sertifikat Penghargaan PPI Donggala 2025

BAB IV

P E N U T U P

4.1. Kesimpulan

Untuk perjanjian kinerja awal (berdasarkan Renstra 2021-2026), secara umum realisasi kinerja tercapai 84,49% sedangkan untuk perjanjian kinerja perubahan (berdasarkan Renstra 2025-2029) realisasi kinerja tercapai 95,35%. Capaian yang disampaikan pada laporan inipun masih merupakan angka sementara dimana masih ada beberapa data yang belum masuk atau belum selesai proses penghitungannya. Nilai capaian tersebut diprediksi masih akan meningkat seiring dengan selesainya kegiatan pengumpulan dan penghitungan data.

Tahun 2025 DKP Sulteng didukung oleh anggaran APBD sebesar Rp56.640.850.389,24 dimana sampai dengan 31 Desember 2025 teralisasi 89,37% atau sebesar Rp50.618.857.700,90.

4.2. Saran/Strategi Kedepannya Untuk Meningkatkan Kinerja

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan, maka sinergitas antara pusat dan daerah, antar bidang dan UPTD serta peran serta dari seluruh stakeholders terkait dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan sangat diperlukan. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah:

1. Peningkatan SDM melalui penerapan pemberian reward dan punishment, serta melakukan evaluasi kinerja pegawai,
2. Terus melakukan promosi gemar makan ikan kepada masyarakat,
3. Pengembangan inovasi dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan untuk peningkatan produktivitas secara berkelanjutan.

*) Angka sementara

L A M P I R A N



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. MOH. ARIF LATJUBA, SE, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : ANWAR HAFID
Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 15 September 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR SULAWESI TENGAH



ANWAR HAFID

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



H. MOH. ARIF LATJUBA, SE, M.Si
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19660418 199203 1 009

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Nilai Tukar Nelayan (%)	101,05
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (%)	101,03
		Angka Konsumsi Ikan (kg/perkapita/tahun)	40,65
2.	Terwujudnya Pengelolaan Kawasan SDKP yang berkelanjutan	Rasio Pemanfaatan Kawasan Perairan terhadap total kawasan perairan teritorial	0,1803
3.	Terselenggaranya Pengawasan SDKP berdasarkan regulasi yang berlaku	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap Peraturan Per UU (%)	82

PROGRAM	ANGGARAN	KET
Dinas Kelautan dan Perikanan		
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 34.797.436.876,60	APBD
2 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 11.042.854.356,00	APBD
3 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 4.072.288.715,00	APBD
4 Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp. 2.091.334.565,00	APBD
5 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp. 2.689.959.550,00	APBD
6 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 1.428.557.984,00	APBD

Palu, 15 September 2025

PIHAK KEDUA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH


ANWAR HAFID

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


H. MOH. ARIF LATJUBA, SE, M.Si
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19660418 199203 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Saprudin, S.Sos
Jabatan : Sekretaris
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. Moh. Arif Latjuba, SE,M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
Pihak Pertama berjanji:

1. mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Kelautan
dan Perikanan



H. Moh. Arif Latjuba, SE,M.Si
NIP. 19660418 199203 1 009

PIHAK PERTAMA

Sekretaris

Saprudin, S.Sos
NIP. 19700504 199103 1 00

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kelautan dan Perikanan	Indeks Reformasi Birokrasi PD	68
	Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengukuran, evaluasi & pelaporan kinerja	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	83
		Persentase capaian IKU Perangkat Daerah	100
	Tersusunya Laporan Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11
	Tersusunya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1
	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindaklanjut Hasil	Persentasi Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	100
		Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah	97
	Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1
		Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	75
		Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah	60
		Nilai hasil Survey Implementasi ASN BerAKHLAK	50
	Meningkatnya pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI)	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	1
		Persentase Tindaklanjut Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor	100
		Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI	60
	Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Penerapan SPBE pada Perangkat Daerah	2.5
	Meningkatnya pengawasan kearsipan internal	Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah	50
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1

		Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi	83.5
	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1
		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp26.570.608.912,27	APBD
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.298.315.750	APBD
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp134.203.750	APBD
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp164.112.000	APBD
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp23.292.512.145,06	APBD
c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp55.377.500	APBD
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp1.024.678.988	APBD
e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.295.346.424	APBD
f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp604.378.105	APBD

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Kelautan

dan Perikanan



H. Moh. Arif Latjuba, SE, M.Si

NIP. 19660418 199203 1 009

PIHAK PERTAMA

Sekretaris

Sapudin, S.Sos

NIP. 19700504 199103 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : :

Nama : Muh. Ilham Afandi H. Unus, S.IP, M.AP
Jabatan : Kasubag Keuangan dan Aset
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Saprudin, S.Sos
Jabatan : Sekretaris
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

1. mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Sekretaris



Saprudin, S.Sos

NIP. 19700504 199103 1 008

PIHAK PERTAMA

Kasubag Keuangan dan Aset

Muh. Ilham A.H. Unus, S.IP, M.AP

NIP. 19910429 201406 100

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terdistribusinya pembayaran Gaji, Tunjangan dan TPP. (Tersusunnya Dokumen usulan gaji dan tunjangan ASN)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (org/bulan)	214
2	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1
3	Terverifikasinya Dokumen Pertanggung Jawaban Terverifikasinya Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (laporan)	1
4	Tersusunnya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	1
5	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	1

Sub Kegiatan:

Anggaran

Keterangan

- | | | |
|---|---------------------|------|
| 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rp22.708.098.270,06 | APBD |
| 2. Sub Kegiatan Penyediaan Pelaksanaan Tugas ASN | Rp454.640.000 | APBD |
| 3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Rp3.900.000 | APBD |
| 4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Rp55.327.750 | APBD |
| 5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / semesteran SKPD | Rp70.246.125 | APBD |

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Sekretaris



Sa. P. Udin, S.Sos
NIP. 19700504 199103 1 008

PIHAK PERTAMA

Kasubag Keuangan dan Aset

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ilham', is written over a faint circular stamp.

Muh. Ilham A.H. Unus, S.IP, M.AP
NIP. 19910429 201406 10



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Afiyah, S.Pi
Jabatan : Kasubag Kepegawaian dan Umum
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Saprudin, S.Sos
Jabatan : Sekretaris
selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

1. mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Sekretaris

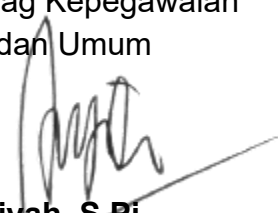


Sapudin, S. Sos

NIP. 19700504 199103 1 008

PIHAK PERTAMA

Kasubag Kepegawaian
dan Umum



Afiyah, S.Pi

NIP. 197709142009012005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3
2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1
3	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1
4	Tersedianya Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1
5	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1
6	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1
7	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	48
8	Terpeliharanya Peralatan kantor dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	48
9	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	1

Sub Kegiatan:

	Anggaran	Keterangan
1. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Rp55.377.500	APBD
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp821.944.538	APBD
3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp97.618.450	APBD

4.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp105.116.000	APBD
5.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp590.164.424	APBD
6.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp705.182.000	APBD
7.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp354.800.000	APBD
8.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp175.945.605	APBD
9.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp73.632.500	APBD

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Sekretaris



Sapudin, S.Sos
NIP. 19700504 199103 1 008

PIHAK PERTAMA
Kasubag Kepegawaian
dan Umum

Afiyah, S.Pi
NIP. 197709142009012005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herdyanto, S.STPi, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Perikanan Tangkap
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. Moh. Arif Latjuba, SE., M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
Pihak Pertama berjanji:

1. mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan



H. Moh. Arif Latjuba, SE., M.Si
NIP. 19660418 199203 1 009

PIHAK PERTAMA

Kepala Bidang Perikanan Tangkap

Herdyanto, S.STPi, M.Si
NIP. 19760918 200012 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Produksi Perikanan tangkap (ton)	104
a.	Meningkatnya produksi perikanan tangkap Di Laut	Produksi Perikanan Tangkap Di Laut (ton)	274.296.14
	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)	1
	Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	240
b.	Meningkatnya unit usaha perikanan tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT yang difasilitasi perizinannya	Persentase penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT yang difasilitasi	100
	Tertetapkannya Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia	1
c.	Terwujudnya pengembangan pelabuhan perikanan kewenangan provinsi yang ditetapkan	Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan	25
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (unit)	2

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp9.949.714.600	APBD
a. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Rp8.781.981.600	APBD
Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Rp472.640.000	APBD
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Rp8.309.341.600	APBD
b. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Rp467.733.000	APBD
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Rp467.733.000	APBD
c. Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Rp700.000.000	APBD
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Rp700.000.000	APBD

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Kelautan dan Perikan

Tangkap



H. Moh. Arif Latjuba, SE., M.Si
NIP. 19660418 199203 1 009

PIHAK PERTAMA

Kepala Bidang Perikanan

Herdyanto, S.STPi, M.Si
NIP. 19760918 200012 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Syafar, S.Pi
Jabatan : Kepala Bidang Budidaya & P2HP
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : H. Moh. Arif Latjuba, SE., M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
Pihak Pertama berjanji:

1. mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Dinas Kelautan
P2HP



H. Moh. Arif Latjuba, SE., M.Si
NIP. 19660418 199203 1 009

PIHAK PERTAMA
Kepala Bidang Budidaya &

Mohammad Syafar, S.Pi
NIP. 19690502 200012 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	818.643,76
a.	Meningkatnya Produksi budidaya ikan di laut	produksi budidaya ikan di laut	787.469,67
	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut (unit)	1
	Tersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	5
b.	Meningkatnya Produksi budidaya ikan di darat	produksi budidaya ikan di darat (ton)	31.174.09
	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Perikanan Darat	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5
	Terlatihnya kelompok pembudidaya Perikanan Darat	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1
2	Meningkatnya serapan produksi perikanan tangkap, budidaya dan olahan	Produksi perikanan tangkap, budidaya dan olahan yang dikonsumsi (ton)	232.770.57
a.	Meningkatnya Unit Pengolah Ikan (UPI) yang tersertifikasi	Persentase izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang difasilitasi perizinannya	100
	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	1

No	Sasaran Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Tertetapkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	1
b.	Tersedianya Data Usaha Pengolahan dan Pemasaran yang dibina mutu dan keamanan hasil perikanannya	Jumlah Usaha Pengolahan dan Pemasaran yang dibina mutu dan keamanan hasil perikanannya	50
	Meningkatnya jumlah produksi ikan	Produksi Perikanan Olahan	6.855.712
	Terlaksananya Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	5
c.	Meningkatnya mutu produk perikanan binaan	Rasio bahan baku industri pengolahan yang memenuhi standar jaminan mutu dan keamanan pangan	0,5
	Tersusunnya Dokumen Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (dokumen)	1
	Tersedianya Sarana dan Prasarana bagi Unit Usaha Perikanan	jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi (unit usaha)	7

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp3.435.266.602	APBD
a. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Rp911.088.650	APBD
Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Rp405.737.050	APBD
Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Rp505.351.600	APBD
b. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di darat	Rp2.524.177.952	APBD
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.473.425.202	APBD
Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp50.752.750	APBD
2 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp1.779.298.748	APBD
a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp54.904.500	APBD
Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp12.170.000	APBD
Sub Kegiatan Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	Rp42.734.500	APBD
b. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Rp1.023.886.943	APBD
Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Rp1.023.886.943	APBD
c. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kotadalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp700.507.305	APBD
Sub Kegiatan Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp137.148.795	APBD

Sub Kegiatan Pemberian Insentif dan Fasilitas
bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Rp563.358.510 APBD

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Dinas Kelautan
dan Perikanan



H. Moh. Arif Latjuba, SE., M.Si
NIP. 19660418 199203 1 009

PIHAK PERTAMA
Kepala Bidang Budidaya & P2HP

Mohammad Syafar, S.Pi
NIP. 19690502 200012 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abd. Rasyid, A.Pi, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : H. Moh. Arif Latjuba, SE, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
Pihak Pertama berjanji:

1. mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Kelautan
dan Perikanan



H. Moh. Arif Latjuba, SE, M.Si
NIP. 19660418 199203 1 009

PIHAK PERTAMA

Kepala Bidang Pengelolaan
Ruang Laut

Abd. Rasyid, A.Pi, M.Si
NIP. 19730105 199803 1 00

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terkelolanya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	Cakupan Wilayah Perairan dan Pesisir yang dikelola secara berkelanjutan	17.9872
a.	Terkelolanya Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luas kawasan ruang laut sampai dengan 12 mil yang dikelola	671.988,45
	Terlindunginya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terlindungi (Ha)	668.757,00
	Terehabilitasinya Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Ha)	3231,45
b.	Meningkatnya Kualitas Arahan Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil Diluar Minyak dan Gas Bumi yang diterbitkan	Persentase Arahan Pemanfaatan Ruang Laut Dibawah 12 Mil Diluar Minyak dan Gas Bumi yang Difasilitasi (%)	100
	Tersedianya Laporan database perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan	Jumlah database perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan	1
c.	Meningkatnya pemberdayaan kelompok masyarakat pesisir dan PPK	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang terbina di WP3K (%)	10
	Terbentuknya Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (kelompok)	3
	Terlibatnya Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (orang)	150

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Program Pengelolaan Kelautan, pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp1.878.064.650	APBD
Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Rp1.550.515.000	APBD
Sub Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Rp109.730.000	APBD
Sub Kegiatan Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp1.440.785.000	APBD
Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Rp91.493.750	APBD
Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan Berusaha	Rp219.535.000	APBD
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp236.055.900	APBD
Sub Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp97.555.000	APBD
Sub Kegiatan Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan dan pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp138.500.900	APBD

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Kelautan
dan Perikanan



H. Mor. Ari Latjuba, SE, M.Si
NIP. 19660418 199203 1 009

PIHAK PERTAMA

Kepala Bidang Pengelolaan
Ruang Laut

Abd. Rasyid, A.Pi, M.Si
NIP. 19730105 199803 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Sudaryanto, A.Pi, MM

Jabatan : Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : H. Moh. Arif Latjuba, SE., M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Sumberdaya



H. Moh. Arif Latjuba, SE., M.Si
NIP. 19660418 199203 1 009

PIHAK PERTAMA

Kepala Bidang Pengawasan

Kelautan dan Perikanan

Agus Sudaryanto, A.Pi, MM
NIP. 19700601 199203 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha yang diperiksa	Persentase pelaku usaha yang diperiksa kepatuhannya (%)	50
	Meningkatnya kasus pelanggaran KP yang tertangani	Persentase Tertanganinya pelanggaran KP (%)	100
	Meningkatnya Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Persentase POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan (%)	70
a.	Terawasinya Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah pelaku usaha Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil yang diawasi (pelaku usaha)	335
	Perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	100
	Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	300
	Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	100
	Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15
	Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	100
b.	Terawasinya Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai,	Jumlah pelaku usaha Kelautan dan Perikanan di Wilayah Sungai,	40

	danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang diawasi	
	Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi yang diawasi Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	40

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

	Anggaran	Keterangan
1 Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan & Perikanan	Rp3.021.340.300	APBD
a. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Rp2.944.514.300	APBD
Sub Kegiatan Penanganan perkara sanksi administrative bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	Rp251.779.500	APBD
Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Pembudidyaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Rp213.040.000	APBD
Sub Kegiatan Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Rp970.685.550	APBD
Sub Kegiatan Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Rp227.438.500	APBD
Sub Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKOMASWAS)	Rp1.281.570.750	APBD
b. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp76.826.000	APBD
Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan Provinsi	Rp76.826.000	APBD

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan



H. Moh. Arif Latuaba, SE., M.Si
NIP. 19660418 199203 1 009

PIHAK PERTAMA

Kepala Pengawasan Sumberdaya
Kelautan dan Perikanan

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, flowing lines.

Agus Sudaryanto, A.Pi, MM
NIP. 19700601 199203 100 5



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abd. Rasyid, A,Pi, M.Si

Jabatan : Plt. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wil. I

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : H. Moh. Arif Latjuba, SE., M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan



H. Moh. Arif Latjuba, SE., M.Si

NIP. 196604181992031009

PIHAK PERTAMA

Plt. Kepala UPTD PP dan KKP3K

Abd. Rasyid, A,Pi, M.Si

NIP. 19730105 199803 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kerja	Target
1	2	3	4
I	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kelautan dan Perikanan	Nilai SKM UPT	83
	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan	Persentase Capaian Realisasi APBD UPT	97
	Meningkatnya penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	100
	Meningkatnya penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100
	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100
II	Terkelolanya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wil 1	47
	meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan konservasi secara keberlanjutan	Cakupan kawasan konservasi yang dikelola secara keberlanjutan	52
III	Meningkatnya PAD	PAD (Rp1.000)	1.063.274
	Meningkatnya PAD	Jumlah pelabuhan yang dikembangkan (lokasi)	1
	Meningkatnya produksi ikan	Produksi Ikan yang didaratkan	2.025.844

Program/Kegiatan:	Anggaran	Ket.
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp978.811.980	APBD
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp48.613.800	APBD
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp63.356.040	APBD
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp790.972.140	APBD
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp75.870.000	APBD

Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil **Rp25.812.750** **APBD**

1. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil
Di Luar Minyak dan Gas Bumi Rp 25.812.75 APBD

Pengelolaan Perikanan Tangkap **Rp380.911.100** **APBD**

1. Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan
Pelabuhan Perikanan Provinsi Rp 380.911.100 APBD

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Wil



H. Moh. Arif Latjuba, SE., M.Si
NIP. 196604181992031009

PIHAK PERTAMA

Plt. Kepala UPTD PP dan KKP3K

Abd. Rasyid, A.Pi, M.Si
NIP. 19730105 199803 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendra Kadir, S.Pi, MP
Jabatan : Kasubag TU UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wil. I
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Abd. Rasyid, A.Pi, M.Si
Jabatan : Plt. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wil. I

selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA



Plt. Kepala UPTD PP dan KKP3K Wil. I

Abd. Rasyid, A.Pi, M.Si
NIP. 19730105 199803 1 004

PIHAK PERTAMA

Kasubag TU

Hendra Kadir, S.Pi, MP
NIP. 19820110 200804 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target
1	2	3	4
1	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	1
2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1
3	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1
4	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1
5	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12

Sub Kegiatan:

Ket

- | | | |
|--|----------------|------|
| 1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Rp 48.613.800 | APBD |
| 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp 63.356.040 | APBD |
| 3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rp 606.172.140 | |
| APBD | | |
| 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Rp 184.800.000 | |
| APBD | | |
| 5. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp 75.870.000 | |
| APBD | | |

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



App. Rasyid, A.Pi, M.Si
NIP. 19730105 199803 1 004

Kasubag TU

Hendra Kadir, S.Pi, MP
NIP. 19820110 200804 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kamsina, A.Md.Pi, S.Pi

Jabatan : Plh. Kasi Kepelabuhanan UPTD Pelabuhan Perikanan dan
Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wil. I

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Abd. Rasyid, A.Pi, M.Si

Jabatan : Plt. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wil. I

selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK PERTAMA

Plh. Kasi Kepelabuhanan



Kamsina, A.Md, Pi, S.Pi
NIP. 19840713 201101 2 009

PIHAK KEDUA

Plt. Kepala IPTD PP dan KKP3K Wil. I



Abd. Rasyid, A.Pi, M.Si
NIP. 19730105 199803 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target
1	2	3	4
1	Penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (unit)	1

Sub Kegiatan:
Ket.

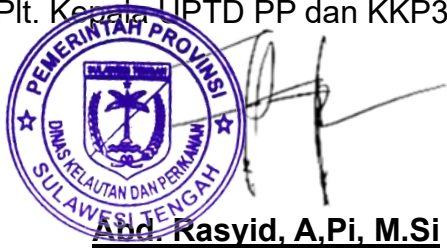
Anggaran

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan APBD Perikanan

Rp 380.911.100

PIHAK KEDUA

Plt. Kepala UPTD PP dan KKP3K Wil. I



Abd. Rasyid, A.Pi, M.Si
NIP. 19730105 199803 1 004

PIHAK PERTAMA

Plh. Kasi Kepelabuhanan



Kamsina, A.Md, Pi, S.Pi
NIP. 19840713 201101 2 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muliawan Rezki, S.Pi, M.Si
Jabatan : Kasi Konservasi dan Pengawasan UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wil. I

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Abd. Rasyid, A.Pi, M.Si
Jabatan : Plt. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wil. I

selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Plt. Kepala UPTD PP dan KKP3K Wil. I



Abd. Rasyid, A.Pi, M.Si

NIP. 19730105 199803 1 004

PIHAK PERTAMA

Kasi Konservasi dan Pengawasan

Muliawan Rezki, S.Pi, M.Si

NIP. 19841209 201001 1 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target
1	2	3	4
1	Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	490.17

Sub Kegiatan:

Anggaran

Ket

1. Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau Kecil berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat

Rp 25.812.750

APBD



PIHAK KEDUA

Plt Kepala SKPTD PP dan KKP3K Wil. I

Abd. Rasyid, A.Pi, M.Si

NIP. 19730105 199803 1 004

PIHAK PERTAMA

Kasi Konservasi dan Pengawasan

Muliawan Rezki, S.Pi, M.Si

NIP. 19841209 201001 1 013



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iffat, S.Pi, MT
Jabatan : Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah II

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. Moh. Arif Latjuba, SE., M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua Pihak Pertama** berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan



H. Moh. Arif Latjuba, SE, M.Si
NIP. 19660418 199203 1 009

PIHAK PERTAMA

Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah II

Iffat, S.Pi, MT
NIP. 19750721 200112 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kerja	Target
1	2	3	4
I	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kelautan dan Perikanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	83
	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan	Persentase Capaian Realisasi APBD UPT	97
	Meningkatnya penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing (%)	100
	Meningkatnya penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100
	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara (%)	100
II	Terkelolanya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wil 2(%)	100
III	Meningkatnya kualitas pengelolaan kawasan konservasi secara berkelanjutan	Cakupan kawasan konservasi yang terkelola secara keberlanjutan(%)	52
IV	Meningkatnya PAD	PAD (Rp1.000)	1089957
		Produksi Ikan yang didaratkan (Kg)	1929495

Program/Kegiatan:	Anggaran	Ket
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi APBD	Rp833.843.693	
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah APBD	Rp73.810.000	
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp72.191.950	APBD
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp687.841.743	APBD
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah APBD	Rp254.593.763	
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp33.997.400	APBD
1. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Rp33.997.400	APBD

**Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil**

Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil
di Luar Minyak dan Gas Bumi

Rp.157.729.000 APBD

Rp157.729.000 APBD

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan



H. Moh. Arif Latjuba, SE,M.Si
NIP. 19660418 199203 1 009

PIHAK PERTAMA

Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan
Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil Wilayah II

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Iffat, S.Pi, MT.

Iffat, S.Pi, MT
NIP. 19750721 200112 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Afrianti, SE
Jabatan : Plh. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah II

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Iffat, S.Pi, MT
Jabatan : Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah II

selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua** Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah II



Iffat, S.Pi, MT

NIP. 19750721 200112 2 002

PIHAK PERTAMA

Plh. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Afrianti, SE

NIP. 19870413 201001 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target
1	2	3	4
1	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	1
2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1
3	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1
4	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1
5	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara(unit)	5
6	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara (unit)	

Sub Kegiatan:

	Anggaran	Ket
1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp73.810.000	APBD
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp72.191.950	APBD
3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp439.866.743	APBD
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp247.975.000	APBD
5. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp254.593.763	APBD

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah II



Irfan S.Pi, MT
NIP. 19750721 200112 2 002

PIHAK PERTAMA

Plh. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Afrianti, SE
NIP. 19870413 201001 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suardin, S.Pi

Jabatan : Kasi Kepelabuhanan

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Iffat, S.Pi, MT

Jabatan : Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah II

selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua** Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan superIVSI yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Palu, 10 Desember 2024

PIHAK KEDUA

Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah II



Iffat, S.Pi, MT

NIP. 19750721 200112 2 002

PIHAK PERTAMA

Kasi Kepelabuhanan

Suardin, S.Pi

NIP. 19721225 200901 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target
1	2	3	4
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (unit)	1

Sub kegiatan:	Anggaran	Ket
1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Rp 33.997.400	APBD

PIHAK KEDUA

Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah II



Irfat, S.Pi, MT

NIP. 19750721 200112 2 002

PIHAK PERTAMA

Kepala Seksi Kepelabuhanan



Suardin, S.Pi

NIP. 19721225 200901 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Afrianti, SE
Jabatan : Kasi Konservasi dan Pengawasan
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Iffat, S.Pi, MT
Jabatan : Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah II

selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua** Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan
Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil Wilayah II



Iffat, S.Pi, MT

NIP. 19750721 200112 2 002

PIHAK PERTAMA

Kepala Seksi Konservasi dan
Pengawasan

Afrianti, SE

NIP. 19870413 201001 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target
1	2	3	4
1	Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	63063.759

Sub Kegiatan:	Anggaran	Keterangan
1 Pengelolaan Kawasan konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Rp157.729.000	APBD

PIHAK KEDUA

Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah II



Irfa S.PI, MT

NIP. 19750721 200112 2 002

PIHAK PERTAMA

Kepala Seksi Konservasi dan Pengawasan

Afrianti, SE

NIP. 19870413 201001 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Sudaryanto, A.Pi, MM
Jabatan : Plt. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wil. III
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. Moh. Arif Latjuba, SE, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
Pihak Pertama berjanji:

1. mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan



H. Moh. Arif Latjuba, SE, M.Si

NIP. 19660418 199203 1 009

PIHAK PERTAMA

Plt. Kepala UPTD PP dan KKP3K

Agus Sudaryanto, A.Pi, MM

NIP. 19700601 199203 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kerja	Target
1	2	3	4
I	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kelautan dan Perikanan.	Indeks Kepuasan Masyarakat	83
1	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan.	Persentase Capaian Realisasi APBD UPT (%)	97
2	Meningkatnya penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing (%)	100
3	Meningkatnya penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing daerah (%)	100
4	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara (%)	100
II	Terkelolanya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wil 3 (%)	54
	meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan konservasi secara keberlanjutan	Cakupan kawasan konservasi yang dikelola secara keberlanjutan	52
III	Meningkatnya PAD	PAD (Rp1.000)	491.000
	Meningkatnya produksi ikan.	Produksi Ikan yang didaratkan (Kg)	673.655

Program/Kegiatan:	Anggaran	Ket.
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp887.641.018	APBD
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp22.920.000	APBD
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp92.364.429	APBD
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp653.340.644	APBD
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp119.015.945	APBD

**Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan
Pulau-pulau Kecil**

Rp24.663.800

APBD

1. Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Berdasarkan
Penetapan Dari Pemerintah Pusat

Rp24.663.800

APBD

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Rp160.308.388

APBD

1. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan
Pelabuhan Perikanan Provinsi

Rp160.308.388

APBD

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Wil. III



H. Moh. Arif Latjuba, SE, M.Si
NIP. 19660418 199203 1 009

PIHAK PERTAMA

Plt. Kepala UPTD PP dan KKP3K

Agus Sudaryanto, A.Pi, MM
NIP. 19700601 199203 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lisnawaty, S. Pi
Jabatan : Kasubag TU UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wil. III

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Agus Sudaryanto, A.Pi, MM
Jabatan : Plt. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wil. III

selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Plt. Kepala UPTD PP dan KKP3K Wil. III



Agus Sudaryanto, A.Pi, MM

NIP. 19700601 199203 1 005

PIHAK PERTAMA

Kasubag TU

Lisnawaty, S. Pi

NIP. 19790306 200701 2 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target
1	2	3	4
1	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1
2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor melalui e-purchasing	1
3	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1
4	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1
5	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2

Sub Kegiatan:

	Anggaran	Ket
1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp22.920.000	APBD
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp92.364.429	APBD
3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp390.047.644	APBD
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp263.293.000	APBD
5. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp119.015.945	APBD

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Plt. Kepala UPTD PP dan KKP3K Wil. III



Agus Sudaryanto, A.Pi, MM
NIP. 19700601 199203 1 005

PIHAK PERTAMA

Kasubag TU

Lisnawaty, S. Pi
NIP. 19790306 200701 2 013



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irmawati, S. Pi
Jabatan : Kasi Kepelabuhanan UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wil. III

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Agus Sudaryanto, A.Pi, MM
Jabatan : Plt. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wil. III

selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Januari 2025

PIHAK KEDUA
Plt. Kepala UPTD PP dan KKP3K Wil. III



Agus Sudaryanto, A.Pi, MM
NIP. 19700601 199203 100 5

PIHAK PERTAMA
Kasi Kepelabuhanan

Irmawati, S. Pi
NIP. 19780521 200701 2 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target
1	2	3	4
1	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara (unit)	1

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan

Anggaran

Rp 160.308 .388

Ket.

APBD

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Plt. Kepala BPTD PP dan KKP3K Wil. III



Agus Sudaryanto, A.Pi, MM
NIP. 19700601 199203 1 005

PIHAK PERTAMA

Kasi Kepelabuhanan

Irma Vati, S. Pi
NIP. 19780521 200701 2 013



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Idrus Nento, S.Pi
Jabatan : Kasi Konservasi dan Pengawasan UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wil. III
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Agus Sudaryanto, A.Pi, MM
Jabatan : Plt. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wil. III
selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
Pihak Pertama berjanji:

1. mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Plt. Kepala UPTD PP dan KKP3K Wil. III


Agus Sudaryanto, A.Pi, MM
NIP. 19700601 199203 100 5

PIHAK PERTAMA

Kasi Konservasi dan Pengawasan


Idrus Nento, S. Pi
NIP. 19730209 200604 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target
1	2	3	4
	Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	60927.006

Sub Kegiatan:

Anggaran

Ket

- | | | | |
|---|---|--------------|------|
| 1 | Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat | Rp24.663.800 | APBD |
|---|---|--------------|------|

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Plt. Kepala UPTD PP dan KKP3K Wil. III


Agus Sudaryanto, A.Pi, MM
NIP. 19700601 199203 100 5

PIHAK PERTAMA

Kasi Konservasi dan Pengawasan


Idrus Nento, S. Pi
NIP. 19730209 200604 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asri Chairuddin Amier, S.Pi, M. Si
Jabatan : Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wil. IV

selanjutnya disebut **Pihak pertama**

Nama : H. Moh. Arif Latjuba, SE., M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua Pihak Pertama** berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan



H. Moh. Arif Latjuba, SE., M.Si
NIP. 19660418 199203 1 009

PIHAK PERTAMA

Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah IV

Asri Chairuddin Amier, S.Pi, M.Si
NIP. 19700113 200502 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kelautan dan Perikanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	83
	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan	persentase Capaian Realisasi APBD UPT (%)	97
	Meningkatnya penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing (%)	100
	Meningkatnya penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100
	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara (%)	100
II	Terkelolanya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah IV	55
	meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan konservasi secara keberlanjutan	Cakupan kawasan konservasi yang dikelola secara keberlanjutan	52
IV	Meningkatnya produksi ikan	PAD (Rp1.000)	226.720
	Meningkatnya produksi ikan	Produksi Ikan yang didaratkan	1.532.462

Program/Kegiatan:	Anggaran	Ket
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp481.864.780	APBD
1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp82.915.000	APBD
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp44.065.450	APBD
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp316.839.680	APBD
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Rp38.044.650	APBD
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Rp49.814.750	APBD
1. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Rp49.814.750	APBD

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Rp254.181.156 APBD

1. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan
Pelabuhan Perikanan Provinsi

Rp254.181.156 APBD

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan



H. Moh. Arif Latjuba, SE., M.Si
NIP. 19660418 199203 1 009

PIHAK PERTAMA

Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan
Kawasan Konservasi Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil Wilayah IV

A handwritten signature in black ink, belonging to Asri Chairuddin Amier.

Asri Chairuddin Amier, S.Pi, M.Si
NIP. 19700113 200502 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Nur Pasau, SE
Jabatan : Kepala Seksi Tata Usaha UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VI
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Jufri Lahmadi, S.Pi
Jabatan : Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VI

selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua** Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan



H. Moh. Arif Latjuba, SE., M.Si
NIP. 19660418 199203 1 009

PIHAK PERTAMA

Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah IV

Asri Chairuddin Amier, S.Pi, M.Si
NIP. 19700113 200502 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1
2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1
3	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1
4	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1
5	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Dayasediakan (laporan)	5
6	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara	10

Sub Kegiatan:

		Anggaran	Ket
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp82.915.000	APBD
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp44.065.450	APBD
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp246.039.680	APBD
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp70.800.000	APBD
5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp38.044.650	APBD

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan



H. Moh. Arif Latjuba, SE., M.Si
NIP. 19660418 199203 1 009

PIHAK PERTAMA

Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan
Kawasan Konservasi Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil Wilayah IV

Asri Chairuddin Amier, S.Pi, M.Si
NIP. 19700113 200502 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sukiman, S. Pi
Jabatan : Kepala Seksi Kepelabuhanan UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VI
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Jufri Lahmadi, S.Pi
Jabatan : Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VI

selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua** Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan



H. Moh. Arif Latjuba, SE., M.Si
NIP. 19660418 199203 1 009

PIHAK PERTAMA

Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah IV

Asri Chairuddin Amier, S.Pi, M.Si
NIP. 19700113 200502 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (unit)	1

Sub Kegiatan:	Anggaran	Keterangan
1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Rp254.181.156	APBD

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan



H. Moh. Arif Latjuba, SE., M.Si
NIP. 19660418 199203 1 009

PIHAK PERTAMA

Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan
Kawasan Konservasi Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil Wilayah IV

Asri Chairuddin Amier, S.Pi, M.Si
NIP. 19700113 200502 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rusdi, S.Pi, M.Si
Jabatan : Plh. Kepala Seksi Konservasi dan Pengawasan UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VI

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Jufri Lahmadi, S.Pi
Jabatan : Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VI

selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua** Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan



H. Moh. Arif Latjuba, SE., M.Si
NIP. 19660418 199203 1 009

PIHAK PERTAMA

Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah IV

Asri Chairuddin Amier, S.Pi, M.Si
NIP. 19700113 200502 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	21207.202

Sub Kegiatan:	Anggaran	Keterangan
1 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Rp49.814.750	APBD

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan



H. Moh. Arif Latjuba, SE., M.Si
NIP. 19660418 199203 1 009

PIHAK PERTAMA

Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan
Kawasan Konservasi Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil Wilayah IV

Asri Chairuddin Amier, S.Pi, M.Si
NIP. 19700113 200502 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zainal Abdi, S.Pi, M.Si
Jabatan : Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Wilayah V

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. Moh. Arif Latjuba, SE., M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua Pihak Pertama** berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan



H. Moh. Arif Latjuba, SE., M.Si
NIP. 19660418 199203 1 009

PIHAK PERTAMA

Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Wilayah V

Zainal Abdi, S.Pi, M.Si
NIP. 19750114 200112 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kelautan dan Perikanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	83
	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan	Persentase Capaian Realisasi APBD UPT	97
	Meningkatnya penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	97
	Meningkatnya penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	97
	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	97
2.	Terkelolanya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah V	45
	meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan konservasi secara keberlanjutan	Cakupan kawasan konservasi yang dikelola secara keberlanjutan	80
3	Meningkatnya PAD	PAD (Rp1.000)	1.099.728
	Meningkatnya produksi ikan	Produksi Ikan yang didaratkan	1.200.000

Program/Kegiatan:	Anggaran	Ket
Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp1.068.622.600	APBD
Daerah Provinsi		
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp64.560.000	APBD
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp39.105.200	APBD
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Rp762.175.800	APBD
4. Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp202.781.600	APBD
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp19.670.000	APBD
1. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Rp19.670.000	APBD

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Rp8.970.000

APBD

1. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Rp8.970.000 APBD

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan



H. Moh. Arif Latjuba, SE., M.Si
NIP. 19660418 199203 1 009

PIHAK PERTAMA

Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan
Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau
Pulau Kecil Wilayah V

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zainal Abdi', written over a horizontal line.

Zainal Abdi, S.Pi, M.Si
NIP. 19750114 200112 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rosy Meirina, S.Si
Jabatan : Plh. Kasubag Tata Usaha UPTD Kawasan konservasi Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Wilayah V

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Zainal Abdi, S.Pi, M.Si
Jabatan : Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Wilayah V

selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua** Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Januari 2025

PIHAK KEDUA

Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Wilayah V

Zainal Abdi, S.Pi, M.Si
NIP. 19750114 200112 1 005

PIHAK PERTAMA

Plh. Kasubag Tata Usaha

Rosy Meirina, S.Si
NIP. 19880514 201503 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tersedianya Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1
2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1
3	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1
4	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1
5	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5

Sub Kegiatan:

Anggaran

Ket

1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp64.560.000	APBD
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp39.105.200	APBD
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp575.875.800	APBD
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp186.300.000	APBD
5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp202.781.600	APBD

PIHAK KEDUA

Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Wilayah V



Zainal Abdi, S.Pi, M.Si
NIP. 19750114 200112 1 005

PIHAK PERTAMA

Plh. Kepala Seksi Tata Usaha



Rosy Meirina, S.Si
NIP. 19880514 201503 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : S u y a t a, ST, MPW
Jabatan : Kepala Seksi Konservasi dan Pengawasan UPTD Pelabuhan
Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau2
Kecil Wilayah V

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Zainal Abdi, S.Pi, M.Si
Jabatan : Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi
Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Wilayah V

selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua** Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Januari 2025

PIHAK KEDUA

Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan
Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau
Pulau Kecil Wilayah V

Zainal Abdi, S.Pi, M.Si
NIP. 19750114 200112 1 005

PIHAK PERTAMA

Kepala Seksi Konservasi dan
Pengawasan

S u y a t a, ST, MPW
NIP. 19720821 200604 1 015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	30.732,20

Sub Kegiatan:	Anggaran	Keterangan
1 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Rp19.670.000	APBD

PIHAK KEDUA

Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Wilayah V



Zainal Abdi, S.Pi, M.Si
NIP. 19750114 200112 1 005

PIHAK PERTAMA

Kepala Seksi Konservasi dan Pengawasan



Suyata, ST, MPW
NIP. 19720821 200604 1 015



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : S u y a t a, ST, MPW
Jabatan : Plh. Kepala Seksi Kepelabuhanan UPTD Kawasan konservasi
Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Wilayah V
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Zainal Abdi, S.Pi, M.Si
Jabatan : Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi
Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Wilayah V

selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua** Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Januari 2025

PIHAK KEDUA

Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan
Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau
Pulau Kecil Wilayah V

Zainal Abdi, S.Pi, M.Si
NIP. 19750114 200112 1 005

PIHAK PERTAMA

Plh. Kepala Seksi Kepelabuhanan

S u y a t a, ST, MPW
NIP. 19720821 200604 1 015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (unit)	1

Sub Kegiatan:

Anggaran

Ket

1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Rp8.970.000	APBD
---	---	-------------	------

PIHAK KEDUA

Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan
Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau
Pulau Kecil Wilayah V



Zainal Abdi, S.Pi, M.Si
NIP. 19750114 200112 1 005

PIHAK PERTAMA

Plh. Kepala Seksi Kepelabuhanan



S u y a t a, ST, MPW
NIP. 19720821 200604 1 015



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jufri Lahmadi, S.Pi
Jabatan : Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VI

selanjutnya disebut **Pihak pertama**

Nama : H. Moh. Arif Latjuba, SE., M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua Pihak Pertama** berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan



H. Moh. Arif Latjuba, SE., M.Si
NIP. 19660418 199203 1 009

PIHAK PERTAMA

Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VI

Jufri Lahmadi, S.Pi
NIP. 19770119 200903 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah Pada UPTD	Indeks Kepuasan Masyarakat	83
	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan UPT	Persentase Capaian Realisasi APBD UPT (%)	97
	Meningkatnya penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	100
	Meningkatnya penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100
	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100
2.	Terkelolanya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah VI	50
	meningkatkan kulaitas pengelolaan kawasan konservasi secara keberlanjutan	Cakupan kawasan konservasi yang dikelola secara keberlanjutan	52
3.	Meningkatnya PAD	PAD (Rp. 1000)	483.687
	Meningkatnya produksi ikan	Produksi Ikan yang didaratkan	50.000

Program/Kegiatan:	Anggaran	Ket
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp715.146.125	APBD
1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp104.340.000	APBD
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp196.650.615	APBD
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp378.933.510	APBD
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Rp35.222.000	APBD
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Rp169.315.300	APBD
1. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Rp169.315.300	APBD
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp76.475.000	APBD
2. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Rp76.475.000	APBD

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan



H. Moh. Arif Latjuba, SE., M.Si
NIP. 19660418 199203 1 009

PIHAK PERTAMA

Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan
Kawasan Konservasi Pesisir dan
Pulau2 Kecil Wilayah VI

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Jufri Lahmadi, is written over the official stamp.

Jufri Lahmadi, S.Pi
NIP. 19770119 200903 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Nur Pasau, SE
Jabatan : Kepala Seksi Tata Usaha UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VI

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Jufri Lahmadi, S.Pi
Jabatan : Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VI

selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua** Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VI



Jufri Lahmadi, S.Pi

NIP. 19770119 200903 1 001

PIHAK PERTAMA

Kepala Seksi Tata Usaha

Muhammad Nur Pasau, SE
NIP. 19750708 201001 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tersedianya Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1
2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1
3	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1
4	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1
5	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1

Sub Kegiatan:

		Anggaran	Ket
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp104.340.000	APBD
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp196.650.615	APBD
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp282.193.510	APBD
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp96.740.000	APBD
5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp35.222.000	APBD

PIHAK KEDUA

Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VI



Jufri Lahmadi, S.Pi
NIP. 19770119 200903 1 001

PIHAK PERTAMA

Kepala Seksi Tata Usaha

Muhammad Nur Pasau, SE
NIP. 19750708 201001 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sukiman, S. Pi
Jabatan : Kepala Seksi Kepelabuhanan UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VI
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Jufri Lahmadi, S.Pi
Jabatan : Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VI

selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua** Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VI



Jufri Lahmadi, S.Pi

NIP. 19770119 200903 1 001

PIHAK PERTAMA

Kepala Seksi Kepelabuhanan

Sukiman, S. Pi

NIP. 19790703 200801 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (unit)	1

Sub Kegiatan:	Anggaran	Keterangan
1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Rp76.475.000	APBD

PIHAK KEDUA

Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VI



Juni Irmadi, S.Pi
NIP. 19770119 200903 1 001

PIHAK PERTAMA

Kepala Seksi Kepelabuhanan

Sukiman, S. Pi
NIP. 19790703 200801 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rusdi, S.Pi, M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Seksi Konservasi dan Pengawasan UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VI

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Jufri Lahmadi, S.Pi

Jabatan : Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VI

selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua** Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VI



Jufri Lahmadi, S.Pi

NIP. 19770119 200903 1 001

PIHAK PERTAMA

Plt. Kepala Seksi Konservasi dan Kepelabuhanan

Rusdi, S.Pi, M.Si

NIP. 19731001 200212 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	388.385,51

Sub Kegiatan:	Anggaran	Keterangan
1 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Rp169.315.300	APBD

PIHAK KEDUA

Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VI



Juri Lahmadi, S.Pi
NIP. 19770119 200903 1 001

PIHAK PERTAMA

Plt. Kepala Seksi Kepelabuhanan

Rusdi, S.Pi, M.Si
NIP. 19731001 200212 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JUPRIANUS SANGRAPU, S.Pi
Jabatan : plt. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Wilayah VII
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. Moh. Arif Latjuba, SE., M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua Pihak Pertama** berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan



H. Moh. Arif Latjuba, SE., M.Si
NIP. 19660418 199203 1 009

PIHAK PERTAMA

Plt. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Wilayah VII

Juprianus Sangrapu, S.Pi
NIP. 19781210 200901 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO. (1)	Sasaran Program/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
I	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kelautan dan Perikanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	83
	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan.	Persentase Capaian Realisasi APBD UPT (%)	97
	Meningkatnya penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing.	Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing (%)	100
	Meningkatnya penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100
	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah.	Persentase barang milik daerah yang dipelihara (%)	100
II	Terkelolanya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil.	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah VII (%)	60
III	meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan konservasi secara keberlanjutan.	Cakupan kawasan konservasi yang dikelola secara keberlanjutan	52
IV	Terlaksananya pelayanan di Pelabuhan Perikanan.	Persentase peningkatan pelayanan kepelabuhanan (%)	100
V	Meningkatnya produksi ikan	Produksi ikan yang didaratkan (Kg)	45000

Program/Kegiatan:

Anggaran

Ket.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Rp186.790.480 APBD

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah

Rp33.736.765 APBD
Rp9.181.525 APBD
Rp82.682.190 APBD
Rp61.190.000 APBD

Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Rp106.250.000 APBD

1. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

Rp106.250.000 APBD

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Rp64.124.000 APBD

1. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi

Rp 64.124.000 APBD

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan



H. Moh. Arif Latjuba, SE., M.Si
NIP. 19660418 199203 1 009

PIHAK PERTAMA

Kepala Seksi Konservasi dan Pengawasan



Juprianus Sangrapu, S.Pi
NIP. 19781210 200901 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuliani, S.Pi, M.Si
Jabatan : KTU UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi
Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Wilayah VII

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Jufrianus Sangrapu, S.Pi
Jabatan : plt. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi
Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil Wilayah VII

selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua** Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

plt. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan
dan Kawasan Konservasi Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil Wilayah VII



Jufrianus Sangrapu, S.Pi
NIP. 19781210 200901 1 001

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK PERTAMA
Kepala Tata Usaha

Yuliani, S.Pi, M.Si
NIP. 19780518 200604 2 018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	1
2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor melalui e-purchasing (paket)	1
3	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan).	1
4	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1
5	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1
5	Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	131106.061

Sub Kegiatan:

	Anggaran	Ket
1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN APBD	Rp33.736.765	
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor APBD	Rp9.181.526	
3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik APBD	Rp25.640.000	
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor APBD	Rp57.042.190	
5. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya APBD	Rp61.190.000	

PIHAK KEDUA

Plt. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan
dan Kawasan Konservasi Pesisir dan
Mau-Pulau Kecil Wilayah VII



Juprianus Sangrapu, S.Pi
NIP. 19781210 200901 1 001

PIHAK PERTAMA

Kepala Tata Usaha

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'Y' inside a circle followed by a series of loops and a horizontal line.

Yuliani, S.Pi, M.Si
NIP. 19780518 200604 2 018



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JUPRIANUS SANGRAPU, S.Pi
Jabatan : Kasi Konservasi dan Pengawasan UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wilayah VII
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : JUPRIANUS SANGRAPU, S.Pi
Jabatan : plt. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Wilayah VII

selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua** Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA

Plt. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VII



Juprianus Sangrapu, S.Pi
NIP. 19781210 200901 1 001

PIHAK PERTAMA

Kepala Seksi Konservasi dan Pengawasan

Juprianus Sangrapu, S.Pi
NIP. 19781210 200901 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	131106061

	Sub Kegiatan:	Anggaran	Ket.
1	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Rp106.250.000	APBD

PIHAK KEDUA

plt. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan
dan Kawasan Konservasi Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil Wilayah VII



Juprianus Sangrapu, S.Pi
NIP. 19781210 200901 1 001

PIHAK PERTAMA

Kepala Seksi Konservasi dan
Pengawasan

Juprianus Sangrapu, S.Pi
NIP. 19781210 200901 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Juprianus Sangrapu, S.Pi
Jabatan : Kasi Kepelabuhanan UPTD Pelabuhan Perikanan dan
Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wilayah VII
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Juprianus Sangrapu, S.Pi
Jabatan : plt. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Wilayah VII

selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua** Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Plt. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan
dan Kawasan Konservasi Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil Wilayah VII



Juprianus Sangrapu, S.Pi
NIP. 19781210 200901 1 001

PIHAK PERTAMA

Kepala Seksi Kepelabuhanan

Juprianus Sangrapu, S.Pi
NIP. 19781210 200901 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (unit)	1

	Sub Kegiatan:	Anggaran	Ket.
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Rp64.124.000	APBD

PIHAK KEDUA

plt. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan
dan Kawasan Konservasi Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil Wilayah VII



Juprianus Sangrapu, S.Pi
NIP. 19781210 200901 1 001

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK PERTAMA

Plh. Kepala Seksi Kepelabuhanan

Juprianus Sangrapu, S.Pi
NIP. 19781210 200901 1 001

KEGIATAN-KEGIATAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN SELAMA TAHUN 2025

A. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

- Bantuan untuk program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan produktivitas



B. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

- Bantuan untuk program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan produktivitas



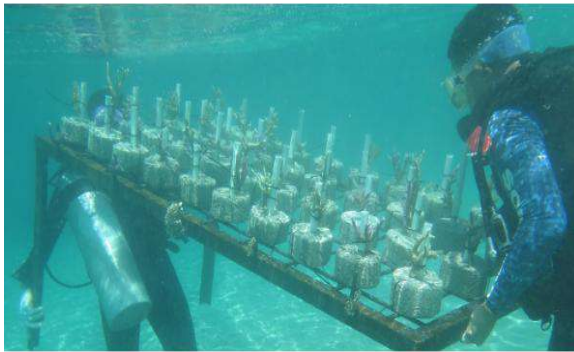
C. Program Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan

- Kegiatan memasyarakatkan gemar makan ikan



D. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- Kegiatan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut, penanganan sampah laut dan pemberdayaan masyarakat pesisir



E. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

- Kegiatan pengawasan

